

**IMPLEMENTASI TATA KELOLA SAMPAH PERKOTAAN:
STUDI KASUS KECAMATAN NGALIYAN**

SKRIPSI

Program Studi S-1 Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Safri Subhan Kahfi

2006016013

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi dari mahasiswa:

Nama : Safri Subhan Kahfi

NIM : 2006016013

Jurusan : Ilmu Politik

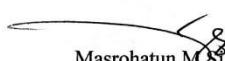
Judul Skripsi : Tata Kelola Sampah Perkotaan: Studi Kasus Kecamatan Ngaliyan

Dengan ini telah kami telah setujui dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya, kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 13 Juni 2025

Pembimbing



Masrohatun M.Si

NIP.198806212018012001

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI TATA KELOLA SAMPAH PERKOTAAN: STUDI KASUS
KECAMATAN NGALIYAN

Disusun Oleh:

Safri Subhan Kahfi

2006016013

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 26 Juni 2025 dan
telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris



M. Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP: 198505022019031007

Penguji I

Pembimbing



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

NIP: 196805051995031002



Masrohatun, M.Si

NIP: 198806212018012001

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Safri Subhan Kahfi, menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "Implementasi Tata Kelola Sampah Perkotaan: Studi Kasus Kecamatan Ngaliyan" merupakan hasil karya tulis saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang telah diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang maupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum dipublikasikan telah dicantumkan sumbernya secara jelas dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila terdapat unsur plagiarisme dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi yang ada. Demikian, atas perhatian dan pengertiannya saya sampaikan terima kasih.

11

Semarang, 13 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Safri Subhan Kahfi

2006016013

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala tuhan seluruh alam semesta. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak dan karunia-Nya. Alhamdulillah, atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Tata Kelola Sampah Perkotaan Studi Kasus Kecamatan Ngaliyan.” Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad shallalhu alaihi wassalam, *the prophet one* nabi yang semoga memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat. Aamiin.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah kelegaan dan kegembiraan tersendiri khusus nya bagi penulis, Skripsi ini merupakan sebuah pencapaian dari proses pembelajaran baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan selama penulis mencari ilmu di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam mengemban ilmu di FISIP UIN Walisongo, penulis masih memiliki banyak kekurangan dan tentunya banyak pihak yang berkontribusi dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat berada pada tempat sekarang ini. Oleh karena itu sudah seharusnya dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag yang telah memberikan bebagai ilmu serta usaha nya kepada para mahasiswa di UIN Walisongo Semarang termasuk penulis sendiri. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemuliaan disisi Allah SWT.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik untuk FISIP. Semoga dengan beliau FISIP semakin maju dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si. sekaligus merupakan dosen mata kuliah kebijakan publik yang telah memberikan arahan, masukan dan ilmunya dalam proses pembuatan skripsi.

4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Ibu Masrohatun M.Si. sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan dukungan selama proses perkuliahan hingga proses pembuatan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya atas waktu dan ilmunya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo yang mendidik penulis dari semester awal hingga akhir dan telah membantu banyak hal dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh informan penelitian yang memberikan segenap informasi kepada penulis sehingga dapat memperkaya data penelitian dan penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
7. Mamah, ayah, kakak, dan adik tercinta yang selalu mendukung dan membantu penulis dengan tulus berupa moral dan juga material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. *The special one* Dea Aulia Rahmi (2201016109), terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi, penasehat yang baik dan senantiasa selalu memberikan cinta.
9. Segenap keluarga kontrakan Bahagia, Fanniya, Asdut, Nizar, Bakhri, Ayung, Ute, Maul, Sner, Rowi. Terimakasih telah menemani penulis semasa perkuliahan dengan penuh suka dan duka.
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (HMJB) terkhusus Iyad, Agoy, Adul, Fikri, Agus, Dira, Muna dan semuanya. Terimakasih banyak telah menjadi teman yang se frekuensi selama berkuliah di UIN Walisongo.
11. Teman-teman Padepokan (PHT) Ato, Fadhil, Uda, Damale, dan Lemping yang senantiasa selalu menemani dan membantu penulis saat senang-senang.
12. Teman-teman penulis yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak pernah menyangka dapat bertemu teman seperti kalian.
13. Dan yang terakhir tentunya untuk saya sendiri Safri Subhan Kahfi, terimakasih karna selama ini sudah selalu berjuang sampai titik ini. Mari berbenah untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya setelah ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu penulis sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak serta dapat menjadi referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah selalu melimpahkan ahmat an ridho-Nya kepada kita semua.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan do'a serta rasa syukur atas rahmat, karunia dan hidayah
kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya yang telah
membesarkan dan mendidik saya agar menjadi anak yang berguna serta selalu
memberikan dukungan dalam segala hal saat menjalani hidup, dan selalu
memanjatkan do'a untuk saya tanpa henti untuk meraih kesuksesan.

MOTTO

“It doesn't matter how bad you were in the past, but try to live better than yesterday because tomorrow is a mystery”

“Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau perlu bersandar hibahkan lelahmu.”

- Perunggu 33x

ABSTRAK

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan tantangan krusial yang dihadapi banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Semarang. Meskipun telah ada kerangka regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, implementasinya di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Ngaliyan, masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Daerah tersebut di Kecamatan Ngaliyan, serta mengidentifikasi faktor-faktor dari isi kebijakan dan konteks implementasi yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan pelaksanaannya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berlandaskan Teori Implementasi Kebijakan Grindle (1980), data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di beberapa kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup, Bank Sampah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, dan sektor swasta. Interaksi antara karakteristik isi kebijakan (seperti tuntutan perubahan perilaku dan alokasi sumber daya) dan konteks implementasi (meliputi kekuasaan, kepentingan aktor, karakteristik institusional, kepatuhan masyarakat, serta lingkungan sosial-ekonomi) secara dinamis membentuk proses implementasi. Meskipun terdapat inisiatif positif seperti peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat di beberapa komunitas, serta potensi ekonomi melalui bank sampah, tantangan signifikan masih ada, terutama terkait keterbatasan sumber daya, kurangnya kepatuhan masyarakat secara merata, dan koordinasi antaraktor yang belum optimal. Diskusi ini menekankan pentingnya memahami dinamika implementasi kebijakan untuk mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Ngaliyan

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tata Kelola Sampah

ABSTRACT

Urban waste management poses a crucial challenge for many cities in Indonesia, including Semarang City. Despite the existence of a regulatory framework such as Regional Regulation Number 06 of 2012 concerning Waste Management, its implementation at the local level, particularly in Ngaliyan District, still faces various obstacles. This study aims to analyze the implementation process of this Regional Regulation in Ngaliyan District, and to identify the policy content and implementation context factors that influence its success and challenges. Employing a descriptive qualitative approach and grounded in Grindle's (1980) Policy Implementation Theory, data was collected through interviews and observations in several sub-districts. The findings indicate that the implementation of the Regional Regulation involves various stakeholders, including the Sub-district Government, Urban Village Offices, Environmental Agency, Waste Banks, Community Empowerment Institutions, Neighborhood Units, and the private sector. The dynamic interaction between policy content characteristics (such as demands for behavioral change and resource allocation) and the implementation context (encompassing actors' power and interests, institutional characteristics, community compliance, and the socio-economic environment) shapes the implementation process. While positive initiatives exist, such as increased community awareness and participation in some communities, and economic potential through waste banks, significant challenges persist, particularly concerning limited resources, uneven community compliance, and suboptimal inter-actor coordination. This discussion emphasizes the importance of understanding policy implementation dynamics to foster more effective and sustainable waste management practices in Ngaliyan District.

Keyword: *Policy Implementation, Waste Management*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Aktor-Aktor Dalam Tata Kelola Sampah	7
2. Tata Kelola Sampah Perkotaan	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II	21
TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	21
A. Pengertian Implementasi Kebijakan	21

B.	Teori Implementasi Kebijakan Grindle.....	21
C.	Interaksi Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi	24
BAB III.....		26
LANDSCAPE KECAMATAN NGALIYAN		26
A.	Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan dan Sampah Ngaliyan	26
BAB IV		35
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN		35
A.	Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngaliyan.....	35
B.	Tahapan Proses Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda No. 06 Tahun 2012	36
C.	Hambatan Implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 dalam Pengelolaan Sampah	43
BAB V.....		47
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN		47
A.	Identifikasi Aktor Utama dalam Implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan	47
B.	Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Teori Grindle.....	73
C.	Interaksi antara Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi.....	77
BAB VI.....		79
DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN		79
A.	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.....	79
B.	Penurunan Volume Sampah yang Dibuang ke TPA	80
C.	Peningkatan Ekonomi Melalui Bank Sampah.....	81
D.	Koordinasi Antar Aktor yang lebih baik	82
BAB VII		84
PENUTUP		84

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA.....	92
CURRICULUM VITAE.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sebaran Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2024	2
Tabel 3. 1 Tabel Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan, 2023.	27
Tabel 3. 2 Tabel Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan 2023.....	28
Tabel 3. 3 Tabel Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Ngaliyan	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu kota tidak hanya berdampak positif pada aktivitas ekonomi tetapi juga memiliki berbagai dampak buruk. Contoh konsekuensi negatif dari pembangunan kota adalah peningkatan volume sampah pada setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kawasan perkotaan, masalah sampah menjadi semakin mendesak dan membutuhkan perhatian serta bantuan khusus. Pengelolaan dan penanganan sampah saat ini masih kurang efektif karena berbagai faktor. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan atau program pengelolaan yang tidak terintegrasi, serta minimnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, baik dari sektor bisnis maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik seharusnya menjadi jawaban atas beberapa permasalahan diatas (Gobai et al., 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah hasil sisa dari aktivitas manusia sehari-hari atau proses alami yang berbentuk padat. Jika tidak dikelola dengan benar, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, baik bagi lingkungan, kesehatan, maupun perekonomian. Salah satu dampaknya adalah terjadinya pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air dan udara (Hasibuan, 2016). Sampah yang menumpuk juga dapat menyebabkan terjadinya banjir yang sering terjadi pada musim hujan. Tumpukan sampah tentunya juga dapat menimbulkan penyakit yang menganggu keseimbangan lingkungan didalamnya (Rosyidie, 2013). Keindahan kota tentunya akan terganggu oleh hadirnya sampah sampah yang ada. Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di banyak kota di Indonesia termasuk di Kota Semarang (Sholihah, 2020).

Kota Semarang yang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu kota yang banyak dijadikan sebagai tempat menimba ilmu serta tempat orang-orang menggantungkan kehidupannya. Tercatat jumlah migrasi masuk ke Kota Semarang yakni 672.731 jiwa pada tahun 2023 (BPS, Kota Semarang Dalam Angka 2023). Seiring dengan padatnya penduduk yang ada tentunya hal tersebut mengakibatkan naiknya volume sampah yang ada. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mencatat dalam sehari produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1.110 ton perhari (DLH Kota Semarang). Berikut table timbulan sampah per kecamatan tahun 2024 yang ada di Kota Semarang.

Tabel 1. 1 Sebaran Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2024

KODE	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH TIMBUNAN SAMPAH/ TAHUN (TON)	RASIO SAMPAH PER ORANG (TON)
33.74	KOTA SEMARANG	1,688,981	118,229	70,000
33.74.01	SEMARANG TENGAH	57,960	4,057	0,0699965
33.74.02	SEMARANG UTARA	119,321	8,352	0,699960
33.74.03	SEMARANG TIMUR	70,059	4,904	0,06999
33.74.04	GAYAMSARI	72,536	5,078	0,06722
33.74.05	GENUK	124,634	8,724	0,06999
33.74.06	PEDURUNGAN	197,125	13,799	0,7000
33.74.07	SEMARANG SELATAN	66,633	4,664	0,06999
33.74.08	CANDISARI	78,128	5,469	0,0700
33.74.09	GAJAHMUNGKUR	58,229	4,076	0,06999
33.74.10	TEMBALANG	189,689	13,278	0,06999
33.74.11	BANYUMANIK	143,953	10,077	0,07000
33.74.12	GUNUNGPATI	99,357	6,955	0,07000
33.74.13	SEMARANG BARAT	154,351	10,805	0,07000
33.74.14	MIJEN	80,025	5,602	0,07000
33.74.15	NGALIYAN	142,845	9,999	0,06999
33.74.16	TUGU	34,136	2,390	0,0700019

Sumber: DLH Kota Semarang (2023)

Berdasarkan data diatas, dapat diartikan bahwasannya Kota Semarang memiliki total jumlah penduduk sebanyak 1,688,981 jiwa dengan total timbunan sampah mencapai 118,229 ton per tahunnya. Dari analisis data kecamatan dengan jumlah timbunan sampah paling banyak berada di Kecamatan Pedurungan dengan jumlah timbulan sampah sebesar 13,799 ton dari 197,125 penduduk, rasio 0.0700 ton/orang. Sebaliknya, Kecamatan Tugu mencatatkan jumlah timbunan sampah paling sedikit, yaitu dengan jumlah timbulan sampah sebesar 2,390 ton dari 34,136 penduduk, dengan rasio 0.0699 ton/orang.

Kecamatan Ngaliyan memiliki jumlah penduduk sebanyak 142,845 jiwa dan menghasilkan timbunan sampah sebanyak 9,999 ton. Meskipun jumlah penduduknya berada di tengah-tengah dalam daftar kecamatan, volume sampah yang dihasilkan cukup signifikan. Dengan menduduki posisi tiga terbanyak dari timbulan sampah yang ada per kecamatan yang ada di Kota Semarang. Dengan perhitungan sederhana, rasio timbunan sampah per jiwa di Ngaliyan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Sampah per Jiwa} = \text{Jumlah Timbulan Sampah}$$

$$\text{Jumlah Penduduk } 9,999 \text{ ton } 142,845 \text{ jiwa} \approx 0.070.$$

Rasio ini menunjukkan bahwa setiap warga di Kecamatan Ngaliyan menghasilkan sekitar 70 kilogram sampah per tahun. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan timbunan sampah. Terlebih lagi sampah yang diangkut ke TPA dari 10 TPS di Kecamatan Ngaliyan hanya mencapai 103,6 m³ per-hari dari total 270,98 m³ per-hari. Dengan demikian tingkat pelayanan pengangkutan sampah di wilayah tersebut hanya sebesar 32,8%. Timbunan sampah yang berlebihan di beberapa TPS menyebabkan sebagian sampah tidak langsung diangkut ke TPA pada hari pengumpulan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan efisien untuk mengurangi biaya dan waktu pengangkutan, serta meningkatkan kualitas layanan. Biaya pengangkutan sampah sendiri cukup

tinggi, yakni sekitar 60% dari total biaya pengelolaan sampah (Triwibowo & Halimatussadiyah, 2016). Dalam konteks ini, pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan masih menghadapi berbagai tantangan.

Keterlibatan aktor-aktor dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan dapat dikategorikan ke dalam pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran sebagai pengatur dan penyedia layanan, sementara masyarakat berfungsi sebagai pengguna dan partisipan aktif. Sektor swasta dapat memberikan inovasi dan investasi dalam teknologi pengelolaan sampah. Keterlibatan ketiga aktor ini sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori tata kelola yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan penelitian (Marlina, 2020) dan (Permatasari, 2019). Selanjutnya, pengenalan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai metode dalam pengelolaan sampah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Dalam skripsi, konsep ini dapat diintegrasikan sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, dengan menekankan pada pentingnya inovasi dalam pendekatan pengelolaan, seperti penerapan Bank Sampah. Artikel menunjukkan bahwa Bank Sampah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran sosial dan ekonomi masyarakat terhadap nilai sampah sesuai dengan penelitian (Syahputra, 2021) dan (Nov Pratama, 2018).

Menyadari urgensi permasalahan sampah, Pemerintah Kota Semarang membuat Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini menjadi landasan hukum dan kerangka kebijakan formal yang mengatur seluruh aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, penanganan, hingga peran serta tanggung jawab berbagai pihak, termasuk masyarakat. Pasal-pasal dalam Perda ini mengamanatkan kewajiban bagi setiap warga untuk mengelola sampah dari sumbernya, termasuk melalui pemilahan. Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa meskipun Perda ini telah berlaku selama lebih dari satu dekade, implementasinya di Kecamatan Ngaliyan masih belum optimal. Tingkat pelayanan pengangkutan sampah yang rendah dan

masih banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan realitas pelaksanaannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, melainkan juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan.

Untuk memahami kompleksitas kesenjangan antara kebijakan dan implementasi ini, penelitian ini akan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Grindle (1980). Grindle berargumen bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan merupakan hasil interaksi dinamis antara Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*). Dalam kerangka ini, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 akan menjadi fokus utama sebagai representasi dari Isi Kebijakan, yang karakteristiknya seperti kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, perubahan yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan, dan sumber daya yang dialokasikan akan dianalisis. Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji Konteks Implementasi di Kecamatan Ngaliyan, meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (pemerintah kecamatan, kelurahan, DLH, bank sampah, LPMK, RT/RW, dan PT Narpati), karakteristik rezim dan institusi, tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang ada. Dengan mempertimbangkan interaksi antara kedua variabel ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan dapat ditingkatkan melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran masing-masing aktor dan dampak dari kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Penelitian ini tentunya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti lain di berbagai tempat serta subjek yang berbeda. Namun, penelitian ini masih menarik untuk diteliti lebih dalam guna memperkaya studi tentang hal tersebut. Dengan mempertimbangkan teori dinamika kolaborasi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan

dapat ditingkatkan melalui kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran masing-masing aktor dan dampak dari kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Maka dari itu penelitian ini diberi judul "**TATA KELOLA SAMPAH PERKOTAAN: STUDI KASUS KECAMATAN NGALIYAN**".

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama terkait tata kelola sampah di Kecamatan Ngaliyan. Berikut adalah rincian rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan di Kecamatan Ngaliyan?
2. Bagaimana analisis implementasi kebijakan serta siapa saja aktor yang terlibat dalam tata kelola sampah di Kecamatan Ngaliyan?
3. Apa dampak dari implementasi kebijakan tata kelola sampah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan permasalahan yang akan dikaji dari tema tata kelola sampah perkotaan, selanjutnya akan diuraikan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngaliyan.
2. Menganalisis implementasi kebijakan tersebut dan mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam tata kelola sampah perkotaan di Kecamatan Ngaliyan.
3. Mengetahui dampak dari implementasi kebijakan tata kelola sampah perkotaan yang dilakukan di Kecamatan Ngaliyan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan ilmiah dan menambah wawasan terkait implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah perkotaan, dengan menggunakan kerangka Teori Implementasi Kebijakan.
- b. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai peran para aktor di balik pemerintahan kecamatan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah perkotaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penerapan tata kelola sampah di kawasan perkotaan.
- b. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi bagi peneliti dan penulis lain yang ingin mengkaji tema serupa dengan pendekatan yang lebih mendalam dan menyeluruh.

E. Tinjauan Pustaka

Banyak penelitian yang sudah mengkaji tentang politik sampah perkotaan ini. Oleh karenanya untuk mengetahui posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada maka peneliti akan membaginya menjadi dua tema yakni (1) Aktor-Aktor Dalam Tata Kelola Sampah dan (2) Tata Kelola Sampah Perkotaan.

1. Aktor-Aktor Dalam Tata Kelola Sampah

Penelitian terkait aktor-aktor dalam tata kelola sampah yang dilakukan oleh (Manurung, 2013), (Napitupulu & Muhyidin, 2021) dan (Syahputra, 2021) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Manurung dalam penelitiannya ini menyoroti bahwa masyarakat memiliki peran vital dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan iuran bulanan hingga partisipasi dalam kegiatan pengelolaan di tingkat rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa jika orang lebih menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang baik, mereka dapat melakukan hal-hal besar

untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Artikel ini mencatat bahwa keterlibatan swasta, meskipun dalam skala kecil, merupakan langkah awal yang penting. Misalnya, inisiatif individu untuk mendirikan bank sampah mencerminkan potensi sektor swasta dalam berkontribusi terhadap solusi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya investasi dan komitmen dari pihak swasta, serta kendala dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif. Ini menjadi pengingat bahwa untuk mencapai tata kelola yang efektif, perlu ada strategi yang lebih baik dalam memberdayakan masyarakat dan menarik minat swasta.

Sementara, menurut Napitulu dan Muhyidin dalam penelitiannya membahas tantangan partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah kota berkelanjutan. Artikel ini menekankan bahwa pengelolaan sampah kota tidak dapat berhasil tanpa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam penelitian ini untuk menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif merupakan esensial untuk menciptakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan semua pihak dapat mengurangi beban pemerintah dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan perilaku pemangku kepentingan, terutama masyarakat, diperlukan dalam proses pengelolaan sampah. Ia mengaitkan temuan ini dengan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Menyoroti bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah merupakan langkah krusial dalam mengurangi volume sampah dan dampaknya.

Selain itu, Syahputra menyoroti betapa pentingnya bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan program pengelolaan sampah, terutama melalui Bank Sampah. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam pengelolaan lingkungan yang menekankan pada keterlibatan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama.

Penelitian diatas tentunya menjadi warna dalam politik persampahan yang ada selama ini. Pengelolaan sampah perkotaan selama ini berfokus pada urgensi dari beberapa daerah yang diteliti oleh para peneliti. Berdasarkan beberapa studi diatas tidak terdapat strategi khusus dalam pengelolaan sampah. Maka hal tersebut menjadi salah satu faktor menarik dari politik persampahan yang masih layak untuk dipelajari lebih dalam.

2. Tata Kelola Sampah Perkotaan

Penelitian tentang tata kelola sampah yang dilakukan oleh Fasdani (2018), Marlina (2020) dan Nov Pratama (2018) dengan metode penelitian kualitatif. Fasdani dalam penelitiannya yang berjudul “Politik Lingkungan: Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan” mengatakan bahwa strategi pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dianggap tidak efektif dan lemah, seperti swastanisasi pengangkutan sampah. Akibatnya, program ini menjadi sumber timbunan sampah. Swastanisasi pengangkutan sampah juga membuat pemerintah, terutama Kecamatan dan Kelurahan, tidak lagi mengawasi serta menilai pengelolaan sampah di daerah mereka. Faktor utama yang mempengaruhi pendekatan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah kekurangan sumber daya anggaran untuk memodernisasi sistem pengelolaan sampah. Fasdani menilai bahwa kerja sama yang dilakukan memiliki dampak negative dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina mengenai tata kelola sampah menyebutkan bahwa pengelolaan sampah sebaiknya dimulai dari tingkat rumah tangga dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dinilai sebagai salah satu solusi yang efektif, karena setiap rumah tangga dapat berperan aktif dalam mengatasi permasalahan sampah sejak tahap awal. Pemberdayaan ini berkaitan dengan aspek moralitas, etika, kesadaran budaya, motivasi, dan visi lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan kelembagaan dan teknis sangat diperlukan. Masyarakat dapat didorong melalui berbagai kebijakan yang diterapkan di tingkat desa. Di tingkat kabupaten, kebijakan tersebut perlu diatur secara jelas dalam bentuk

peraturan daerah (perda) serta peraturan bupati atau walikota yang lebih terperinci. Kebijakan ini juga harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Selain itu, peraturan desa (perdes) harus mencakup alokasi sumber daya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.

Sementara itu, Nov Pratama dalam penelitiannya tentang tata kelola kota dengan program bank sampah yang digunakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Ia menganalisis bahwa program tersebut belum terlaksana dengan efektif dan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya sampah yang dibuang di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan kurangnya minat masyarakat dalam program bank sampah. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program bank sampah untuk tata kelola sampah di Kota Pekanbaru termasuk kurangnya sosialisasi tentang program, kurangnya anggaran untuk mendukung program, kurangnya pelatihan teknis terkait program, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan kurangnya partisipasi dalam tujuan program.

Dalam beberapa penelitian diatas mengenai program tata kelola kota tentunya dibutuhkan korelasi antar pihak agar program yang dijalani dapat berjalan dengan semestinya. Penelitian ini tentunya amat menarik untuk ditelusuri lebih dalam untuk meninjau program mana yang paling efektif dan efisien. Tata kelola kota juga penting untuk para pemerintahan kota maupun daerah untuk bisa lebih mengelola kota dengan lebih baik.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masalah yang akan diteliti, berikut penjelasannya:

a. Pengertian Sampah

Sampah dapat diartikan sebagai benda yang sudah tidak memiliki nilai guna, tidak lagi diperlukan, atau dianggap tidak diinginkan sehingga perlu dibuang. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang baik dan efisien sangat penting untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan ini meliputi langkah-langkah seperti pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah, sehingga risiko pencemaran, penyebaran penyakit, serta kerusakan ekosistem dapat ditekan seminimal mungkin (Azrul, 1990). Menurut Kodoatie (2003) sampah didefinisikan sebagai limbah atau sisa buangan berbentuk padat atau setengah padat yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan maupun dari siklus kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Dalam perspektif ilmu kesehatan lingkungan, sampah (*refuse*) merujuk pada sebagian material atau benda yang dianggap tidak bermanfaat, tidak dapat digunakan, tidak diinginkan, atau harus dibuang. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sampah dengan baik agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan yang efektif dapat membantu mencegah pencemaran dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan.

Menurut Hadiwiyoto (1983), sampah dapat didefinisikan sebagai sisa-sisa bahan yang telah melalui berbagai peroses, seperti pengambilan bagian utamanya, penglahan, atau yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi. Dari sudut pandang ekonomi, sampah dianggap sebagai barang yang tidak bernilai, sementara dalam kontek lingkungan, keberadaannya dapat menimbulkan masalah kesehatan dan mengancam ekosistem. Maka dari hal tersebut, pengelolaan yang baik dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut.

Sampah dapat dipahami sebagai sisa-sisa bahan, limbah, atau buangan padat maupun setengah padat yang dihasilkan dari berbagai aktivitas atau proses kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan.

Pengertian ini merujuk pada berbagai definisi sampah yang telah dijelaskan sebelumnya.

b. Jenis Sampah

Berdasarkan sifat-sifatnya, jenis sampah menurut Sucipto (2012) dapat dibagi menjadi dua yaitu sampah organik dan anorganik.

1) Sampah Organik

Sampah organik berasal dari aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan. Sampah ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sampah organik basah yang memiliki kandungan air tinggi, dan sampah organik kering dengan kandungan air rendah. Contoh sampah organik basah antara lain kulit buah dan sisa sayuran, sedangkan sampah organik kering meliputi bahan seperti kertas, kayu, ranting pohon, dan daun kering.

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah jenis sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan sulit terurai secara alami karena terbuat dari bahan yang tidak mudah hancur. Contoh sampah anorganik antara lain kaleng, plastik, besi, logam, serta gelas dan mika, yang semuanya tidak mengandung senyawa organik. Selain itu, sampah ini tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk mengurangi dampak buruknya terhadap lingkungan.

c. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah serangkaian upaya yang melibatkan pengaturan dan penanganan sampah, dimulai dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan, hingga tahap pengolahan dan pembuangan akhir. Tujuan dari proses ini adalah memastikan sampah dikelola secara efisien dan efektif, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Pengelolaan sampah yang baik juga mencakup penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti mendaur ulang dan mengurangi volume sampah (Karya, 1993). Pengelolaan sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengelolaan

individu yang dilakukan secara mandiri dan pengelolaan terpusat yang ditujukan untuk lingkungan atau wilayah perkotaan. Pengelolaan sampah meliputi semua langkah yang diambil untuk menangani sampah sejak awal terbentuk hingga tahap pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah mencakup pengendalian jumlah sampah yang dihasilkan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. (Kartikawan, 2009).

Secara umum, pengelolaan sampah perkotaan terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Menurut Aboejoewono (1985), tahapan-tahapan ini menggambarkan proses pengelolaan sampah secara sederhana. Pengumpulan sampah merujuk pada proses pemindahan sampah dari tempat asalnya ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahap selanjutnya. Dalam proses ini, berbagai alat bantu digunakan, seperti tong sampah, bak sampah, kontainer, gerobak dorong, serta tempat pembuangan sementara (TPS). Kegiatan pengumpulan umumnya dilakukan oleh petugas yang mengumpulkan sampah pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Proses pengangkutan sampah dilakukan dengan memanfaatkan alat transportasi khusus untuk memindahkan sampah dari tempat pembuangan sementara menuju lokasi pembuangan akhir atau tempat pengolahan. Pada tahap ini, tenaga kerja juga berperan dalam mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Di tahap pembuangan akhir atau pengolahan, sampah diproses menggunakan metode fisik, kimia, dan biologis hingga seluruh tahapan penanganan selesai. Pengelolaan sampah di area perkotaan saat ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup rumit, termasuk meningkatnya volume sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan masalah yang muncul dalam proses pembuangan akhir sampah, yang sering kali menimbulkan isu tambahan.

2. Kerangka Teori

a. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan. Grindle mengidentifikasi dua variabel utama: isi kebijakan dan konteks implementasi. Kedua variabel ini saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Variabel isi kebijakan merujuk pada karakteristik internal dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Grindle mencatat beberapa dimensi penting yang relevan untuk analisis implementasi. Pertama, kepentingan yang terpengaruh menunjukkan seberapa jauh kebijakan memengaruhi berbagai kelompok, baik positif maupun negatif. Kebijakan yang menguntungkan banyak pihak cenderung lebih mudah diimplementasikan.

Selanjutnya, jenis manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan juga berperan penting. Manfaat bisa bersifat material, seperti insentif ekonomi, atau non-material, seperti lingkungan yang bersih. Manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat akan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan juga menjadi faktor kunci. Kebijakan yang mengharuskan perubahan perilaku besar akan lebih sulit diimplementasikan dibandingkan yang memerlukan penyesuaian kecil.

Lokasi pengambilan keputusan, baik yang terpusat maupun terdesentralisasi, juga memengaruhi implementasi. Desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal, tetapi memerlukan kapasitas yang adekuat di tingkat bawah.

Ketersediaan sumber daya, baik finansial, manusia, maupun teknis, juga memengaruhi implementasi kebijakan. Keterbatasan anggaran atau

kurangnya personel dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kebijakan.

Variabel konteks implementasi mengacu pada lingkungan eksternal tempat kebijakan diterapkan. Faktor-faktor seperti kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor dapat memengaruhi proses implementasi. Konflik kepentingan atau kurangnya koordinasi antaraktor dapat menghambat keberhasilan.

Karakteristik rezim dan institusi juga berperan dalam implementasi, termasuk struktur pemerintahan dan kapasitas birokrasi. Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam birokrasi dapat mendukung atau menghambat kebijakan.

Grindle berpendapat bahwa keberhasilan implementasi merupakan hasil interaksi dinamis antara isi kebijakan dan konteks implementasi. Kebijakan yang dirancang dengan baik mungkin gagal jika konteksnya tidak mendukung, dan sebaliknya. Dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis relevansi isi kebijakan serta pengaruh konteks dalam pelaksanaan kebijakan sampah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan. Melalui metode ini, kita dapat memahami dengan jelas bagaimana data diperoleh dan dianalisis. Dengan kata lain, metode penelitian memungkinkan kita untuk menelusuri jejak data dari sumbernya hingga menjadi informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan secara mendalam fenomena tata kelola sampah di Kecamatan Ngaliyan, serta untuk memahami perspektif dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut. Menurut Sugiyono (2010), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk

memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai suatu fenomena sosial dengan mengumpulkan data yang bersifat naratif.

Jenis penelitian ini berfokus pada deskripsi situasi nyata di lapangan, di mana peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen yang relevan. Data akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik pengelolaan sampah yang berlangsung, sedangkan dokumen yang dikumpulkan mencakup kebijakan, laporan, dan materi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara induktif, dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Proses analisis mengikuti langkah-langkah yang diusulkan oleh Sugiyono (2010), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi kebijakan dalam tata kelola sampah, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan praktik pengelolaan sampah yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tata kelola lingkungan, khususnya dalam konteks kolaborasi antar pemangku kepentingan.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu objek penelitian. Sementara itu, data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari pihak ketiga untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari objek utama

penelitian, yaitu Kecamatan Ngaliyan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber literatur, termasuk artikel, buku, jurnal penelitian sebelumnya, serta media cetak dan elektronik yang relevan dengan tema pengelolaan sampah perkotaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah krusial dalam setiap penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data tambahan yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono, metode yang tepat untuk mengumpulkan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Berikut adalah metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan data. Proses ini bisa dianggap sebagai dasar penelitian untuk mendapatkan fakta dan informasi dari objek yang diteliti. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat perilaku subjek, objek, atau gejala yang diamati (Sugiyono, 2010). Disini peneliti mengamati bagaimana implementasi kebijakan tata kelola sampah perkotaan yang ada di Kecamatan Ngaliyan.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dari narasumber kepada pewawancara, menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara mendalam atau deep interview. Studi ini melibatkan beberapa sumber, termasuk staff bagian pembangunan Kecamatan, Kasi pembangunan Kelurahan Ngaliyan, staff bidang 2 dan 4 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dan anggota masyarakat di wilayah Kecamatan Ngaliyan.

c. Dokumentasi

Data penelitian yang dikumpulkan melalui dokumentasi dapat berupa catatan tertulis, gambar, buku, atau video yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil dokumentasi ini digunakan sebagai data tambahan untuk penelitian. Dokumen seperti peraturan yang mengatur tentang tata kelola sampah perkotaan juga dapat termasuk gambar atau video yang diambil dari observasi di lokasi. (Creswell, 2014).

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara akan menjadi lebih relevan dan berguna setelah melalui proses interpretasi dan analisis. Analisis data merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam penelitian, di mana kegiatan ini meliputi pengorganisasian, pengelompokan, serta penelaahan hubungan antara data yang ada dengan teori yang digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian.

Menurut Sugiyono (2010), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada metode yang diajukan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan, tahap pertama yang dilakukan adalah reduksi data, yaitu dengan memilih dan merangkum data yang relevan atau berkaitan langsung dengan topik penelitian. Setelah data tersebut disusun, langkah berikutnya adalah penyajian data. Peneliti akan lebih mudah memahami langkah ini. Mereka juga dapat menganalisis hasil penelitian dari sajian data ini untuk merencanakan langkah analisis berikutnya. Setelah selesai dengan proses reduksi data

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian beserta rumusan masalah yang menjadi fokus utama. Selain itu, tujuan dan manfaat dari penelitian ini juga akan diuraikan. Bab ini juga mencakup penjelasan mengenai metode dan pendekatan yang

digunakan dalam penelitian, serta definisi dan konsep teori yang akan dijadikan sebagai dasar analisis. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kerangka kerja penelitian yang dilakukan.

BAB II TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Pada bab ini, akan dijelaskan berbagai teori yang telah disajikan dalam proposal sebelumnya. Penjelasan tersebut akan lebih mendalam, dengan menguraikan bagaimana teori-teori tersebut digunakan dan diterapkan dalam analisis data yang diperoleh dari penelitian. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan teori dalam konteks penelitian yang dilakukan.

BAB III LANDSCAPE KECAMATAN NGALIYAN

Pada bab ini menggambarkan secara umum tentang kondisi obyek penelitian, meliputi kondisi geografis kecamatan dan strategi tata kelola sampah di kecamatan Ngaliyan.

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN

Pada bab ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan.

BAB V ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN

Dalam bab ini menganalisis implementasi Perda tersebut sesuai aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan.

BAB VI DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN

Pada bab ini membahas terkait dampak dari implementasi Perda yang diterapkan di Kecamatan Ngaliyan.

BAB VII PENUTUP

Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari bab sebelumnya.

BAB II

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, di mana keputusan-keputusan yang telah dirumuskan diubah menjadi tindakan nyata. Grindle (1980) mendefinisikan implementasi sebagai "proses di mana kebijakan-kebijakan diubah menjadi program-program tindakan dan hasil-hasil yang nyata." Ini bukan sekadar proses administratif yang mekanis, melainkan arena kompleks yang melibatkan interaksi berbagai aktor, kepentingan, dan sumber daya. Keberhasilan suatu kebijakan seringkali tidak ditentukan pada tahap perumusan, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Proses ini melibatkan alokasi sumber daya, pembentukan atau penyesuaian struktur organisasi, serta pengembangan prosedur dan aturan operasional. Grindle menekankan bahwa implementasi adalah jembatan antara niat kebijakan (*policy intentions*) dan hasil kebijakan (*policy outcomes*), dan seringkali jembatan ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian.

B. Teori Implementasi Kebijakan Grindle

Merilee S. Grindle (1980), dalam karyanya "Politics and Policy Implementation in the Third World," menawarkan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan, khususnya di negara-negara berkembang. Grindle berargumen bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tidak dapat dijelaskan hanya dari satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi dinamis antara dua

variabel utama: Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*). Pendekatan ini dikenal sebagai model "top-down" yang mempertimbangkan faktor-faktor dari kebijakan itu sendiri dan lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan.

Grindle menekankan bahwa implementasi adalah proses politik yang melibatkan negosiasi, konflik, dan adaptasi. Oleh karena itu, analisis implementasi harus melampaui aspek teknis-administratif dan mempertimbangkan dimensi politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhinya. Berikut ini merupakan variabel yang ada pada teori ini:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Isi kebijakan mengacu pada karakteristik internal dari kebijakan itu sendiri yang dapat memengaruhi proses implementasinya. Grindle mengidentifikasi lima dimensi utama dari isi kebijakan:

- Kepentingan yang Terpengaruh (*Interests Affected*) dimensi ini merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi kepentingan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Kebijakan yang menguntungkan kelompok kuat atau yang merugikan kelompok yang memiliki kapasitas untuk menolak, akan menghadapi tantangan implementasi yang berbeda.
- Jenis Manfaat yang Dihasilkan (*Type of Benefits*) dimensi ini berkaitan dengan sifat manfaat yang diharapkan dari kebijakan. Apakah manfaat tersebut bersifat material (misalnya, insentif finansial, barang, atau layanan) atau non-material (misalnya, peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan, atau keadilan sosial). Manfaat yang bersifat langsung, nyata, dan material cenderung lebih mudah memobilisasi dukungan dibandingkan manfaat yang abstrak atau jangka panjang.
- Perubahan yang Diinginkan (*Extent of Change Envisioned*) dimensi ini mengukur seberapa besar perubahan yang diharapkan atau dituntut oleh kebijakan dari status quo. Kebijakan yang menuntut perubahan radikal dalam perilaku, struktur, atau alokasi sumber daya akan lebih sulit

diimplementasikan dibandingkan kebijakan yang hanya memerlukan penyesuaian inkremental.

- Lokasi Pengambilan Keputusan (*Location of Decision-Making*) dimensi ini merujuk pada tingkat sentralisasi atau desentralisasi dalam pengambilan keputusan terkait implementasi kebijakan. Apakah keputusan utama berada di tingkat pusat/kota, atau diberikan otonomi lebih kepada unit-unit di tingkat bawah (kecamatan, kelurahan, RT/RW). Desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga memerlukan kapasitas yang memadai di tingkat lokal.
- Sumber Daya yang Dialokasikan (*Resources Committed*) dimensi ini berkaitan dengan ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang dialokasikan untuk implementasi kebijakan, termasuk sumber daya finansial (anggaran), manusia (personel, keahlian), dan teknis (infrastruktur, peralatan). Keterbatasan sumber daya seringkali menjadi hambatan utama dalam implementasi.

2. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Konteks implementasi mengacu pada lingkungan eksternal di mana kebijakan tersebut dijalankan. Faktor-faktor ini berada di luar kendali langsung pembuat kebijakan, tetapi sangat memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dilaksanakan. Grindle mengidentifikasi empat dimensi utama dari konteks implementasi:

- Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat (*Power, Interests, and Strategies of Actors Involved*) dimensi ini menganalisis peran, pengaruh, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi. Aktor-aktor ini bisa berupa birokrat, kelompok kepentingan, masyarakat sipil, atau sektor swasta. Implementasi adalah arena politik di mana aktor-aktor ini berinteraksi, bernegosiasi, dan terkadang berkonflik untuk memengaruhi hasil kebijakan.
- Karakteristik Rezim dan Institusi (*Characteristics of the Regime and Institutions*) dimensi ini berkaitan dengan sifat sistem politik (rezim)

dan struktur institusional di mana kebijakan diimplementasikan. Ini mencakup tingkat stabilitas politik, kapasitas birokrasi, tingkat korupsi, dan norma-norma institusional yang berlaku. Institusi yang kuat dan stabil dengan birokrasi yang kompeten cenderung mendukung implementasi yang lebih efektif.

- Kepatuhan dan Responsivitas (*Compliance and Responsiveness*) dimensi ini mengukur sejauh mana target kelompok (misalnya, masyarakat) mematuhi kebijakan yang diimplementasikan, dan bagaimana implementor merespons umpan balik, keluhan, atau kebutuhan dari target kelompok. Tingkat kepatuhan masyarakat dan responsivitas pemerintah sangat penting untuk keberlanjutan implementasi.
- Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik (*Economic, Social, and Political Environment*) dimensi ini mencakup faktor-faktor makro yang memengaruhi implementasi, seperti kondisi ekonomi (tingkat pendapatan, pengangguran), struktur sosial (demografi, budaya, tingkat pendidikan), dan dinamika politik (dukungan politik, konflik). Faktor-faktor ini dapat menciptakan peluang atau hambatan bagi implementasi kebijakan.

C. Interaksi Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi

Grindle menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukanlah hasil dari salah satu variabel secara terpisah, melainkan dari interaksi kompleks antara isi kebijakan dan konteks implementasi. Dalam konteks ini, isi kebijakan mencakup berbagai elemen yang menjadi dasar peraturan, sedangkan konteks implementasi mencakup lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan. Kedua aspek ini saling berpengaruh dan menentukan efektivitas suatu kebijakan.

Kebijakan yang dirancang dengan baik, dengan isi yang jelas dan manfaat yang menarik, memiliki potensi untuk sukses. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan. Misalnya, jika sebuah kebijakan memiliki sumber daya yang memadai tetapi

tidak didukung oleh dukungan politik atau ada resistensi dari masyarakat, maka kebijakan tersebut bisa gagal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana isi kebijakan dan konteks implementasi saling berinteraksi.

Sebaliknya, kebijakan yang mungkin kurang sempurna dalam desainnya dapat sukses jika konteks implementasinya mendukung. Misalnya, jika masyarakat sangat mendukung suatu inisiatif meskipun kebijakan tersebut tidak ideal, hal ini dapat membantu mengatasi kelemahan dalam isi kebijakan. Oleh karena itu, tantangan dalam implementasi kebijakan sering kali lebih kompleks daripada yang terlihat, dan memerlukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang terlibat.

Dalam penelitian ini, Teori Implementasi Kebijakan Grindle akan menjadi lensa utama untuk menganalisis tata kelola sampah di Kecamatan Ngaliyan. Peneliti akan menggunakan PERDA No. 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar dalam menganalisis implementasi kebijakan ini. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana karakteristik kebijakan yang berlaku memengaruhi proses implementasinya.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi lingkungan implementasi di Kecamatan Ngaliyan. Ini mencakup peran berbagai aktor yang terlibat, struktur institusional yang ada, serta kondisi sosial-ekonomi yang membentuk dinamika implementasi kebijakan sampah. Dengan menganalisis elemen-elemen ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasi dalam pengelolaan sampah. Dengan menggunakan kerangka Grindle, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu implementasi kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan efektif, sehingga pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan dapat ditingkatkan.

BAB III

LANDSCAPE KECAMATAN NGALIYAN

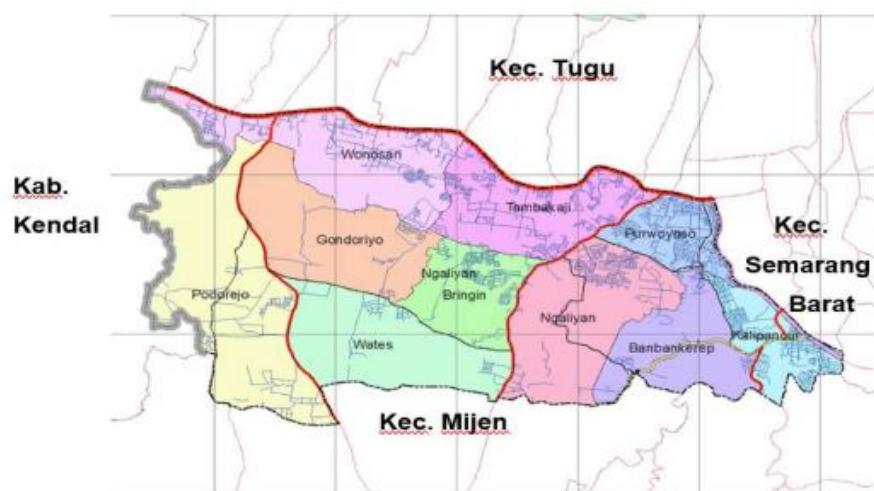
A. Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan dan Sampah Ngaliyan

1. Kondisi Geografis

Salah satu dari 16 kecamatan di Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah sebesar 42,99 km² dengan wilayah terluas pada Kelurahan Podorejo sebesar 8,14 km², dan Kelurahan Purwoyoso sebagai wilayah terkecil dengan 2,07 km². Kecamatan Ngaliyan terletak di daerah pinggiran sebelah barat Kota Semarang, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tugu Kota Semarang
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Mijen Kota Semarang
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Peta Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat pada hambar dibawah ini:



Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kecamatan Ngaliyan

Sumber: Monografi Kecamatan Ngaliyan

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, jumlah penduduk Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 143.602 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 3.340,54 jiwa per km². Wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah Kelurahan Kalipancur dengan 9.640 jiwa per km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah adalah Kelurahan Podorejo dengan 1.233,22 jiwa per km². Adapun rasio jenis kelamin pada Kecamatan Ngaliyan adalah 99,17, artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Tabel 3. 1 Tabel Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan, 2023.

Kelurahan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah total
Podorejo	4.997	5.047	10.044
Wates	2.976	3.055	6.031
Bringin	9.041	9.18	18.179
Ngaliyan	6.533	6.668	13.201
Bambankerep	3.180	3.139	6.319
Kalipancur	10.410	10.540	20.950
Purwoyoso	7.755	7.800	15.555
Tambak Aji	10.544	10.587	21.131
Gondoriyo	4.006	4.095	8.101
Wonosari	12.059	12.032	24.091
Ngaliyan	71.501	72.101	143.602

Sumber: Pemerintahan Kota Semarang

Tabel 3. 2 Tabel Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan 2023

Kelurahan	Kepala Keluarga
Podorejo	3.323
Wates	1.971
Bringin	5.660
Ngaliyan	4.505
Bambankerep	2.031
Kalipancur	6.885
Purwoyoso	5.353
Tambakaji	7.033
Gondoriyo	2.477
Wonosari	7.950
Ngaliyan	47.188

Sumber: Pemerintah Kota Semarang

3. Kondisi Pemerintahan Kecamatan Ngaliyan

Kecamatan Ngaliyan memiliki 10 wilayah administrasi kelurahan yang terbagi menjadi 130 RW dan 922 RT. Kelurahan dengan jumlah RT terbanyak berada di kelurahan Bringin yang terbagi menjadi 149 RT, sedangkan kelurahan dengan jumlah RT paling sedikit berada di kelurahan Babankerep yang terbagi menjadi 34 RT.

Pada periode akhir tahun 2023, Pegawai Negeri Sipil di Bawah Pemerintah Daerah Kecamatan Ngaliyan, baik yang bekerja di lingkungan kantor kecamatan maupun kantor kelurahan, ada sebanyak 85 pegawai, yang terdiri dari 44 pegawai laki-laki dan 41 pegawai perempuan. Jika dilihat menurut Golongan, jumlah pegawai negeri sipil pemerintah daerah Kecamatan Ngaliyan didominasi pada golongan III (56 pegawai).

Tabel 3. 3 Tabel Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Ngaliyan

Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
Podorejo	12	61
Wates	8	48
Bringin	22	149
Ngaliyan	12	90
Banbankerep	5	34
Kalipancur	13	126
Purwoyoso	14	95
Tambakaji	16	122
Gondoriyo	12	66
Wonosari	16	131
Ngaliyan	130	922

Sumber: Pemerintah Kota Semarang

4. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Kecamatan Ngaliyan memiliki fasilitas pendidikan dasar yang cukup lengkap. Pendidikan tersebar di semua kelurahan di Kecamatan Ngaliyan. Dari 10 kelurahan pada tahun 2023, 9 kelurahan memiliki SD, 8 kelurahan memiliki MI, 6 kelurahan memiliki SMP, 4 kelurahan memiliki MT, 2 kelurahan memiliki SMA, 3 kelurahan memiliki SMK, 3 kelurahan memiliki MA, dan 2 kelurahan memiliki Akademi/Perguruan Tinggi.

Sumber daya kesehatan sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dan data kesehatan membantu menentukan kebutuhan akan layanan kesehatan. Dari 10 kelurahan, dua di antaranya memiliki rumah sakit, tidak ada yang memiliki rumah sakit bersalin, 7 di antaranya memiliki poliklinik atau balai pengobatan, 1 di antaranya memiliki puskesmas rawat inap, 2 di antaranya memiliki puskesmas tanpa rawat inap, dan 8 di antaranya memiliki apotek.

Rumah adalah bangunan yang digunakan oleh keluarga untuk hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan melakukan hal-hal lainnya. Hasil pendataan potensi desa menunjukkan bahwa semua rumah di Kecamatan Ngaliyan telah menggunakan fasilitas penerangan jalan yang diberikan oleh PLN. Jalan utama di seluruh kelurahan juga telah menggunakan penerangan jalan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk kegiatan memasak keluarga, dapur harus ada di setiap rumah. Sebagian besar keluarga di Kecamatan Ngaliyan memasak menggunakan bahan bakar LPG 3 kg sebagai bahan bakar utama. Air yang digunakan untuk minum setiap hari adalah fasilitas perumahan tambahan. Sebagian besar keluarga menggunakan air isi ulang, dan sebagian besar keluarga menggunakan sumur bor atau pompa sebagai sumber air minum utama mereka.

5. Visi Misi Kecamatan Ngaliyan

Visi adalah gambaran yang jelas dan inspiratif tentang masa depan yang diinginkan, yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Dalam konteks individu atau organisasi, visi berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan semua usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang. Visi yang baik tidak hanya mencerminkan aspirasi, tetapi juga menciptakan motivasi dan semangat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memiliki visi yang kuat, seseorang atau suatu kelompok dapat lebih fokus dan berkomitmen dalam mencapai cita-cita yang diimpikan, meskipun menghadapi berbagai tantangan di sepanjang jalan.

Kecamatan Ngaliyan dalam plaksanaannya memiliki visi sebagai berikut:

**“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju,
Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif”**

Dalam menjalankan visi tersebut diperlukan sebuah misi guna mengoptimalkan tujuan dari sebuah visi. Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan tujuan utama dan alasan keberadaan suatu individu atau organisasi. Misi berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan sehari-hari dan

keputusan strategis, mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang dianut. Dalam konteks organisasi, misi memberikan arah yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya, serta menciptakan keselarasan di antara anggota tim. Dengan memiliki misi yang kuat, sebuah organisasi dapat menegaskan identitasnya, meningkatkan fokus pada kegiatan yang relevan, dan membangun komitmen untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan visi yang dijalankan. Berikut ini merupakan misi dari Kecamatan Ngaliyan:

- Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan social masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.
- Mewujudkan Kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
- Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak.
- Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya local, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital.
- Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan.
- Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang Tangguh berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir rob, serta dampaknya bagi masyarakat.
- Mewujudkan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas.

6. Sampah Kecamatan Ngaliyan

Kecamatan Ngaliyan menghasilkan 270,98 m³ sampah, atau 38,2% dari total sampah Kota Semarang. Per orang pada Kecamatan Ngaliyan menghasilkan sekitar 70 kg sampah pertahunnya. Hal tersebut terjadi seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat.

Sistem pengelolaan sampah di Ngaliyan masih bergantung pada metode konvensional, di mana sampah dikumpulkan dan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. Namun, kapasitas TPA ini sering kali melebihi batas, sehingga menyebabkan masalah pencemaran dan bau tidak sedap yang mengganggu warga sekitar. Berita terbaru dari Semarang Post menyebutkan bahwa TPA Jatibarang sudah tidak mampu menampung volume sampah yang terus meningkat, sehingga diperlukan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini (Semarang Post, 2023).

Kekurangan infrastruktur yang signifikan dalam pengelolaan sampahnya, yang termanifestasi dalam beberapa aspek krusial. Keterbatasan kapasitas dan kondisi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), termasuk TPS3R, menjadi kendala utama, sering kali menyebabkan penumpukan sampah melebihi daya tampung. Selain itu, kurangnya fasilitas pemilahan sampah yang memadai di tingkat masyarakat maupun di TPS menghambat proses daur ulang dan yang lebih efektif. Minimnya jumlah kontainer sampah yang terdistribusi secara merata di seluruh wilayah kecamatan juga menyulitkan masyarakat dalam membuang sampah dengan benar. Lebih lanjut, infrastruktur pengolahan sampah yang lebih canggih dan terintegrasi, seperti fasilitas pengomposan skala besar atau unit pengolahan sampah menjadi energi, masih sangat terbatas atau belum tersedia di tingkat kecamatan, sehingga sebagian besar sampah akhirnya bergantung pada pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin penuh.

Urgensi efektivitas pengelolaan sampah semakin mendesak. Dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk

menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dan regulasi yang diperlukan, sementara masyarakat berperan aktif dalam pemilahan dan pengurangan sampah di tingkat rumah tangga.

Di sisi lain, ada baiknya sektor swasta dapat berkontribusi melalui inovasi teknologi dan praktik daur ulang yang efisien bukan hanya dalam pengangkutan. Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Ngaliyan.

7. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang efektif. Dalam peraturan ini, diatur berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan hingga pemrosesan akhir. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Salah satu pokok bahasan dalam Perda ini adalah pengelompokan sampah menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan anorganik. Masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, sehingga memudahkan proses pengelolaan selanjutnya. Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi fokus utama dalam pengelolaan sampah, di mana masyarakat diajak untuk mengurangi jumlah sampah, menggunakan kembali barang-barang, dan mendaur ulang material yang masih dapat dimanfaatkan.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, pemerintah berperan aktif dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini mencakup tempat pembuangan sampah, bank sampah, dan fasilitas daur ulang. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara-cara

pengelolaan sampah yang benar, agar masyarakat lebih paham dan terlibat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Perda ini juga menetapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan pemilahan dan pengelolaan sampah. Sanksi tersebut dapat berupa denda atau tindakan administratif lainnya. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang baik.

Dalam pelaksanaannya, Perda ini membuka peluang bagi kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, serta masyarakat. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, dengan melibatkan berbagai aktor dalam proses tersebut. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan sektor swasta.

Akhirnya, Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2012 menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Semarang. Dengan pendekatan yang terencana dan melibatkan semua pihak, diharapkan lingkungan kota dapat terjaga kebersihannya, serta masalah sampah dapat diatasi secara berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Kota Semarang.

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN

A. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngaliyan

Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem perkotaan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan, volume sampah yang dihasilkan juga semakin besar. Jika tidak dikelola secara efektif dan partisipatif, sampah dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan, penyakit, serta ancaman bagi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dipandang sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik.

Di Kota Semarang, kerangka hukum untuk pengelolaan sampah telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini mengamanatkan berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, penanganan, hingga peran serta tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu wilayah urban dengan tingkat penduduk yang tinggi. Dengan tingkat penduduk yang tinggi tentu hal tersebut berpengaruh dengan kenaikan sampah yang tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan kenaikan jumlah timbulan sampah yang terjadi setiap tahunnya. Berikut jumlah timbulan sampah pertahun di Kota Semarang.



Gambar 4. 1 Jumlah Timbulan Sampah Tahunan

Sumber: SIPSN DLH

Jika dibagikan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Ngaliyan sebesar 142.845, rata- rata penduduk kecamatan Ngaliyan menghasilkan 3.017–3.040 kg sampah per tahun, atau sekitar 8,3–8,4 kg sampah per hari per orang. Jika tidak dikelola dengan baik tentunya, kenaikan ini akan terus menerus terjadi yang menimbulkan beberapa masalah baik lingkungan dan kesehatan.

Proses pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan melibatkan banyak aktor. Dimulai dari pemilahan dari rumah tangga, pengangkutan dari sampah rumah tangga ke TPS lalu ke TPA dan pemanfaatan bank sampah sebagai proses daur ulang. Hal tersebut menjadi tombak utama Kecamatan Ngaliyan dalam menghadapi peningkatan sampah yang semakin naik tiap tahunnya.

B. Tahapan Proses Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda No. 06 Tahun 2012

Proses pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan dapat dipahami sebagai tahapan implementasi dari Perda No. 06 Tahun 2012, yang bertujuan mengurangi volume sampah di tingkat urban. Dimulai dari tingkat sumber sampai sampah tersebut terurai atau terkelola dengan baik. Tracking sampah menjadi bagian yang harus diperhatikan agar terpantau pergi nyany kemana. Hasil yang ditemukan dari proses pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan meliputi:

1. Pemilihan Sampah di Tingkat Rumah Tangga (Amanat Perda Pasal 13)

Pemilihan sampah di tingkat rumah tangga merupakan langkah kritis yang diamanatkan dalam Perda No. 06 Tahun 2012, khususnya Pasal 13 yang mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemilihan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pemilihan sampah di rumah tangga bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Warga didorong untuk menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) sebelum membuang sampah ke tempat pembuangan.

Penerapan prinsip 3R di tingkat rumah tangga dapat secara signifikan mengurangi jumlah sampah yang harus dikelola di tingkat kota. Reduce atau pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai dan memilih produk dengan kemasan yang minimalis. Reuse atau penggunaan kembali barang-barang yang masih layak pakai dapat memperpanjang umur suatu barang dan mengurangi kebutuhan akan barang baru. Recycle atau daur ulang sampah melibatkan pengolahan sampah menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan kembali dalam proses produksi (Putranto, 2023).

Pemilihan sampah di rumah tangga idealnya dilakukan dengan memisahkan sampah organik (sisa makanan, daun-daunan) dari sampah anorganik (plastik, kertas, logam, kaca) dan sampah berbahaya (baterai, lampu bekas). Sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk pertanian atau perkebunan, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi produk baru yang bernilai ekonomi. Pemilihan sampah yang benar memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh anggota keluarga, serta dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk sosialisasi, edukasi, dan penyediaan fasilitas pemilihan sampah yang memadai (Widiarti, 2012).

Pemilihan ini sangat diperlukan pasalnya menurut data dari DLH komposisi sampah berdasarkan jumlah sampah paling banyak dihasilkan oleh sampah rumah tangga dengan 72.00 ton per tahunnya. Dengan sisa

makanan menjadi komposisi sampah paling banyak sebesar 60,80%. Hal tersebut menunjukan bahwa pemilahan sampah dari rumah tangga menjadi tombak utama pemilahan dari sumber sebelum dibuang ke tempat sampah yang ada di rumah tangga.

Dengan demikian, pemilahan sampah dari rumah tangga bukan hanya sekadar tindakan individual, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya kolektif untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keberhasilan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga akan berdampak positif pada efisiensi pengelolaan sampah di tingkat kota, mengurangi beban TPA, dan meningkatkan nilai ekonomi sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.

2. Pengangkutan Sampah (Amanat Perda Pasal 16)

Proses pengangkutan sampah di Kota Semarang merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah yang komprehensif, yang diatur dalam Perda No. 06 Tahun 2012, khususnya Pasal 16 yang mengatur tentang pengangkutan sampah. Proses ini dimulai dengan pengumpulan sampah dari rumah tangga dan tempat penampungan sementara (TPS/TPST). Sampah yang telah dikumpulkan kemudian diangkut menggunakan truk sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. Untuk mendukung proses ini, Kota Semarang memiliki armada truk sampah yang terdiri dari 110 unit keluaran tahun 2012-2017 serta 30 unit keluaran tahun 2018-2025, yang beroperasi secara rutin untuk memastikan pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, alur pengangkutan sampah di lokasi penelitian mengikuti pola sebagai berikut:

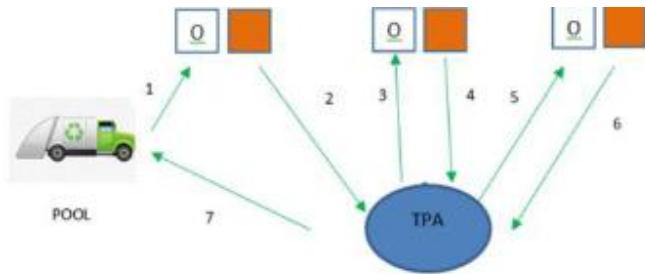
a. Tahap Pertama (Rumah Tangga ke TPS):

- Masyarakat membuang sampah yang telah dipilah ke dalam tong sampah terpisah (organik-anorganik) di depan rumah.
- LSM atau petugas lingkungan setempat melakukan pengumpulan menggunakan mobil pick up sampah.

- Sampah diangkut ke 10 TPS yang tersebar di 5 Kelurahan dengan frekuensi 2-3 kali seminggu.
- b. Tahap Kedua (TPS ke TPA):
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau operator swasta mengangkut sampah dari TPS menggunakan truk sampah.
 - Pengangkutan dilakukan dengan jadwal tetap setiap hari dengan frekuensi 2-3 kali perhari tergantung volume sampah.
 - Sampah dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk pemrosesan lebih lanjut

Pola pengangkutan sampah di Kecamatan Ngaliyan mengadopsi dua metode, yaitu HCS (*Hauled Container System*). Rute pengangkutan dimulai dari pool menuju TPS 1, kemudian ke TPA, dilanjutkan ke TPS 2, dan kembali ke TPA sebelum kembali ke pool. Kendaraan berangkat dari pool dengan membawa kontainer kosong ke lokasi TPS 1, di mana kontainer kosong akan ditukar dengan kontainer penuh yang ada di TPS dan langsung diangkut ke TPA. Setelah mengosongkan kontainer di TPA, kendaraan akan menuju TPS berikutnya untuk mengganti kontainer penuh dan kembali membuangnya ke TPA. Proses ini terus berlanjut hingga semua TPS dilayani, setelah itu kendaraan kembali ke pool dengan membawa kontainer kosong.

Pola kedua, yaitu SCS (*Stationary Container System*), diterapkan dengan rute pengangkutan dari pool menuju TPS, kemudian TPS, lalu TPA, dan kembali ke pool. Kendaraan berangkat dari pool untuk mengumpulkan sampah yang diletakkan di pinggir jalan, kemudian menuju TPS 1, di mana sampah tersebut dimasukkan ke dalam truk dump. Setelah itu, kendaraan bergerak ke TPS 2 dan seterusnya hingga truk dump penuh, lalu langsung membuangnya ke TPA. Proses ini dilanjutkan hingga semua TPS terlayani, sebelum kendaraan kembali ke pool dengan kontainer kosong.



Gambar 4. 2 Pola Pengangkutan HCS (*Hauled Container System*)



Gambar 4. 3 Pola Pengangkutan SCS (*Stationary Container System*)

Sumber: *Jurnal Teknik Lingkungan* (Arumdani et al., 2022)

Kecamatan Ngaliyan memiliki dua rute pengangkutan, yaitu rute atas melalui Jl. Mochamad Ihsan dan rute bawah melalui Jl. Siliwangi. Kedua rute ini bertemu di Jl. Untung Suropati. Rute atas memerlukan waktu lebih lama karena jalannya yang memutar, sementara rute bawah sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu, khususnya di Jl. Siliwangi dan Jl. Abdul Rahman Saleh. Rute atas dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah dari Kelurahan Ngaliyan dan Wates, sedangkan rute bawah dilalui oleh kendaraan dari Kelurahan Purwoyoso dan Tambak Aji. Kendaraan dari Kelurahan Wonosari menggunakan kedua rute tersebut. Total jarak pengangkutan untuk kendaraan arm roll mencapai 255,92 km per hari dengan kecepatan 20,35 km per jam, sedangkan untuk dump truck adalah 61,3 km per hari dengan kecepatan rata-rata 13,58 km per jam (Arumdani et al., 2022).



Gambar 4.4 Pola Pengangkutan Sampah Kecamatan Ngaliyan

3. Pemanfaatan Bank Sampah sebagai Pusat Daur Ulang (Amanat Perda Pasal 14)

Pemanfaatan bank sampah sebagai pusat daur ulang merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang secara eksplisit didorong oleh Perda No. 06 Tahun 2012, khususnya Pasal 14 yang mendorong pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, keberadaan bank sampah memiliki peran ganda yakni; Nilai Ekologis, mengurangi timbulan sampah yang berakhir di TPA dan Nilai Ekonomis, Menciptakan nilai tambah dari material sampah. Bank sampah juga menjadi salah satu upaya untuk mengelola sampah dan mampu menangani sekitar 0,34% dari total timbunan sampah nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Kota Semarang tercatat memiliki 664 bank sampah unit aktif dan satu Bank Sampah Induk (BSI) DLH Kota Semarang. Perbedaan kedua bank sampah tersebut hanya berdasarkan bentuk dan pengelolaannya saja. Jika

BSI sebagai pusat dari pengelolaan sampah ditingkat wilayah dengan memilah sampah yang sudah diolah oleh bank sampah unit. Sementara bank sampah unit hanya sebagai perwakilan di tingkat masyarakat dengan memilah sampah dengan cakupan rumah tangga.

Pengeloaan sampah pada bank sampah induk terbukti efektif dengan data pada tahun 2024 jumlah sampah sebanyak 131.80 ton/tahun yang masuk dengan sampah yang terkelola pada jumlah yang sama. Sementara untuk bank sampah unit ada Bina Lestari dengan jumlah sampah yang masuk 2,017,140.00 ton/tahun dengan jumlah sampah dikelola yang sama. Untuk Kecamatan Ngaliyan sendiri ada bank sampah Melati dengan sampah yang masuk dan terkelola sebanyak 349.56 ton/tahun. (DLH Kota Semarang)

Mekanisme operasional bank sampah dimulai dengan sosialisasi kepada warga mengenai pentingnya pemilahan sampah di sumbernya. Masyarakat diajari untuk memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengenali jenis-jenis sampah yang dapat didaur ulang. Setelah sosialisasi, warga diimbau untuk menyetor sampah yang telah dipilah ke bank sampah. Setiap jenis sampah anorganik, seperti plastik, kertas, dan logam, akan ditimbang dan dicatat. Proses ini tidak hanya memberikan informasi tentang jumlah sampah yang berhasil dipilah, tetapi juga memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Setiap penyetoran akan mendapatkan poin atau imbalan sesuai dengan berat dan jenis sampah yang disetorkan, yang dapat ditukar dengan uang tunai atau barang.



Gambar 4.5 Setoran Sampah ke Bank Sampah

Bank sampah kemudian melakukan pengolahan terhadap sampah yang diterima. Sampah yang sudah terkumpul akan dipilah lebih lanjut untuk memastikan kualitas dan jenisnya. Sampah yang layak untuk didaur ulang akan diberikan ke pengepul. Proses ini membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan mendukung konsep ekonomi sirkular.

Selain itu, bank sampah juga berperan sebagai pusat edukasi bagi masyarakat. Melalui pelatihan dan workshop, warga diberikan pemahaman tentang cara mengelola sampah dengan baik, manfaat daur ulang, dan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan demikian, bank sampah tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan sampah, tetapi juga sebagai pendorong kesadaran lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

C. Hambatan Implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 dalam Pengelolaan Sampah

Implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Terdapatnya hambatan baik dalam segi struktural (anggaran) dan juga kultural (kesadaran). Hambatan-hambatan ini dapat dianalisis secara mendalam melalui lensa Teori Implementasi Kebijakan Grindle, yang menekankan pentingnya interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasi. Berikut beberapa hambatan yang dihadapi:

1. Hambatan dari Isi Kebijakan (Perda No. 06 Tahun 2012)

Meskipun Perda No. 06 Tahun 2012 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan sampah di Kota Semarang, beberapa karakteristiknya sebagai isi kebijakan masih menimbulkan tantangan dalam implementasinya. Berikut ini merupakan beberapa hambatan yang dihadapi:

- Sumber Daya yang Dialokasikan: Perda mengamanatkan pengelolaan sampah yang komprehensif, namun alokasi anggaran yang minim menjadi kendala struktural. Menurut Peraturan Daerah

nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Pemerintah Kota Semarang, rata-rata pertahun dari penggunaan APBD dalam pengelolaan sampah hanya sebanyak Rp 83 Miliar, yang berarti hanya sekitar 1,5% dari APBD. Hal ini jauh di bawah ideal 8-10% yang dibutuhkan untuk sistem yang memadai (Kaza et al., 2018). Keterbatasan ini membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas memadai, insentif, dan SDM yang cukup untuk mendukung implementasi Perda secara menyeluruh.

- Perubahan yang Diinginkan: Perda menuntut perubahan perilaku yang signifikan dari masyarakat, yaitu pemilahan sampah dari sumbernya. Namun, tingkat kesulitan perubahan ini seringkali tidak diimbangi dengan strategi implementasi yang memadai, seperti edukasi berkelanjutan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses.

2. Hambatan dari Konteks Implementasi

Kondisi di lapangan pada Kecamatan Ngaliyan juga menunjukkan hambatan kultural dan struktural yang memengaruhi implementasi Perda. Dalam praktiknya hambatan ini masih menjadi faktor utama dalam proses implementasi yang dilakukan. Berikut ini merupakan hambatan yang mempengaruhi implementasi:

- Kepatuhan dan Responsivitas Target Kelompok (Masyarakat): Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi tantangan besar. Perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti membakar sampah atau tidak memilahnya, menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap amanat Perda. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan juga memperburuk masalah ini. Budaya konsumtif masyarakat perkotaan yang gemar produk sekali pakai semakin memperparah timbulan sampah.
- Karakteristik Rezim dan Institusi: Program bank sampah di Kecamatan Ngaliyan yang telah memiliki 80 unit, masih

menghadapi berbagai tantangan. Keberhasilan program ini terhambat oleh minimnya fasilitasi dan edukasi dalam pengadaan bank sampah, serta kurangnya promosi yang aktif untuk menarik minat masyarakat. Tanpa adanya insentif yang jelas, masyarakat cenderung kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, sehingga potensi program ini tidak dapat dimaksimalkan.

- Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor: Fragmentasi kolaborasi antar pemangku kepentingan masih menjadi isu. Meskipun kemitraan pemerintah-swasta sudah dimulai (misalnya dengan PT Narpati), cakupannya masih terbatas pada sektor pengangkutan tanpa integrasi menyeluruh dengan bank sampah atau pelaku daur ulang. Model kolaborasi yang ada lebih bersifat proyek temporer daripada sistem kelembagaan yang berkelanjutan. Ironisnya, para aktor kunci seperti pengepul yang menjadi tulang punggung daur ulang justru tidak memiliki insentif yang memadai.

Interaksi kedua hambatan ini menciptakan lingkaran yang tidak ada habisnya. Minimnya infrastruktur (struktural, terkait isi kebijakan) menyebabkan masyarakat kesulitan membuang sampah secara benar, yang kemudian memperkuat perilaku negatif (kultural, terkait konteks implementasi). Sebaliknya, resistensi masyarakat terhadap perubahan (kultural) membuat pembenahan sistem (struktural) menjadi tidak efektif. Contohnya terlihat ketika pemerintah menyediakan tong sampah terpilah, tetapi karena kurangnya edukasi (kultural) dan pengawasan (struktural), warga tetap mencampur semua jenis sampah, membuat investasi infrastruktur menjadi sia-sia. Solusi yang holistik harus menjawab kedua dimensi sekaligus. Di level struktural, diperlukan reformasi kebijakan pendanaan dan penguatan kelembagaan kolaborasi. Sementara di level kultural, pendekatan edukasi harus lebih partisipatif dan berkelanjutan, tidak sekadar sosialisasi temporer. Hanya dengan pendekatan terintegrasi yang menyentuh aspek struktural dan kultural

secara simultan, transformasi sistem pengelolaan sampah perkotaan dapat terwujud secara berkelanjutan, sesuai dengan tujuan Perda.



Gambar 4.6 Pencampuran sampah

BAB V

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN

A. Identifikasi Aktor Utama dalam Implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan

1. Pemerintah Kecamatan Ngaliyan

Pemerintah Kecamatan Ngaliyan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan tata kelola sampah di wilayahnya. Sebagai ujung tombak pemerintahan daerah tingkat mikro, camat dan jajarannya menjadi koordinator dalam penerjemahan kebijakan Kota Semarang ke dalam praktik lapangan.

Sebagai institusi publik, Pemerintah Kecamatan Ngaliyan memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, memfasilitasi, serta mengevaluasi program pengelolaan sampah yang sesuai dengan regulasi daerah seperti Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, serta partisipasi aktif masyarakat dan mitra kolaborator. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moezar Lazuardy Islamy, S.STP, selaku Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Ngaliyan ia menyampaikan bahwa:

“Dalam pengelolaan sampah, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh partisipasi masyarakat, serta sinergi dengan instansi lain seperti Kelurahan dan DLH.” (wawancara Moedzar 5 Mei 2025)

Kecamatan Ngaliyan saat ini diisi oleh sebanyak 37 orang aparatur sipil negara, yang dibagi menjadi enam bidang sesuai dengan kemampuan dan fungsinya masing-masing, yaitu: Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi

Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Kenyamanan dan Ketertiban Umum. Dalam konteks pengelolaan sampah, tanggung jawab utama dilimpahkan kepada Seksi Pembangunan.

“Kalo untuk program masalah sampah ya mas, kami ada penyuluhan tentang bank sampah, jadi mengedukasi masyarakatlah terkait pentingnya bank sampah. Terus ada program K3, itu untuk penyapuan jalan protokol. Kita lagi nyoba juga kembanging program kita yang baru baru ini kita rilis yaitu pilot project.”
(wawancara Moedzar 5 Mei 2025)

Pemerintah Kecamatan Ngaliyan menjalankan program penyuluhan dan pengimbauan kepada masyarakat untuk membentuk bank sampah di setiap kelurahan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Saat ini, tercatat ada 15 bank sampah yang tersebar di 10 kelurahan di wilayah Kecamatan Ngaliyan. Bank sampah ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah.

Keberadaan bank sampah di Kecamatan Ngaliyan diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, diharapkan dapat mengurangi beban TPA Jatibarang, yang direncanakan akan ditutup pada tahun 2027. Menurut penelitian oleh Kaza et al., (2018), pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, seperti bank sampah, terbukti efektif dalam mengurangi volume limbah yang masuk ke TPA sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu lingkungan.

Melalui program Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban (K3), program ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah di area publik, sekaligus meningkatkan estetika dan kenyamanan lingkungan. Penyapuan jalan

protokol tidak hanya menghilangkan sampah yang terlihat, tetapi juga mencegah penumpukan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran dan masalah kesehatan masyarakat. Dalam implementasinya, Kecamatan Ngaliyan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang untuk memastikan bahwa program K3 dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih luas. Kerjasama ini mencakup penyediaan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan, serta pelatihan bagi petugas kebersihan untuk meningkatkan efektivitas operasional. Penelitian oleh Scheinberg et al., (2016) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang responsif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kecamatan Ngaliyan telah meluncurkan sebuah pilot project, yaitu program pemilahan sampah dari rumah. Inisiatif ini sejalan dengan Surat Edaran Nomor B/576/600.4.15/III/2025 tentang Gerakan Pilah Sampah dari Rumah, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Program ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meningkatkan efisiensi proses daur ulang. Menurut penelitian oleh Kaza et al. (2018), pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dapat meningkatkan kualitas material yang didaur ulang dan mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh sampah yang tidak terkelola dengan baik.

Dalam implementasinya, program pemilahan sampah dari rumah di Kecamatan Ngaliyan melibatkan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Pemerintah kecamatan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dan cara yang tepat untuk melakukannya. Penelitian oleh Wilson & Velis, (2015) menunjukkan bahwa edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam program-program lingkungan. Melalui kampanye informasi dan pelatihan, warga

diajak untuk memahami perbedaan antara sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya, serta cara pembuangannya yang benar.

Pemerintah Kecamatan Ngaliyan juga menjembatani forum yang berisikan beberapa aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah seperti Kelurahan, bank sampah, dan masyarakat. Walaupun baru terjadi sekali, namun pemerintah Kecamatan berkomitmen untuk terus mengusahakan hal tersebut guna terciptanya kolaborasi yang efektif dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut tentunya menjadi sinyal positif untuk keberlanjutan pengelolaan sampah yang lebih baik.



Gambar 5. 1 Forum Pengelolaan Sampah yang Diadakan Kecamatan

Namun demikian, kendala struktural tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan implementasi tersebut. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran, yang menyebabkan Pemerintah Kecamatan tidak mampu memberikan fasilitasi kepada masyarakat atau bank sampah yang aktif dalam pengelolaan sampah.

Selain keterbatasan anggaran, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah juga menjadi tantangan serius. Masih banyak warga yang belum memahami pentingnya menjaga lingkungan dengan membuang dan memilah sampah secara benar. Hal tersebut tentunya menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Ngaliyan ini.

2. Kelurahan Ngaliyan

Kelurahan merupakan salah satu aktor penting dalam implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 karena menjadi titik temu antara kebijakan pemerintah daerah dan implementasi di tingkat masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah perkotaan, kelurahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal. Sebagai institusi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kelurahan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, serta aktor utama dalam mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Asih et al., 2022).

Pihak Kelurahan mengakui bahwa fokus pada pengelolaan sampah mulai ditekankan secara lebih serius setelah dilantiknya walikota baru yang memiliki komitmen kuat terhadap isu persampahan. Walaupun tidak ada program kerja spesifik terkait persampahan, namun pihak Kelurahan gencar mensosialisasikan tentang sampah kepada masyarakat. Monitoring terhadap beberapa bank sampah yang ada di kelurahan juga menjadi fokus dari Kelurahan.

"Kami mulai lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat, khususnya ke ibu-ibu PKK dan bank sampah di wilayah kami. (wawancara, Fitri 6 Mei 2025)

Salah satu bentuk aktivitas penting yang dilakukan oleh kelurahan adalah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah sejak dini. Kegiatan ini umumnya melibatkan ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) sebagai kelompok yang sangat potensial dalam menyebarluaskan informasi ke tingkat rumah tangga. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis tentang jenis-jenis sampah (organik, anorganik, B3, dll.), tetapi juga membentuk kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya pengurangan volume sampah melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle.



Gambar 5. 2 Sosialisasi dan Penyuluhan Pilah Sampah

Selain itu, kelurahan juga turut aktif dalam memonitoring operasional bank sampah di wilayahnya. Bank sampah merupakan salah satu model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah terbukti efektif meningkatkan nilai ekonomi sampah sekaligus mengurangi beban TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Dengan melakukan monitoring berkala, kelurahan dapat memastikan bahwa bank sampah beroperasi secara transparan, efektif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi (Suryani, 2014).



Gambar 5. 3 Monitoring Bank Sampah Melati

Dengan melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring bank sampah secara terpadu, kelurahan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat, khususnya Ibu-ibu PKK, serta dukungan dari

pemerintah kelurahan, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, kelurahan perlu terus meningkatkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan peran ini secara optimal (Wahyudin et al., 2017).

"Untuk hambatan mungkin ya masih kurangnya kesadaran masyarakat si mas terkait pilah pilih sampah. Kami seringkali harus meyakinkan warga bahwasannya sampah bisa bernilai ekonomi jika dikelola dengan benar. Untuk fasilitas selama ini kami hanya bisa membantu mengajukan fasilitas yang diminta oleh bank sampah, karena kami sendiri tidak memiliki anggaran khusus." (wawancara, Fitri 6 Mei 2025)

Dalam upaya pengelolaan sampah, kelurahan menghadapi beberapa hambatan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah. Meskipun program penyuluhan telah dilaksanakan, seringkali masyarakat masih belum sepenuhnya memahami bahwa sampah yang dikelola dengan baik dapat memiliki nilai ekonomi. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah dapat menghambat efektivitas program-program pengelolaan sampah, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kreatif dan partisipatif untuk mendorong perubahan perilaku.

Kelurahan juga menyadari bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan strategi komunikasi yang efektif. Misalnya, dengan menunjukkan contoh konkret tentang bagaimana sampah dapat diubah menjadi bahan yang bernilai, seperti kompos dari sampah organik atau produk daur ulang dari sampah anorganik. Dikarenakan memberikan informasi yang jelas dan demonstrasi praktis dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah.

Di sisi lain, terkait fasilitas, kelurahan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu pengajuan fasilitas yang diminta oleh bank sampah, meskipun terbatas oleh anggaran yang ada. Dalam konteks ini, dukungan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk keberhasilan bank

sampah. Tanpa adanya fasilitas yang cukup, seperti tempat sampah terpisah dan alat pengolahan, program pemilahan sampah di tingkat rumah tangga akan sulit untuk diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, kerjasama antara kelurahan, bank sampah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang termasuk Kecamatan Ngaliyan. Instansi ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam hal pengelolaan sampah. Mulai dari pengangkutan, pemilahan, serta penyuluhan DLH berperan penting dalam menyukseskan pengelolaan sampah yang lebih baik lagi tentunya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang memegang peranan kunci dalam tata kelola dan pengelolaan sampah perkotaan. DLH memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DLH Kota Semarang memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pelayanan publik di bidang lingkungan hidup.

“Kami dari bidang 2 bertugas melakukan pengangkutan secara berkala menggunakan truk-truk milik DLH atau mitra swasta. Jumlah frekuensi pengangkutan disesuaikan dengan kapasitas TPS dan volume sampah harian. Selain itu kita juga bertugas melakukan penyapuan jalan dan kita juga buka retribusi buat pengangkutan sampah.” (wawancara, Ika 3 Juni 2025)

Tugas utama DLH mencakup pengkoordinasian dan pelaksanaan pengumpulan serta pengangkutan sampah dari sumbernya menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Saat ini, terdapat 10 Tempat Pembuangan

Sementara (TPS) yang tersebar di wilayah Kecamatan Ngaliyan, yang berfungsi sebagai titik kumpul sebelum sampah diangkut ke TPA. Keberadaan TPS yang strategis sangat penting untuk meminimalkan waktu dan jarak pengangkutan sampah, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan sampah (Muliyadi et al., 2023).



Gambar 5. 4 Armada Truck Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Instagram @dlh.semarang

DLH juga bertanggung jawab atas penyediaan armada truk sampah yang memadai dan penjadwalan pengangkutan harian. Proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan secara periodik, dengan rata-rata frekuensi 2–3 kali per hari, tergantung pada volume sampah yang dihasilkan. Menurut penelitian oleh Pramesti & Yuniningsih, (2023), pengaturan jadwal pengangkutan yang baik dapat mengurangi penumpukan sampah di TPS dan mencegah pencemaran lingkungan. Selain itu, DLH menerapkan sistem monitoring untuk memastikan bahwa pengangkutan sampah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga kualitas layanan pengelolaan sampah dapat terjaga.

Selain itu, DLH juga bertugas melakukan penyapuan dengan berfokus pada jalan-jalan protocol. Pihak DLH juga bekerja sama dengan pihak Kecamatan, termasuk Kecamatan Ngaliyan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sistem penyapuan berlangsung setiap hari secara berkala dengan track yang tersebar diseluruh jalan-jalan di Kota Semarang. Jika terdapat laporan adanya timbulan sampah yang ada, DLH bergerak cepat dalam membersihkan timbulan tersebut.



Gambar 5. 5 Penyapuan Jalan Oleh DLH

DLH tidak hanya bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengangkutan sampah, tetapi juga menyediakan layanan retribusi kebersihan yang menjangkau mulai dari tingkat rumah tangga hingga sektor komersial. Layanan retribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung operasional dan pengembangan sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang. Penetapan tarif retribusi diatur dalam Peraturan Walikota, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis properti, volume sampah yang dihasilkan, dan tingkat pelayanan yang diberikan.



Gambar 5. 42 Pelayanan Retribusi DLH

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang sebagai aktor pengelolaan sampah juga melakukan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas.

Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung seluruh siklus pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Fasilitas yang dimaksud meliputi Tempat Pembuangan Sementara (TPS), armada pengangkut sampah, serta peralatan pengolahan sampah seperti tempat sampah, gerobak sampah, dan alat timbangan. DLH Kota Semarang secara rutin melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut untuk memastikan kelancaran operasional dan mencegah terjadinya kerusakan yang dapat mengganggu proses pengelolaan sampah. Pemeliharaan meliputi perbaikan infrastruktur yang rusak, penggantian peralatan yang sudah usang, serta peningkatan kapasitas fasilitas sesuai dengan pertumbuhan volume sampah yang dihasilkan.



Gambar 5. 7 Pemeliharaan Kontainer Sampah

Sumber: Instagram @dlh.semarang

“Untuk hambatan kesadaran masyarakat sih mas, karna kalo terjadi penumpukan di TPS tuh masalah serius banget buat kita apalagi belum hari pengangkutannya. Rumornya juga TPA Jatibarang mau ditutup 2027 nanti dan masih dicari penggantinya. Anggaran juga termasuk si mas karna untuk pemeliharaan dan pengadaan tuh makan budget banget.” (wawancara, Ika 3 Juni 2025)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah perkotaan, sebagaimana terungkap dari hasil wawancara. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemilahan sampah. Kondisi ini diperparah dengan potensi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), terutama jika terjadi keterlambatan pengangkutan. DLH Kota Semarang menyadari bahwa edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk mengubah perilaku masyarakat.

Selain masalah kesadaran masyarakat, DLH Kota Semarang juga dihadapkan pada isu krusial terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. Terdapat kekhawatiran bahwa TPA Jatibarang akan ditutup pada tahun 2027 karena kondisinya yang sudah overload. Kepala DLH Kota Semarang, Arwita Mawarti, menyatakan bahwa daya tampung TPA Jatibarang diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga tiga sampai lima tahun ke depan. Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk menangani permasalahan ini dengan mempercepat implementasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Namun, proyek PSEL diperkirakan baru akan beroperasi penuh dalam 3-4 tahun ke depan. Oleh karena itu, DLH berencana menerapkan sistem sanitary landfill sebagai solusi jangka pendek (Anton Hartono, 2025).

Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang. DLH mengakui bahwa pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah membutuhkan anggaran yang besar. Untuk mengatasi masalah ini, DLH berupaya menjalin kerjasama dengan pihak swasta melalui program CSR. Selain itu, DLH juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah dan pengomposan skala rumah tangga.

“Kalo saya pada bidang 4 berfokus pada pengawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih sering si melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan baik bagi masyarakat

ataupun bank sampah mas. Jadi kita garda terdepan dalam pemilahan sampah di Kota Semarang ini.” (wawancara, Nuzuli 3 Juni 2025)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan program pilah sampah serta bank sampah. DLH berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya, manfaat ekonomi dari sampah yang dipilah, serta cara mengelola sampah dengan benar. Program-program ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dari pola membuang sampah menjadi pola memilah sampah (Ervin Dwi Ariyanto, 2018).



Gambar 5. 8 Pendampingan Bank Sampah

Sumber: Instagram @dlh.semarang

Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan melalui berbagai cara, seperti kegiatan di tingkat kelurahan, sekolah, komunitas, dan media sosial. DLH juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Materi sosialisasi mencakup informasi tentang jenis-jenis sampah, cara memilah sampah yang benar, manfaat daur ulang, serta dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak tepat.

Pengawasan terhadap bank sampah di seluruh Kota Semarang, termasuk wilayah Kecamatan Ngaliyan juga dilakukan oleh DLH. penekanan pada pentingnya peran bank sampah sebagai pilar utama pemilahan sampah dari sumber terus dilakukan. Terdapat total 664 bank sampah aktif yang tersebar di Kota Semarang. Untuk mendukung operasional bank sampah tersebut, DLH memberikan berbagai fasilitas seperti timbangan digital, kontainer sampah organik dan anorganik, gerobak sampah, serta pelatihan daur ulang dan pemilahan sampah.

“Untuk hambatan sendiri mungkin terkait kesadaran si mas. Ga semua masyarakat tuh ikut. Ya mayoritas ibu-ibu PKK si yang intens ikut tapi untuk yang lain belum terjangkau. Sama kita kekurangan SDM mas di bidang 4 ini, maka dari itu belum semua bisa kita bantu pendampingan dan sosialisasi.” (wawancara, Nuzuli 3 Juni 2025)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang mengakui adanya sejumlah hambatan dalam menjalankan perannya sebagai aktor utama pengelolaan sampah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang rendah menjadi kendala utama. Tidak semua masyarakat berpartisipasi aktif dalam program-program pengelolaan sampah, meskipun mayoritas ibu-ibu PKK menunjukkan keterlibatan yang intens. Selain itu, DLH juga menghadapi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga belum semua wilayah dapat terjangkau oleh program pendampingan dan sosialisasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, DLH Kota Semarang terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat SDM, dan memanfaatkan teknologi, DLH berharap dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Semarang (DLH Kota Semarang).

4. Bank Sampah Melati

Bank Sampah Melati merupakan salah satu bank sampah yang berdiri cukup lama dengan lokasi di Jalan Karonsih Timur I, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Bank sampah Melati tugas pokoknya meliputi proses penimbangan dan pencatatan sampah yang disetorkan oleh masyarakat, serta menjadi aktor utama pemilahan sampah ditingkat paling kecil.

“Awalnya hanya inisiatif warga di tingkat RT, ingin agar sampah tidak langsung dibuang ke TPA. Dari situ kita mulai kumpulkan botol plastik, kertas, dan lain-lain, dan biasanya untuk penimbangan itu tidak tentu bisa awal bulan bisa akhir bulan.” (wawancara, Ikari 19 Mei 2025)



Gambar 5. 9 Kondisi Bank Sampah Melati

Bank Sampah Melati berdiri sejak tahun 2014 sebagai inisiatif warga tingkat RT untuk mengurangi volume sampah anorganik yang biasanya langsung dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Jenis sampah yang dikelola di Bank Sampah Melati meliputi botol plastik, kertas, kardus, serta minyak jelantah.

Dalam pelaksanaanya sampah organic ditimbang dan dicatat sebagai dasar perhitungan nilai tabungan nasabah. Masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah di rumah sebelum membawanya ke bank sampah,

sehingga proses penimbangan dan pendataan dapat berjalan lebih efektif. Setelah itu dicatat dan dijadikan tabungan bagi warga yang menyetorkannya.



Gambar 5. 10 Buka Lapak Bank Sampah Melati

“Pemerintah daerah, baik dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga DLH, ikut mensosialisasikan dan memberi pembinaan program bank sampah kepada warga. Kami juga mendapat bantuan alat timbangan dari DLH.” (wawancara, Ikari 19 Mei 2025)

Bank Sampah Melati, sebagai salah satu unit pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, mendapatkan dukungan signifikan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah, mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH), aktif mensosialisasikan dan melakukan pembinaan program bank sampah kepada warga. Dukungan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat bank sampah dalam pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Selain sosialisasi dan pembinaan, Bank Sampah Melati juga menerima bantuan berupa alat timbangan dari DLH. Bantuan ini sangat membantu dalam operasional bank sampah, khususnya dalam proses penimbangan

sampah yang disetorkan oleh warga. Dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk sosialisasi maupun bantuan fasilitas, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Masih ada warga yang belum sadar akan pentingnya pilah sampah. Padahal sampah bisa bernilai ekonomis. Belum lagi kita belum punya gudang khusus untuk simpan sampah.” (wawancara, Ikari 19 Mei 2025)

Bank Sampah Melati menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya memilah sampah, meskipun sampah memiliki nilai ekonomis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum menyadari potensi ekonomi dari sampah yang dipilah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah sampah menjadi isu krusial karena dapat menghambat efektivitas operasional bank sampah. Padahal, dengan memilah sampah, masyarakat tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga dapat memperoleh penghasilan tambahan. Sampah yang dipilah dengan baik memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi.

Ketidadaan gudang khusus untuk menyimpan sampah juga menjadi kendala bagi Bank Sampah Melati. Gudang penyimpanan yang memadai sangat penting untuk menjaga kualitas sampah yang telah dipilah dan menghindari potensi gangguan terhadap aktivitas warga. Tanpa gudang yang memadai, sampah yang terkumpul rentan terhadap kerusakan akibat cuaca atau kontaminasi, sehingga menurunkan nilai jualnya.

5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan salah satu Lembaga dibawah naungan kelurahan yang menaungi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. LPMK sendiri mengurus banyak

pemberdayaan termasuk salah satunya pengelolaan sampah. Lembaga ini menjadi tangan kanan Kelurahan dalam menjembatani dengan masyarakat.

“Mungkin kalo program khusus terkait pengelolaan sampah kita gapunya mas, tapi kami sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang daur ulang sampah kepada masyarakat lewat bank sampah dan sedekah sampah.” (wawancara, Inzan 14 Mei 2025)

Dalam praktiknya, LPMK secara aktif mendatangi RT/RW setempat untuk memantau implementasi hasil penyuluhan serta memberikan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Penekanan pada keaktifan bank sampah dan konsep “sedekah sampah” menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan partisipasi warga.

Terdapat perbedaan mendasar terkait bank sampah dan sedekah sampah. Jika bank sampah menggunakan sistem tabungan individu di mana masyarakat bisa menabung nilai ekonomi sampah yang mereka kumpulkan, sedangkan sedekah sampah menggunakan prinsip gotong royong, di mana hasil penjualan sampah menjadi milik bersama warga dan digunakan untuk kepentingan umum atau kegiatan sosial.

“Mungkin terdapat indikasi keberhasilan dari program ini mas, karna setiap penimbangan sampah dari program baik bank sampah atau sedekah sampah bisa mencapai sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per kepala keluarga, dengan jumlah KK sekitar 30–40 per RW.” (wawancara, Inzan 14 Mei 2025)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), sebagai bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kelurahan, memiliki potensi untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah perkotaan. Hasil wawancara menunjukkan indikasi keberhasilan program bank sampah dan sedekah sampah yang dapat menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Setiap penimbangan sampah dari program tersebut dapat mencapai sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per kepala keluarga (KK), dengan jumlah KK

sekitar 30–40 per RW. Hal ini menunjukkan potensi dampak ekonomi yang signifikan dari pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Dengan potensi dampak ekonomi yang signifikan, LPMK dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah. Selain itu, LPMK juga dapat menggabungkan program bank sampah dengan program sedekah sampah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

“Hambatan mungkin mitra kolaborasi sih mas, baik dari DLH atau mitra swasta. Swasta kami juga paling sama pengepul tok. Anggaran juga termasuk buat fasilitasi RT/RW yang membutuhkan.”
(wawancara, Inzan 14 Mei 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi LPMK adalah kurangnya mitra kolaborasi, baik dari DLH maupun pihak swasta. Kemitraan dengan swasta pun terbatas pada pengepul sampah. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam memfasilitasi RT/RW yang membutuhkan dukungan. Kurangnya kemitraan dengan DLH dapat menghambat akses LPMK terhadap sumber daya dan dukungan teknis yang diperlukan dalam pengelolaan sampah. Padahal, DLH memiliki peran strategis dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan fasilitas kepada LPMK. Kemitraan dengan pihak swasta, selain pengepul, juga perlu diperluas untuk meningkatkan nilai tambah sampah dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Keterbatasan anggaran menjadi kendala klasik bagi LPMK dalam menjalankan program-program pengelolaan sampah. Anggaran yang terbatas dapat menghambat upaya LPMK dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat sampah, alat pengangkut sampah, dan tempat pengolahan sampah. Selain itu, anggaran yang terbatas juga dapat menghambat upaya LPMK dalam memberikan insentif kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah.

6. Rukun Warga 06 (RW) Kelurahan Ngaliyan

Di tingkat lingkungan masyarakat yang lebih kecil, seperti RT/RW, peran aktif dalam pengelolaan sampah juga semakin penting seiring meningkatnya volume dan kompleksitas permasalahan sampah perkotaan. Wawancara dengan Ketua RW 06 menunjukkan bahwa pihaknya telah berupaya untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih partisipatif dan inovatif meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

“Pengangkutan sampah di urus oleh LSM mas, jadi seminggu sekali diangkut. Buat pemilahan sampah kami ngandelin bank sampah setempat mas. Selain itu, kami juga memanfaatkan kotoran hewan dari rumah tangga untuk dibuat menjadi pupuk kompos dan kompos tersebut buat kebun RW 06 yang kita isi dengan sayur-sayuran. Lumayan buat masyarakat sekitar.” (wawancara, Ilmawan 14 Mei 2025)

Salah satu bentuk pengelolaan sampah yang dilakukan oleh RW 06 adalah bekerja sama dengan LSM lokal dalam penyelenggaraan pengangkutan sampah secara rutin, yaitu setiap minggu sekali. Meskipun pengumpulan sampah masih dilakukan secara konvensional (dari rumah ke TPS), keterlibatan LSM menunjukkan adanya sinergi antar pelaku dalam pengelolaan sampah, sesuai prinsip collaborative governance (Ansell & Gash, 2008). Keterlibatan non-state actors seperti LSM sangat penting karena dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat serta memberikan dukungan teknis maupun logistik dalam pengelolaan sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan

Selain itu, pemilahan sampah di RW 06 diserahkan kepada bank sampah yang ada di wilayah tersebut. Bank sampah merupakan salah satu model pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meminimalkan timbulan sampah yang masuk ke TPA melalui prinsip daur ulang (recycling) dan penghasilan ekonomi dari sampah anorganik. Dengan memanfaatkan bank sampah, RW 06 tidak hanya berhasil mengurangi volume sampah, tetapi juga

menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat melalui penjualan atau tabungan sampah tersebut.

Yang lebih inovatif lagi, RW 06 juga memanfaatkan limbah organik, khususnya kotoran hewan dari rumah tangga, untuk dibuat menjadi pupuk kompos. Proses pengomposan ini menunjukkan upaya pengelolaan sampah secara holistik dan siklikal, di mana limbah yang dihasilkan di wilayah tersebut dimanfaatkan kembali sebagai input produksi pertanian perkotaan. Kompos yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memupuk sayuran di kebun RW 06, yang menjadi sumber pangan segar bagi masyarakat sekitar.



Gambar 5. 11 Kebun Warga RW 06

Model seperti ini dikenal sebagai *integrated solid waste management system* (ISWM), di mana sampah tidak hanya dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki potensi ekonomi dan ekologis. Selain itu, keberadaan kebun komunitas juga berkontribusi pada ketahanan pangan lokal, penghijauan kota, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, pengomposan, hingga pemanfaatan hasilnya menunjukkan bahwa RW 06 telah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan sampah berbasis komunitas (*community-based solid waste management*). Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan, memperkuat

solidaritas sosial, serta menciptakan solusi lokal yang adaptif terhadap tantangan pengelolaan sampah perkotaan.

“Kelurahan sering nengok kesini si mas sewaktu waktu, mau liat proses disini. Penyuluhan juga pernah ikut dari DLH, yang belum mungkin soal dana si mas, memang belum ada anggaran yang turun. Jadi kami masih berjalan dengan memanfaatkan yang ada.”
(wawancara, Ilmawan 14 Mei 2025)

Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah daerah adalah melalui kunjungan rutin dari pihak kelurahan ke wilayah RW 06. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memantau proses pengelolaan sampah sekaligus memberikan pembinaan kepada masyarakat. Kunjungan atau monitoring oleh pihak kelurahan menjadi penting karena dapat meningkatkan motivasi masyarakat dan membantu mengidentifikasi kendala teknis serta sosial dalam pelaksanaan program lingkungan.

Selain itu, RW 06 juga pernah mengikuti penyuluhan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penyuluhan yang dilakukan oleh instansi pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran lingkungan dan perilaku positif masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara mandiri. Namun, agar dampaknya lebih berkelanjutan, penyuluhan perlu dilengkapi dengan pendampingan berkala dan pelatihan teknis.

Meski telah mendapat pembinaan dan penyuluhan, tantangan utama yang dihadapi oleh RW 06 adalah keterbatasan dana. Seperti disampaikan oleh narasumber, belum turunnya anggaran dari pemerintah membuat RW harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan aktivitas pengelolaan sampah. Fenomena ini bukanlah hal yang unik terjadi hanya di RW 06, melainkan menjadi isu struktural dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas di banyak wilayah perkotaan di Indonesia. Menurut penelitian Rawana et al., (2020) minimnya alokasi anggaran untuk program pengelolaan sampah di tingkat mikro menyebabkan banyak inisiatif pengelolaan sampah mandiri mengalami stagnasi atau bahkan gagal berkembang

Namun demikian, RW 06 tetap berupaya mempertahankan aktivitas pengelolaan sampah dengan memanfaatkan sumber daya lokal, baik berupa tenaga kerja, lahan, maupun material organik rumah tangga. Model pengelolaan sampah seperti ini sering disebut sebagai community-based solid waste management, yaitu pendekatan pengelolaan sampah yang bertumpu pada prinsip gotong royong, partisipasi aktif masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa RW 06 tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai aktor yang proaktif dalam menciptakan solusi lokal terhadap permasalahan sampah di wilayahnya. Partisipasi masyarakat di tingkat RT/RW menjadi fondasi kuat bagi terciptanya sistem pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan, asalkan didukung oleh kebijakan yang inklusif dan fasilitasi yang memadai dari pemerintah daerah.

7. Rukun Warga 01 (RW) Kelurahan Wates

Kelurahan Wates merupakan salah satu kelurahan yang termasuk dari Kecamatan Ngaliyan. Kelurahan ini terletak di ujung dari Kecamatan Ngaliyan yang pastinya tidak terlalu terpantau seperti di Kelurahan Ngaliyan. Pengelolaan sampah disini juga masih dapat diakatakan terbelakang dan masih berproses untuk menjadi yang lebih baik lagi.

“Sebelumnya kita buang sampah di tanah kosong punya orang mas, seminggu setelahnya baru diangkut. Karna makin lama sampah makin banyak dan bau banget kami dan ibu-ibu pkk yang rata-rata ngurusin posyandu bergerak buat menggaet LSM lalu sepakat mulai pengangkutan sampah tiap hari per RT dengan tarif 15 rb perbulan, kalo belum ada tong sampahnya kita kasi 50 rb mas tarifnya.”
(wawancara, Sutiah 6 Juni 2025)



Gambar 5. 12 Tong Sampah Inisiasi Ibu-ibu PKK

Mulai dari pengangkutan sampah per rumah tangga RW 01 mengandalkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat yang spontan dibuat pada tahun lalu. Sebelumnya sampah rumah tangga secara kolektif dikumpulkan di TPS setempat yang bahkan tidak dapat disebut TPS malah seperti lahan kosong milik warga setempat baru seminggu kemudian diangkut dan dibuang ke TPS pusat. Namun, seiring urgensi kenaikan sampah yang signifikan, kemudian mengandalkan LSM setempat untuk mengangkut sampah per rumah tangga dengan estimasi 2 RT per hari dengan total 10 RT yang ada di dalamnya. Per rumah tangga dikenakan biaya 15 rb perbulan dengan membayar 50 rb diawal untuk pemberian tong sampah yang dibuat langsung oleh ibu-ibu PKK setempat.

“Kalo pemilahan ya warga mungkin ga terlalu mikirin ya mas, karna sampah yang emang belum diangkut dan menumpuk biasanya langsung dibakar gt aja. Kita sempet dapet edaran buat bikin bank sampah tapi kita ga dikasih tau cara ngelolanya gimana, alhasil ya apa adanya aja kita buatnya. Belum lagi edukasi tentang sampah juga gapernah masuk sampe sini mas.” (wawancara, Sutiah 6 Juni 2025)

Berlanjut kepada pemilahan sampah, rata rata warga yang ada disini memilah sampah dengan cara dibakar langsung dan menimbulkan asap yang cukup menganggu warga setempat. Setelah ditelusuri ternyata RW 01 baru memulai untuk membuat bank sampah dengan edaran dari Kelurahan yang

mewajibkan memiliki bank sampah minimal 1 per RW nya. Lagi-lagi bank sampah juga dibuat spontan begitu saja mengikuti edaran tersebut. Tidak ada penyuluhan ataupun pengetahuan. Pengkonseptan bank sampah diprakarsai langsung bersama ibu-ibu PKK. Penyuluhan atau pelatihan pengelolaan sampah pun tidak didapatkan masyarakat baik dari Kelurahan maupun DLH secara langsung.

“Pertengahan bulan kemarin tuh kita nyobain langsung mas buat buka, sebelumnya udah ada imbauan dari saya dengan memberi tahu RT setempat dan disebarluaskan. Terus alhamdulillah kemarin lumayan, tapi soal alat emang belum ada dan kita beli pake kas RW dulu buat timbangan sama plastic sampahnya. Nah warga ngumpul bawa sampah, kita langsung telepon pengepul biar langsung abis dan ga bersisa, nanti buat uangnya kita kumpulin dulu jadi semacam kek Tabungan lah nanti satu tahun baru bisa diambil, tapi ini baru rencana ya mas buat ngambilnya setaun.” (wawancara, Sutiah 6 Juni 2025)

Seperti yang diketahui bahwasannya Kelurahan hanya mengimbau para RW untuk membuat bank sampah tanpa pedoman atau informasi bagaimana pengelolaannya. Sebulan yang lalu dilaksanakan program pertama dari bank sampah yakni pengkolektifan sampah yang bisa di daur ulang di dekat pos kamling tempat berkumpulnya warga. Setelah sampah plastik dan sampah daur ulang lain terkumpul, Bu Sutiah langsung menghubungi pengepul lalu diuangkan langsung. Uang tersebut tidak langsung diberikan, namun disimpan untuk pengkolektifan dicatat sebagai nasabah bank sampah lalu baru bisa diambil satu tahun lagi. Untuk alat yang digunakan pun masih menggunakan kas RW seperti membeli timbangan dan trashbag untuk pengkolektifan.

8. PT Narpati Agung Karya Lestari

PT. Narpati adalah salah satu perusahaan swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2007. Kerja sama ini tertuang dalam

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 568.1/21 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pemanfaatan dalam Rangka Pengolahan Sampah Menjadi Pupuk Organik. Operasionalnya dimulai pada tahun 2011 setelah semua infrastruktur pendukung selesai dibangun. Dalam kerja sama ini, PT. Narpati diberikan mandat untuk mengolah sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang menjadi pupuk organik padat dan cair. Sebagai mitra pemerintah, PT. Narpati sepenuhnya membiayai operasional pengelolaan sampah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana produksi.

Tugas utama PT. Narpati dalam kerja sama ini adalah menerima pasokan sampah sebanyak 350 ton per hari dari TPA Jatibarang untuk kemudian diolah menjadi pupuk organik sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan bersama. Proses pengolahan dilakukan secara teknis oleh PT. Narpati dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melalui UPTD TPA. Selain itu, PT. Narpati juga bertanggung jawab atas seluruh biaya operasional pengelolaan sampah serta membayar kontribusi tahunan sebesar Rp580 juta kepada Pemkot Semarang sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan lahan dan pasokan sampah.

Kerja sama antara Pemkot Semarang dan PT. Narpati telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang. Salah satu manfaat utamanya adalah penurunan volume timbunan sampah di TPA Jatibarang yang merupakan satu-satunya tempat pembuangan akhir di kota ini. Produk hasil olahan seperti pupuk organik padat dan cair memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan dalam bidang pertanian. Selain itu, adanya kerja sama ini turut membantu menjaga keberlanjutan fungsi TPA Jatibarang agar tidak cepat overload, serta mendukung upaya Kota Semarang dalam meraih penghargaan Adipura sebagai kota terbersih di Indonesia.

Meskipun perannya sangat signifikan, PT. Narpati juga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar TPA Jatibarang, terutama dalam bentuk partisipasi tenaga kerja. Beberapa masyarakat lokal bekerja langsung di

fasilitas pengolahan sampah milik PT. Narpati, sehingga turut meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Disposisi pelaksana dari kedua belah pihak, baik dari UPTD TPA maupun PT. Narpati, menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan ini. Komitmen kuat dari kedua pihak dalam mengelola sampah secara optimal menjadikan kerja sama ini tetap berjalan meski ada tantangan teknis dan administratif di tengah perjalanan.

Di sisi lain, kerja sama ini juga menghadapi beberapa tantangan, terutama dari aspek sosial dan ekonomi. Kondisi sosial masyarakat sekitar TPA Jatibarang, seperti keberadaan kelompok pemulung dan sapi, sering kali mengganggu proses pengambilan dan pengolahan sampah. Selain itu, kondisi finansial PT. Narpati yang masih berkembang menjadi hambatan dalam memenuhi kewajiban administratifnya kepada pemerintah, terutama dalam hal pembayaran kontribusi dan denda akibat keterlambatan. Meskipun demikian, komitmen kuat dari semua pihak, termasuk intensitas koordinasi yang cukup baik, menjadi modal penting untuk terus mempertahankan sinergi ini demi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Semarang.

B. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Teori Grindle

Analisis implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan akan dilakukan dengan mengidentifikasi interaksi antara Isi Kebijakan (Content of Policy) yang termuat dalam Perda dan Konteks Implementasi (Context of Implementation) di lapangan. Berikut ini merupakan hasil analisis dari implementasi dengan menggunakan Teori kebijakan publik:

1. Isi Kebijakan (Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012)

Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2012 merupakan dokumen formal yang menjadi panduan implementasi pengelolaan sampah. Karakteristik isi kebijakan ini memengaruhi bagaimana aktor-aktor di Kecamatan Ngaliyan merespons dan melaksanakannya:

- Kepentingan yang Terpengaruh: Perda ini secara langsung memengaruhi kepentingan berbagai pihak. Bagi masyarakat, Perda menuntut perubahan perilaku (pemilahan sampah) dan kewajiban retribusi, yang dapat dianggap sebagai beban jika tidak diimbangi manfaat yang jelas. Bagi pemerintah (DLH, Kecamatan, Kelurahan), Perda memberikan mandat dan tanggung jawab besar dalam pengelolaan sampah. Bagi sektor swasta (PT Narpati, pengepul), Perda menciptakan peluang bisnis dalam pengolahan dan daur ulang.
- Jenis Manfaat yang Dihasilkan: Perda menjanjikan manfaat lingkungan (kebersihan, kesehatan) dan potensi ekonomi (dari daur ulang). Namun, manfaat ekonomi ini belum merata dirasakan, terutama oleh masyarakat yang belum aktif di bank sampah, sehingga mengurangi motivasi untuk mematuhi Perda.
- Perubahan yang Diinginkan: Perda menghendaki perubahan signifikan dari sistem kumpul-angkut-buang menjadi sistem yang lebih terintegrasi dengan pengurangan dan daur ulang di sumbernya. Perubahan perilaku masyarakat dari tidak memilah menjadi memilah adalah inti dari amanat Perda.
- Lokasi Pengambilan Keputusan: Perda menetapkan kewenangan pengelolaan sampah pada pemerintah daerah (DLH sebagai pelaksana utama, Kecamatan dan Kelurahan sebagai koordinator di tingkat wilayah). Namun, desentralisasi kewenangan ini terkadang tidak diikuti dengan desentralisasi sumber daya yang memadai.
- Sumber Daya yang Dialokasikan: Perda mengamanatkan pengelolaan sampah yang membutuhkan sumber daya besar (anggaran, SDM, fasilitas). Namun, data menunjukkan alokasi anggaran yang minim (1,5% dari APBD) dan kekurangan SDM di DLH, serta fasilitas yang terbatas di bank sampah (tidak ada gudang, alat timbangan dari kas RW), menjadi hambatan serius dalam menjalankan amanat Perda.

2. Konteks Implementasi di Kecamatan Ngaliyan

Konteks implementasi di Kecamatan Ngaliyan, dengan berbagai aktor dan kondisinya, secara langsung memengaruhi bagaimana Perda No. 06 Tahun 2012 dijalankan. Seperti yang dijelaskan berikut ini:

a) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor:

- Kecamatan Ngaliyan: Memiliki kekuasaan koordinatif dan strateginya adalah sosialisasi, pembentukan bank sampah, dan pilot project pilah sampah. Kepentingannya adalah mewujudkan lingkungan bersih dan mematuhi kebijakan kota. Namun, keterbatasan anggaran membatasi strategi fasilitasi.
- Kelurahan: Bertindak sebagai perpanjangan tangan Kecamatan, dengan strategi sosialisasi dan monitoring bank sampah. Kepentingannya adalah meningkatkan partisipasi warga. Kekuasaannya terbatas pada pengajuan fasilitas dan pembinaan.
- DLH Kota Semarang: Memiliki kekuasaan regulatif dan operasional (pengangkutan, retribusi, pengadaan fasilitas). Kepentingannya adalah menjaga kebersihan kota dan mengelola TPA. Strateginya mencakup penyapuan jalan, pendampingan bank sampah. Namun, kekurangan SDM di Bidang 4 membatasi jangkauan sosialisasi dan pendampingan.
- Bank Sampah Melati: Aktor berbasis komunitas dengan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Strateginya adalah mengumpulkan dan menimbang sampah terpilah. Kekuasaannya terbatas pada inisiatif warga dan dukungan minimal dari pemerintah.
- LPMK: Memiliki kepentingan pemberdayaan masyarakat. Strateginya adalah sosialisasi daur ulang dan sedekah sampah. Kekuasaannya terbatas pada fasilitasi dan menjembatani warga dengan kelurahan/DLH. Hambatan utama adalah kurangnya mitra kolaborasi dan anggaran.
- RW 06 (Kelurahan Ngaliyan): Aktor proaktif dengan kepentingan menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan limbah.

Strateginya adalah kerja sama dengan LSM untuk pengangkutan, mengandalkan bank sampah, dan mengolah limbah organik menjadi kompos. Kekuasaannya terbatas pada inisiatif komunitas dan kas RW.

- RW 01 (Kelurahan Wates): Aktor yang baru memulai inisiatif pengelolaan sampah. Kepentingannya adalah mengatasi masalah sampah menumpuk. Strateginya adalah kerja sama dengan LSM lokal untuk pengangkutan dan inisiasi bank sampah secara mandiri. Kekuasaannya terbatas pada iuran warga dan kas RW.
 - PT Narpati Agung Karya Lestari: Aktor swasta dengan kepentingan bisnis pengolahan sampah menjadi pupuk. Strateginya adalah mengolah 350 ton sampah/hari dari TPA. Kekuasaannya adalah kapasitas pengolahan dan investasi. Kepentingannya adalah keberlanjutan bisnis dan memenuhi kontrak dengan Pemkot.
- b) Karakteristik Rezim dan Institusi: Struktur birokrasi pemerintah daerah (DLH, Kecamatan, Kelurahan) yang hierarkis dan terkadang kurang koordinatif antar bidang atau tingkatan, dapat menghambat implementasi Perda. Kurangnya anggaran khusus di tingkat kelurahan untuk program sampah menunjukkan kelemahan dalam struktur pendanaan institusional.
- c) Kepatuhan dan Responsivitas: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pemilahan sampah yang diamanatkan Perda masih bervariasi. Di RW 01 Wates, banyak warga yang masih membakar sampah atau tidak memilahnya karena kurangnya edukasi dan fasilitas. Ini menunjukkan rendahnya responsivitas target kelompok terhadap kebijakan. Sebaliknya, di Bank Sampah Melati dan RW 06, responsivitas lebih tinggi karena adanya inisiatif dan manfaat yang dirasakan.
- d) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
- Sosial: Tingginya pertumbuhan penduduk di Ngaliyan meningkatkan volume sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat secara umum dan budaya konsumtif menjadi tantangan sosial.

- Ekonomi: Potensi ekonomi dari sampah (melalui bank sampah) menjadi pendorong, namun belum semua masyarakat menyadari atau merasakan manfaatnya. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah juga merupakan faktor ekonomi yang signifikan.
- Politik: Komitmen walikota baru terhadap isu persampahan memberikan dorongan politik bagi implementasi Perda, namun dukungan ini perlu diterjemahkan ke dalam alokasi sumber daya yang lebih konkret.

C. Interaksi antara Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi

Interaksi antara Isi Kebijakan (Perda No. 06 Tahun 2012) dan Konteks Implementasi di Kecamatan Ngaliyan secara langsung membentuk dinamika implementasi pengelolaan sampah sebagai berikut:

- Kesenjangan antara Amanat dan Realitas Sumber Daya: Perda mengamanatkan pengelolaan sampah yang komprehensif, namun sumber daya yang dialokasikan (anggaran DLH, fasilitas bank sampah) tidak memadai. Ini menciptakan kesenjangan antara perubahan yang diinginkan oleh Perda dan kapasitas aktor untuk mewujudkannya. Akibatnya, inisiatif di tingkat akar rumput (seperti RW 01 Wates yang menggunakan kas RW untuk timbangan) harus menutupi kekurangan ini.
- Variasi Kepatuhan Berdasarkan Manfaat dan Edukasi: Perda menuntut perubahan perilaku (pemilahan), namun jenis manfaat yang ditawarkan (ekonomi, lingkungan) belum sepenuhnya dipahami atau dirasakan oleh semua. Di wilayah dengan edukasi dan pendampingan yang intensif (seperti Bank Sampah Melati yang didampingi DLH Bidang 4), kepatuhan dan responsivitas masyarakat cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, di wilayah yang kurang terjangkau edukasi (seperti RW 01 Wates), kepatuhan rendah dan praktik pembakaran sampah masih terjadi.

- Pengaruh Kekuasaan dan Kepentingan Aktor: Meskipun Perda memberikan mandat, kekuasaan dan kepentingan aktor di lapangan memengaruhi prioritas implementasi. DLH fokus pada pengangkutan dan TPA, sementara Kecamatan dan Kelurahan fokus pada sosialisasi dan bank sampah. Keterbatasan mitra swasta di luar pengangkutan (seperti PT Narpati yang hanya mengolah di TPA) menunjukkan bahwa kepentingan sektor swasta belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh rantai nilai pengelolaan sampah di tingkat kecamatan.
- Dampak Lingkungan Sosial-Ekonomi: Pertumbuhan penduduk dan budaya konsumtif (faktor lingkungan sosial-ekonomi) terus meningkatkan volume sampah, memberikan tekanan besar pada sistem pengelolaan yang diamanatkan Perda. Ini memperparah tantangan dalam mencapai perubahan yang diinginkan oleh Perda, meskipun ada upaya dari aktor-aktor implementasi.

Secara keseluruhan, implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan adalah proses yang kompleks, di mana keberhasilan dan tantangan muncul dari interaksi dinamis antara ambisi kebijakan (isi Perda) dan realitas di lapangan (konteks implementasi). Pemahaman mendalam terhadap interaksi ini menjadi kunci untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB VI

DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN

A. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu dampak yang terlihat dari upaya implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui inisiatif seperti pembentukan Bank Sampah dan pelatihan daur ulang yang dilakukan oleh kelurahan, LPMK, serta dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, warga mulai memahami bahwa sampah bukan hanya beban lingkungan, tetapi juga memiliki potensi nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga memberikan edukasi tentang konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai dasar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Peningkatan kesadaran ini menunjukkan adanya respons positif dari target kelompok (masyarakat) terhadap amanat Perda, terutama di area yang mendapatkan sosialisasi dan pendampingan intensif. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan dan pengumpulan sampah menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi Perda di tingkat mikro. Masyarakat mulai terlibat dalam proses pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, seperti rumah tangga dan RT/RW. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat dari sekadar membuang sampah menjadi lebih proaktif dalam mendaur ulang atau menjualnya melalui bank sampah. Seperti yang disampaikan oleh Syahputra (2021), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan limbah secara keseluruhan. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat,

program pengelolaan sampah yang dirancang oleh pemerintah cenderung tidak optimal karena kurangnya aksi kolektif di tingkat lokal.

Peningkatan kesadaran masyarakat ini juga didukung oleh upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Forum-forum penyuluhan, pertemuan RT/RW, serta sosialisasi yang dilakukan oleh PKK dan LPMK turut berperan dalam membentuk motivasi bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan melalui aktivitas daur ulang. Menurut Marlina (2020), pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah harus didasarkan pada aspek moralitas, etika, serta motivasi kolektif agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, program seperti bank sampah tidak hanya menjadi program pemerintah semata, tetapi juga menjadi budaya baru dalam kehidupan bermasyarakat, yang berdampak langsung pada lingkungan dan ekonomi warga setempat.

B. Penurunan Volume Sampah yang Dibuang ke TPA

Melalui penerapan prinsip pemilahan sampah sejak dari sumber dan aktivitas daur ulang yang semakin intensif, yang merupakan amanat Perda No. 06 Tahun 2012, terjadi penurunan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, langkah-langkah seperti pembentukan bank sampah dan pelatihan daur ulang telah mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri. Dengan adanya pemilahan di tingkat rumah tangga, hanya sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali yang akhirnya mencapai TPA. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah memiliki peran strategis dalam mengurangi beban lingkungan yang diakibatkan oleh penumpukan sampah.

Penurunan jumlah sampah yang masuk ke TPA berdampak langsung pada pengurangan risiko pencemaran tanah dan air, terutama yang berasal dari sampah organik yang membusuk dan menghasilkan cairan lindi serta dari limbah anorganik yang tidak terurai secara alami. Sampah plastik, logam, dan kertas yang berhasil dipilah dan dikelola melalui bank sampah atau unit daur ulang lokal tidak lagi menjadi bagian dari aliran limbah yang menuju TPA

Jatibarang, yang saat ini sudah overload dan direncanakan akan ditutup pada tahun 2027. Menurut Syahputra (2021), pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA merupakan salah satu indikator utama keberhasilan program pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, dampak ini masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh Kecamatan Ngaliyan, terutama di wilayah yang kepatuhan masyarakatnya masih rendah dan sumber daya yang dialokasikan untuk fasilitas pemilahan masih terbatas, seperti yang terlihat di RW 01 Kelurahan Wates.

C. Peningkatan Ekonomi Melalui Bank Sampah

Program Bank Sampah, yang sejalan dengan amanat Perda No. 06 Tahun 2012 untuk mendorong pengurangan dan daur ulang sampah, tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengelolaan limbah, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam peningkatan ekonomi lokal, khususnya di tingkat RT/RW. Di wilayah RW 06 Kelurahan Ngaliyan, bank sampah telah menjadi wahana pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri sekaligus produktif. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam dapat ditukarkan atau dijual melalui bank sampah, sehingga memberikan tambahan penghasilan bagi warga. Hasil wawancara menyebutkan bahwa setiap kepala keluarga yang aktif dalam program ini bisa mendapatkan nilai ekonomi sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per bulan, tergantung jenis dan jumlah sampah yang mereka kumpulkan. Hal ini membuktikan bahwa sampah bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga bisa menjadi sumber daya ekonomi jika dikelola dengan baik. Dampak ekonomi ini secara langsung memengaruhi jenis manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan, menjadikannya lebih konkret bagi masyarakat.

Selain meningkatkan pendapatan rumah tangga, keberadaan bank sampah juga turut menciptakan lapangan kerja baru di tingkat komunitas. Pengelolaan bank sampah membutuhkan tenaga untuk proses pemilahan, penimbangan, pengemasan, dan distribusi sampah ke pengepul atau industri daur ulang. Beberapa anggota masyarakat, terutama ibu-ibu PKK dan kelompok wanita tani, mulai menjadikan aktivitas ini sebagai usaha sampingan yang menjanjikan. Menurut Marlina (2020), pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah

berkaitan erat dengan aspek moralitas, etika, kesadaran budaya, serta motivasi kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sejahtera. Dengan demikian, bank sampah tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan limbah, tetapi juga menjadi bagian dari ekonomi sirkular yang inklusif dan berkelanjutan di perkotaan.

Keberhasilan bank sampah dalam meningkatkan ekonomi lokal juga sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, salah satu visi pembangunan Kota Semarang. Dengan adanya bank sampah, masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan luar, tetapi bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Selain itu, program ini juga selaras dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang bertujuan mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Syahputra (2021), partisipasi aktif masyarakat dalam program bank sampah merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah secara keseluruhan. Dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, bank sampah memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung perekonomian lokal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

D. Koordinasi Antar Aktor yang lebih baik

Keterlibatan aktor-aktor seperti Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan LPMK dalam implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan mulai menunjukkan adanya sinergi yang lebih baik. Kolaborasi antar-aktor ini terlihat melalui pelaksanaan program-program lintas instansi, seperti pembentukan bank sampah, sosialisasi daur ulang, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumbernya. Forum-forum koordinasi rutin yang diselenggarakan oleh kecamatan menjadi sarana penting untuk menyinkronkan kebijakan, mengidentifikasi kendala, serta merancang solusi bersama. Hasil wawancara dengan staf Kelurahan Ngaliyan menyebutkan bahwa forum tersebut membantu memperkuat hubungan antar

lembaga dan menciptakan kesepakatan dalam penanganan isu persampahan secara holistik.

Peningkatan koordinasi ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor dalam konteks implementasi kebijakan. Forum-forum penyuluhan lingkungan juga berkontribusi dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi kebijakan. Proses ini tidak hanya memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi teknis tentang pengelolaan sampah, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau ide dalam pengelolaan limbah di wilayahnya. Menurut Marlina (2020), keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi program sekaligus memperkuat komitmen kolektif dalam menjaga lingkungan hidup. Hal ini selaras dengan upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Ngaliyan, di mana penyuluhan yang melibatkan PKK dan RT/RW berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah secara mandiri.

Namun, meskipun sinergi antaraktor mulai terbentuk, masih diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih formal dan berkelanjutan agar kolaborasi tidak hanya bersifat insidental, terutama mengingat keterbatasan sumber daya dan kurangnya kepatuhan merata yang masih menjadi tantangan. Penelitian Manurung (2013) menyebutkan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Di Kecamatan Ngaliyan, meski belum sepenuhnya optimal, forum koordinasi bulanan yang melibatkan DLH, kelurahan, dan pengelola bank sampah telah menjadi langkah awal dalam membangun struktur tata kelola sampah yang lebih inklusif. Melalui pendekatan ini, diharapkan semua pihak memiliki pemahaman bersama, sehingga dapat menciptakan motivasi dan kapasitas aksi kolektif yang lebih kuat dalam menangani permasalahan sampah perkotaan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan, khususnya di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan didasarkan pada Teori Implementasi Kebijakan Grindle, penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya bergantung pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi lebih kepada interaksi kompleks antara Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*) di lapangan.

Dari sisi Isi Kebijakan (Perda No. 06 Tahun 2012), Perda ini mengamanatkan perubahan perilaku signifikan (pemilahan sampah dari sumbernya) dan membutuhkan alokasi sumber daya yang besar. Namun, ditemukan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk implementasi Perda masih sangat terbatas (anggaran minim, SDM DLH kurang, fasilitas bank sampah terbatas), menciptakan kesenjangan antara tuntutan kebijakan dan kapasitas implementor.

Dari sisi Konteks Implementasi, dinamika implementasi sangat dipengaruhi oleh:

- Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor: Berbagai aktor (Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, DLH, Bank Sampah, LPMK, RT/RW, PT Narpati) memiliki peran dan kepentingan yang beragam. Meskipun ada upaya koordinasi, fragmentasi kepentingan dan keterbatasan sumber daya masing-masing aktor masih menjadi tantangan.

- Karakteristik Rezim dan Institusi: Struktur birokrasi dan norma institusional belum sepenuhnya mendukung implementasi Perda secara optimal, terutama dalam hal alokasi anggaran dan fasilitasi di tingkat akar rumput.
- Kepatuhan dan Responsivitas: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap amanat Perda (pemilahan sampah) bervariasi. Di beberapa wilayah, partisipasi aktif dan kesadaran meningkat (misalnya, Bank Sampah Melati, RW 06), namun di wilayah lain (misalnya, RW 01 Wates), masih ditemukan praktik pembakaran sampah dan kurangnya pemilahan akibat minimnya edukasi dan fasilitas.
- Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik: Pertumbuhan penduduk dan budaya konsumtif terus meningkatkan volume sampah, memberikan tekanan pada sistem pengelolaan yang ada, sementara komitmen politik perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam dukungan sumber daya yang konkret.

Interaksi antara Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi menunjukkan bahwa meskipun Perda No. 06 Tahun 2012 memiliki tujuan yang baik, implementasinya terhambat oleh keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk menjalankan amanatnya, serta rendahnya kepatuhan dan responsivitas masyarakat secara merata yang disebabkan oleh kurangnya edukasi dan fasilitas pendukung. Dampak yang muncul adalah peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang bersifat parsial, penurunan volume sampah ke TPA yang belum signifikan secara keseluruhan, peningkatan ekonomi melalui bank sampah di komunitas tertentu, dan koordinasi antaraktor yang mulai membaik namun masih perlu penguatan. Secara umum, implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan masih dalam tahap perkembangan dengan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, asalkan kesenjangan antara isi kebijakan dan konteks implementasi dapat diatasi.

Secara umum, tata kelola sampah di Kecamatan Ngaliyan masih dalam tahap perkembangan dengan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, penguatan partisipasi masyarakat, serta inovasi teknologi dan sistem pengelolaan, Kecamatan Ngaliyan memiliki

peluang untuk menjadi contoh baik dalam pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari analisis implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 menggunakan Teori Grindle, berikut adalah saran-saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan:

1. Penguatan Isi Kebijakan Melalui Alokasi Sumber Daya yang Memadai:
 - Pemerintah Kota Semarang, khususnya DLH, perlu merevisi alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah agar lebih proporsional dengan amanat Perda No. 06 Tahun 2012. Peningkatan anggaran ini krusial untuk penyediaan fasilitas (tong sampah terpilah, gudang bank sampah, alat timbangan), penambahan SDM di bidang sosialisasi dan pendampingan, serta insentif bagi masyarakat dan komunitas yang aktif.
 - Perlu adanya mekanisme pendanaan yang lebih jelas dan mudah diakses bagi inisiatif pengelolaan sampah di tingkat kelurahan dan RW, tidak hanya mengandalkan kas RT/RW.
2. Peningkatan Kepatuhan dan Responsivitas Masyarakat:
 - Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, bekerja sama dengan DLH Bidang 4, perlu merancang program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif, kreatif, dan berkelanjutan. Pendekatan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di setiap wilayah, melibatkan tokoh masyarakat, dan menunjukkan manfaat ekonomi serta lingkungan secara konkret.
 - Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang mudah diakses dan memadai di setiap RT/RW dapat mendorong kepatuhan masyarakat terhadap amanat Perda.
3. Penyelarasan Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor:
 - Perlu dibentuk forum koordinasi yang lebih formal, rutin, dan inklusif antara seluruh aktor terkait (DLH, Kecamatan, Kelurahan, LPMK, perwakilan RW/RT, Bank Sampah, dan sektor swasta seperti pengepul atau PT Narpati). Forum ini harus menjadi wadah untuk menyinkronkan strategi,

berbagi informasi, mengatasi hambatan, dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman serta komitmen bersama terhadap tujuan Perda.

- Mendorong kemitraan yang lebih luas dengan sektor swasta, tidak hanya dalam pengangkutan atau pengolahan di TPA, tetapi juga dalam pengembangan teknologi daur ulang, pemasaran produk daur ulang, dan penyediaan insentif bagi masyarakat.

4. Penguatan Karakteristik Rezim dan Institusi:

- DLH perlu mengatasi kekurangan SDM di bidang pemberdayaan masyarakat agar program pendampingan dan sosialisasi dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.
- Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang lebih transparan dan partisipatif untuk mengukur efektivitas implementasi Perda, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kebijakan dan strategi secara berkala.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan kesenjangan antara isi Perda No. 06 Tahun 2012 dan konteks implementasi di Kecamatan Ngaliyan dapat diperkecil, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Semarang.

**IMPLEMENTASI TATA KELOLA SAMPAH PERKOTAAN:
STUDI KASUS KECAMATAN NGALIYAN**

SKRIPSI

Program Studi S-1 Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Safri Subhan Kahfi

2006016013

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi dari mahasiswa:

Nama : Safri Subhan Kahfi

NIM : 2006016013

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Tata Kelola Sampah Perkotaan: Studi Kasus Kecamatan Ngaliyan

Dengan ini telah kami telah setujui dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya, kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 13 Juni 2025

Pembimbing



Masrohatun M.Si

NIP.198806212018012001

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI TATA KELOLA SAMPAH PERKOTAAN: STUDI KASUS
KECAMATAN NGALIYAN

Disusun Oleh:

Safri Subhan Kahfi

2006016013

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 26 Juni 2025 dan
telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris



M. Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP: 198505022019031007

Penguji I

Pembimbing



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

NIP: 196805051995031002



Masrohatun, M.Si

NIP: 198806212018012001

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Safri Subhan Kahfi, menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "Implementasi Tata Kelola Sampah Perkotaan: Studi Kasus Kecamatan Ngaliyan" merupakan hasil karya tulis saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang telah diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang maupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum dipublikasikan telah dicantumkan sumbernya secara jelas dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila terdapat unsur plagiarisme dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi yang ada. Demikian, atas perhatian dan pengertiannya saya sampaikan terima kasih.

11

Semarang, 13 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Safri Subhan Kahfi

2006016013

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala tuhan seluruh alam semesta. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak dan karunia-Nya. Alhamdulillah, atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Tata Kelola Sampah Perkotaan Studi Kasus Kecamatan Ngaliyan.” Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad shallalhu alaihi wassalam, *the prophet one* nabi yang semoga memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat. Aamiin.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah kelegaan dan kegembiraan tersendiri khusus nya bagi penulis, Skripsi ini merupakan sebuah pencapaian dari proses pembelajaran baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan selama penulis mencari ilmu di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam mengemban ilmu di FISIP UIN Walisongo, penulis masih memiliki banyak kekurangan dan tentunya banyak pihak yang berkontribusi dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat berada pada tempat sekarang ini. Oleh karena itu sudah seharusnya dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag yang telah memberikan bebagai ilmu serta usaha nya kepada para mahasiswa di UIN Walisongo Semarang termasuk penulis sendiri. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemuliaan disisi Allah SWT.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik untuk FISIP. Semoga dengan beliau FISIP semakin maju dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si. sekaligus merupakan dosen mata kuliah kebijakan publik yang telah memberikan arahan, masukan dan ilmunya dalam proses pembuatan skripsi.

4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Ibu Masrohatun M.Si. sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan dukungan selama proses perkuliahan hingga proses pembuatan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya atas waktu dan ilmunya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo yang mendidik penulis dari semester awal hingga akhir dan telah membantu banyak hal dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh informan penelitian yang memberikan segenap informasi kepada penulis sehingga dapat memperkaya data penelitian dan penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
7. Mamah, ayah, kakak, dan adik tercinta yang selalu mendukung dan membantu penulis dengan tulus berupa moral dan juga material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. *The special one* Dea Aulia Rahmi (2201016109), terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi, penasehat yang baik dan senantiasa selalu memberikan cinta.
9. Segenap keluarga kontrakan Bahagia, Fanniya, Asdut, Nizar, Bakhri, Ayung, Ute, Maul, Sner, Rowi. Terimakasih telah menemani penulis semasa perkuliahan dengan penuh suka dan duka.
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (HMJB) terkhusus Iyad, Agoy, Adul, Fikri, Agus, Dira, Muna dan semuanya. Terimakasih banyak telah menjadi teman yang se frekuensi selama berkuliah di UIN Walisongo.
11. Teman-teman Padepokan (PHT) Ato, Fadhil, Uda, Damale, dan Lemping yang senantiasa selalu menemani dan membantu penulis saat senang-senang.
12. Teman-teman penulis yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak pernah menyangka dapat bertemu teman seperti kalian.
13. Dan yang terakhir tentunya untuk saya sendiri Safri Subhan Kahfi, terimakasih karna selama ini sudah selalu berjuang sampai titik ini. Mari berbenah untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya setelah ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu penulis sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak serta dapat menjadi referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah selalu melimpahkan ahmat an ridho-Nya kepada kita semua.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan do'a serta rasa syukur atas rahmat, karunia dan hidayah
kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya yang telah
membesarkan dan mendidik saya agar menjadi anak yang berguna serta selalu
memberikan dukungan dalam segala hal saat menjalani hidup, dan selalu
memanjatkan do'a untuk saya tanpa henti untuk meraih kesuksesan.

MOTTO

“It doesn't matter how bad you were in the past, but try to live better than yesterday because tomorrow is a mystery”

“Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau perlu bersandar hibahkan lelahmu.”

- Perunggu 33x

ABSTRAK

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan tantangan krusial yang dihadapi banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Semarang. Meskipun telah ada kerangka regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, implementasinya di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Ngaliyan, masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Daerah tersebut di Kecamatan Ngaliyan, serta mengidentifikasi faktor-faktor dari isi kebijakan dan konteks implementasi yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan pelaksanaannya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berlandaskan Teori Implementasi Kebijakan Grindle (1980), data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di beberapa kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup, Bank Sampah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, dan sektor swasta. Interaksi antara karakteristik isi kebijakan (seperti tuntutan perubahan perilaku dan alokasi sumber daya) dan konteks implementasi (meliputi kekuasaan, kepentingan aktor, karakteristik institusional, kepatuhan masyarakat, serta lingkungan sosial-ekonomi) secara dinamis membentuk proses implementasi. Meskipun terdapat inisiatif positif seperti peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat di beberapa komunitas, serta potensi ekonomi melalui bank sampah, tantangan signifikan masih ada, terutama terkait keterbatasan sumber daya, kurangnya kepatuhan masyarakat secara merata, dan koordinasi antaraktor yang belum optimal. Diskusi ini menekankan pentingnya memahami dinamika implementasi kebijakan untuk mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Ngaliyan

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tata Kelola Sampah

ABSTRACT

Urban waste management poses a crucial challenge for many cities in Indonesia, including Semarang City. Despite the existence of a regulatory framework such as Regional Regulation Number 06 of 2012 concerning Waste Management, its implementation at the local level, particularly in Ngaliyan District, still faces various obstacles. This study aims to analyze the implementation process of this Regional Regulation in Ngaliyan District, and to identify the policy content and implementation context factors that influence its success and challenges. Employing a descriptive qualitative approach and grounded in Grindle's (1980) Policy Implementation Theory, data was collected through interviews and observations in several sub-districts. The findings indicate that the implementation of the Regional Regulation involves various stakeholders, including the Sub-district Government, Urban Village Offices, Environmental Agency, Waste Banks, Community Empowerment Institutions, Neighborhood Units, and the private sector. The dynamic interaction between policy content characteristics (such as demands for behavioral change and resource allocation) and the implementation context (encompassing actors' power and interests, institutional characteristics, community compliance, and the socio-economic environment) shapes the implementation process. While positive initiatives exist, such as increased community awareness and participation in some communities, and economic potential through waste banks, significant challenges persist, particularly concerning limited resources, uneven community compliance, and suboptimal inter-actor coordination. This discussion emphasizes the importance of understanding policy implementation dynamics to foster more effective and sustainable waste management practices in Ngaliyan District.

Keyword: *Policy Implementation, Waste Management*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Aktor-Aktor Dalam Tata Kelola Sampah	7
2. Tata Kelola Sampah Perkotaan	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II	21
TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	21
A. Pengertian Implementasi Kebijakan	21

B.	Teori Implementasi Kebijakan Grindle.....	21
C.	Interaksi Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi	24
BAB III.....		26
LANDSCAPE KECAMATAN NGALIYAN		26
A.	Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan dan Sampah Ngaliyan	26
BAB IV		35
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN		35
A.	Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngaliyan.....	35
B.	Tahapan Proses Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda No. 06 Tahun 2012	36
C.	Hambatan Implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 dalam Pengelolaan Sampah	43
BAB V.....		47
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN		47
A.	Identifikasi Aktor Utama dalam Implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan	47
B.	Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Teori Grindle.....	73
C.	Interaksi antara Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi.....	77
BAB VI.....		79
DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN		79
A.	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.....	79
B.	Penurunan Volume Sampah yang Dibuang ke TPA	80
C.	Peningkatan Ekonomi Melalui Bank Sampah.....	81
D.	Koordinasi Antar Aktor yang lebih baik	82
BAB VII		84
PENUTUP		84

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA.....	92
CURRICULUM VITAE.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sebaran Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2024	2
Tabel 3. 1 Tabel Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan, 2023.	27
Tabel 3. 2 Tabel Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan 2023.....	28
Tabel 3. 3 Tabel Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Ngaliyan	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu kota tidak hanya berdampak positif pada aktivitas ekonomi tetapi juga memiliki berbagai dampak buruk. Contoh konsekuensi negatif dari pembangunan kota adalah peningkatan volume sampah pada setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kawasan perkotaan, masalah sampah menjadi semakin mendesak dan membutuhkan perhatian serta bantuan khusus. Pengelolaan dan penanganan sampah saat ini masih kurang efektif karena berbagai faktor. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan atau program pengelolaan yang tidak terintegrasi, serta minimnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, baik dari sektor bisnis maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik seharusnya menjadi jawaban atas beberapa permasalahan diatas (Gobai et al., 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah hasil sisa dari aktivitas manusia sehari-hari atau proses alami yang berbentuk padat. Jika tidak dikelola dengan benar, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, baik bagi lingkungan, kesehatan, maupun perekonomian. Salah satu dampaknya adalah terjadinya pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air dan udara (Hasibuan, 2016). Sampah yang menumpuk juga dapat menyebabkan terjadinya banjir yang sering terjadi pada musim hujan. Tumpukan sampah tentunya juga dapat menimbulkan penyakit yang menganggu keseimbangan lingkungan didalamnya (Rosyidie, 2013). Keindahan kota tentunya akan terganggu oleh hadirnya sampah sampah yang ada. Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di banyak kota di Indonesia termasuk di Kota Semarang (Sholihah, 2020).

Kota Semarang yang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu kota yang banyak dijadikan sebagai tempat menimba ilmu serta tempat orang-orang menggantungkan kehidupannya. Tercatat jumlah migrasi masuk ke Kota Semarang yakni 672.731 jiwa pada tahun 2023 (BPS, Kota Semarang Dalam Angka 2023). Seiring dengan padatnya penduduk yang ada tentunya hal tersebut mengakibatkan naiknya volume sampah yang ada. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mencatat dalam sehari produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1.110 ton perhari (DLH Kota Semarang). Berikut table timbulan sampah per kecamatan tahun 2024 yang ada di Kota Semarang.

Tabel 1. 1 Sebaran Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2024

KODE	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH TIMBUNAN SAMPAH/ TAHUN (TON)	RASIO SAMPAH PER ORANG (TON)
33.74	KOTA SEMARANG	1,688,981	118,229	70,000
33.74.01	SEMARANG TENGAH	57,960	4,057	0,0699965
33.74.02	SEMARANG UTARA	119,321	8,352	0,699960
33.74.03	SEMARANG TIMUR	70,059	4,904	0,06999
33.74.04	GAYAMSARI	72,536	5,078	0,06722
33.74.05	GENUK	124,634	8,724	0,06999
33.74.06	PEDURUNGAN	197,125	13,799	0,7000
33.74.07	SEMARANG SELATAN	66,633	4,664	0,06999
33.74.08	CANDISARI	78,128	5,469	0,0700
33.74.09	GAJAHMUNGKUR	58,229	4,076	0,06999
33.74.10	TEMBALANG	189,689	13,278	0,06999
33.74.11	BANYUMANIK	143,953	10,077	0,07000
33.74.12	GUNUNGPATI	99,357	6,955	0,07000
33.74.13	SEMARANG BARAT	154,351	10,805	0,07000
33.74.14	MIJEN	80,025	5,602	0,07000
33.74.15	NGALIYAN	142,845	9,999	0,06999
33.74.16	TUGU	34,136	2,390	0,0700019

Sumber: DLH Kota Semarang (2023)

Berdasarkan data diatas, dapat diartikan bahwasannya Kota Semarang memiliki total jumlah penduduk sebanyak 1,688,981 jiwa dengan total timbunan sampah mencapai 118,229 ton per tahunnya. Dari analisis data kecamatan dengan jumlah timbunan sampah paling banyak berada di Kecamatan Pedurungan dengan jumlah timbulan sampah sebesar 13,799 ton dari 197,125 penduduk, rasio 0.0700 ton/orang. Sebaliknya, Kecamatan Tugu mencatatkan jumlah timbunan sampah paling sedikit, yaitu dengan jumlah timbulan sampah sebesar 2,390 ton dari 34,136 penduduk, dengan rasio 0.0699 ton/orang.

Kecamatan Ngaliyan memiliki jumlah penduduk sebanyak 142,845 jiwa dan menghasilkan timbunan sampah sebanyak 9,999 ton. Meskipun jumlah penduduknya berada di tengah-tengah dalam daftar kecamatan, volume sampah yang dihasilkan cukup signifikan. Dengan menduduki posisi tiga terbanyak dari timbulan sampah yang ada per kecamatan yang ada di Kota Semarang. Dengan perhitungan sederhana, rasio timbunan sampah per jiwa di Ngaliyan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Sampah per Jiwa} = \text{Jumlah Timbulan Sampah}$$

$$\text{Jumlah Penduduk } 9,999 \text{ ton } 142,845 \text{ jiwa} \approx 0.070.$$

Rasio ini menunjukkan bahwa setiap warga di Kecamatan Ngaliyan menghasilkan sekitar 70 kilogram sampah per tahun. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan timbunan sampah. Terlebih lagi sampah yang diangkut ke TPA dari 10 TPS di Kecamatan Ngaliyan hanya mencapai 103,6 m³ per-hari dari total 270,98 m³ per-hari. Dengan demikian tingkat pelayanan pengangkutan sampah di wilayah tersebut hanya sebesar 32,8%. Timbunan sampah yang berlebihan di beberapa TPS menyebabkan sebagian sampah tidak langsung diangkut ke TPA pada hari pengumpulan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan efisien untuk mengurangi biaya dan waktu pengangkutan, serta meningkatkan kualitas layanan. Biaya pengangkutan sampah sendiri cukup

tinggi, yakni sekitar 60% dari total biaya pengelolaan sampah (Triwibowo & Halimatussadiyah, 2016). Dalam konteks ini, pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan masih menghadapi berbagai tantangan.

Keterlibatan aktor-aktor dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan dapat dikategorikan ke dalam pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran sebagai pengatur dan penyedia layanan, sementara masyarakat berfungsi sebagai pengguna dan partisipan aktif. Sektor swasta dapat memberikan inovasi dan investasi dalam teknologi pengelolaan sampah. Keterlibatan ketiga aktor ini sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori tata kelola yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan penelitian (Marlina, 2020) dan (Permatasari, 2019). Selanjutnya, pengenalan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai metode dalam pengelolaan sampah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Dalam skripsi, konsep ini dapat diintegrasikan sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, dengan menekankan pada pentingnya inovasi dalam pendekatan pengelolaan, seperti penerapan Bank Sampah. Artikel menunjukkan bahwa Bank Sampah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran sosial dan ekonomi masyarakat terhadap nilai sampah sesuai dengan penelitian (Syahputra, 2021) dan (Nov Pratama, 2018).

Menyadari urgensi permasalahan sampah, Pemerintah Kota Semarang membuat Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini menjadi landasan hukum dan kerangka kebijakan formal yang mengatur seluruh aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, penanganan, hingga peran serta tanggung jawab berbagai pihak, termasuk masyarakat. Pasal-pasal dalam Perda ini mengamanatkan kewajiban bagi setiap warga untuk mengelola sampah dari sumbernya, termasuk melalui pemilahan. Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa meskipun Perda ini telah berlaku selama lebih dari satu dekade, implementasinya di Kecamatan Ngaliyan masih belum optimal. Tingkat pelayanan pengangkutan sampah yang rendah dan

masih banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan realitas pelaksanaannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, melainkan juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan.

Untuk memahami kompleksitas kesenjangan antara kebijakan dan implementasi ini, penelitian ini akan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Grindle (1980). Grindle berargumen bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan merupakan hasil interaksi dinamis antara Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*). Dalam kerangka ini, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 akan menjadi fokus utama sebagai representasi dari Isi Kebijakan, yang karakteristiknya seperti kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, perubahan yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan, dan sumber daya yang dialokasikan akan dianalisis. Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji Konteks Implementasi di Kecamatan Ngaliyan, meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (pemerintah kecamatan, kelurahan, DLH, bank sampah, LPMK, RT/RW, dan PT Narpati), karakteristik rezim dan institusi, tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang ada. Dengan mempertimbangkan interaksi antara kedua variabel ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan dapat ditingkatkan melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran masing-masing aktor dan dampak dari kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Penelitian ini tentunya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti lain di berbagai tempat serta subjek yang berbeda. Namun, penelitian ini masih menarik untuk diteliti lebih dalam guna memperkaya studi tentang hal tersebut. Dengan mempertimbangkan teori dinamika kolaborasi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan

dapat ditingkatkan melalui kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran masing-masing aktor dan dampak dari kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Maka dari itu penelitian ini diberi judul "**TATA KELOLA SAMPAH PERKOTAAN: STUDI KASUS KECAMATAN NGALIYAN**".

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama terkait tata kelola sampah di Kecamatan Ngaliyan. Berikut adalah rincian rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan di Kecamatan Ngaliyan?
2. Bagaimana analisis implementasi kebijakan serta siapa saja aktor yang terlibat dalam tata kelola sampah di Kecamatan Ngaliyan?
3. Apa dampak dari implementasi kebijakan tata kelola sampah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan permasalahan yang akan dikaji dari tema tata kelola sampah perkotaan, selanjutnya akan diuraikan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngaliyan.
2. Menganalisis implementasi kebijakan tersebut dan mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam tata kelola sampah perkotaan di Kecamatan Ngaliyan.
3. Mengetahui dampak dari implementasi kebijakan tata kelola sampah perkotaan yang dilakukan di Kecamatan Ngaliyan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan ilmiah dan menambah wawasan terkait implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah perkotaan, dengan menggunakan kerangka Teori Implementasi Kebijakan.
- b. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai peran para aktor di balik pemerintahan kecamatan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah perkotaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penerapan tata kelola sampah di kawasan perkotaan.
- b. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi bagi peneliti dan penulis lain yang ingin mengkaji tema serupa dengan pendekatan yang lebih mendalam dan menyeluruh.

E. Tinjauan Pustaka

Banyak penelitian yang sudah mengkaji tentang politik sampah perkotaan ini. Oleh karenanya untuk mengetahui posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada maka peneliti akan membaginya menjadi dua tema yakni (1) Aktor-Aktor Dalam Tata Kelola Sampah dan (2) Tata Kelola Sampah Perkotaan.

1. Aktor-Aktor Dalam Tata Kelola Sampah

Penelitian terkait aktor-aktor dalam tata kelola sampah yang dilakukan oleh (Manurung, 2013), (Napitupulu & Muhyidin, 2021) dan (Syahputra, 2021) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Manurung dalam penelitiannya ini menyoroti bahwa masyarakat memiliki peran vital dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan iuran bulanan hingga partisipasi dalam kegiatan pengelolaan di tingkat rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa jika orang lebih menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang baik, mereka dapat melakukan hal-hal besar

untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Artikel ini mencatat bahwa keterlibatan swasta, meskipun dalam skala kecil, merupakan langkah awal yang penting. Misalnya, inisiatif individu untuk mendirikan bank sampah mencerminkan potensi sektor swasta dalam berkontribusi terhadap solusi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya investasi dan komitmen dari pihak swasta, serta kendala dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif. Ini menjadi pengingat bahwa untuk mencapai tata kelola yang efektif, perlu ada strategi yang lebih baik dalam memberdayakan masyarakat dan menarik minat swasta.

Sementara, menurut Napitulu dan Muhyidin dalam penelitiannya membahas tantangan partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah kota berkelanjutan. Artikel ini menekankan bahwa pengelolaan sampah kota tidak dapat berhasil tanpa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam penelitian ini untuk menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif merupakan esensial untuk menciptakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan semua pihak dapat mengurangi beban pemerintah dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan perilaku pemangku kepentingan, terutama masyarakat, diperlukan dalam proses pengelolaan sampah. Ia mengaitkan temuan ini dengan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Menyoroti bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah merupakan langkah krusial dalam mengurangi volume sampah dan dampaknya.

Selain itu, Syahputra menyoroti betapa pentingnya bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan program pengelolaan sampah, terutama melalui Bank Sampah. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam pengelolaan lingkungan yang menekankan pada keterlibatan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama.

Penelitian diatas tentunya menjadi warna dalam politik persampahan yang ada selama ini. Pengelolaan sampah perkotaan selama ini berfokus pada urgensi dari beberapa daerah yang diteliti oleh para peneliti. Berdasarkan beberapa studi diatas tidak terdapat strategi khusus dalam pengelolaan sampah. Maka hal tersebut menjadi salah satu faktor menarik dari politik persampahan yang masih layak untuk dipelajari lebih dalam.

2. Tata Kelola Sampah Perkotaan

Penelitian tentang tata kelola sampah yang dilakukan oleh Fasdani (2018), Marlina (2020) dan Nov Pratama (2018) dengan metode penelitian kualitatif. Fasdani dalam penelitiannya yang berjudul “Politik Lingkungan: Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan” mengatakan bahwa strategi pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dianggap tidak efektif dan lemah, seperti swastanisasi pengangkutan sampah. Akibatnya, program ini menjadi sumber timbunan sampah. Swastanisasi pengangkutan sampah juga membuat pemerintah, terutama Kecamatan dan Kelurahan, tidak lagi mengawasi serta menilai pengelolaan sampah di daerah mereka. Faktor utama yang mempengaruhi pendekatan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah kekurangan sumber daya anggaran untuk memodernisasi sistem pengelolaan sampah. Fasdani menilai bahwa kerja sama yang dilakukan memiliki dampak negative dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina mengenai tata kelola sampah menyebutkan bahwa pengelolaan sampah sebaiknya dimulai dari tingkat rumah tangga dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dinilai sebagai salah satu solusi yang efektif, karena setiap rumah tangga dapat berperan aktif dalam mengatasi permasalahan sampah sejak tahap awal. Pemberdayaan ini berkaitan dengan aspek moralitas, etika, kesadaran budaya, motivasi, dan visi lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan kelembagaan dan teknis sangat diperlukan. Masyarakat dapat didorong melalui berbagai kebijakan yang diterapkan di tingkat desa. Di tingkat kabupaten, kebijakan tersebut perlu diatur secara jelas dalam bentuk

peraturan daerah (perda) serta peraturan bupati atau walikota yang lebih terperinci. Kebijakan ini juga harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Selain itu, peraturan desa (perdes) harus mencakup alokasi sumber daya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.

Sementara itu, Nov Pratama dalam penelitiannya tentang tata kelola kota dengan program bank sampah yang digunakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Ia menganalisis bahwa program tersebut belum terlaksana dengan efektif dan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya sampah yang dibuang di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan kurangnya minat masyarakat dalam program bank sampah. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program bank sampah untuk tata kelola sampah di Kota Pekanbaru termasuk kurangnya sosialisasi tentang program, kurangnya anggaran untuk mendukung program, kurangnya pelatihan teknis terkait program, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan kurangnya partisipasi dalam tujuan program.

Dalam beberapa penelitian diatas mengenai program tata kelola kota tentunya dibutuhkan korelasi antar pihak agar program yang dijalani dapat berjalan dengan semestinya. Penelitian ini tentunya amat menarik untuk ditelusuri lebih dalam untuk meninjau program mana yang paling efektif dan efisien. Tata kelola kota juga penting untuk para pemerintahan kota maupun daerah untuk bisa lebih mengelola kota dengan lebih baik.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masalah yang akan diteliti, berikut penjelasannya:

a. Pengertian Sampah

Sampah dapat diartikan sebagai benda yang sudah tidak memiliki nilai guna, tidak lagi diperlukan, atau dianggap tidak diinginkan sehingga perlu dibuang. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang baik dan efisien sangat penting untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan ini meliputi langkah-langkah seperti pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah, sehingga risiko pencemaran, penyebaran penyakit, serta kerusakan ekosistem dapat ditekan seminimal mungkin (Azrul, 1990). Menurut Kodoatie (2003) sampah didefinisikan sebagai limbah atau sisa buangan berbentuk padat atau setengah padat yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan maupun dari siklus kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Dalam perspektif ilmu kesehatan lingkungan, sampah (*refuse*) merujuk pada sebagian material atau benda yang dianggap tidak bermanfaat, tidak dapat digunakan, tidak diinginkan, atau harus dibuang. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sampah dengan baik agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan yang efektif dapat membantu mencegah pencemaran dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan.

Menurut Hadiwiyoto (1983), sampah dapat didefinisikan sebagai sisa-sisa bahan yang telah melalui berbagai peroses, seperti pengambilan bagian utamanya, penglahan, atau yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi. Dari sudut pandang ekonomi, sampah dianggap sebagai barang yang tidak bernilai, sementara dalam kontek lingkungan, keberadaannya dapat menimbulkan masalah kesehatan dan mengancam ekosistem. Maka dari hal tersebut, pengelolaan yang baik dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut.

Sampah dapat dipahami sebagai sisa-sisa bahan, limbah, atau buangan padat maupun setengah padat yang dihasilkan dari berbagai aktivitas atau proses kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan.

Pengertian ini merujuk pada berbagai definisi sampah yang telah dijelaskan sebelumnya.

b. Jenis Sampah

Berdasarkan sifat-sifatnya, jenis sampah menurut Sucipto (2012) dapat dibagi menjadi dua yaitu sampah organik dan anorganik.

1) Sampah Organik

Sampah organik berasal dari aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan. Sampah ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sampah organik basah yang memiliki kandungan air tinggi, dan sampah organik kering dengan kandungan air rendah. Contoh sampah organik basah antara lain kulit buah dan sisa sayuran, sedangkan sampah organik kering meliputi bahan seperti kertas, kayu, ranting pohon, dan daun kering.

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah jenis sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan sulit terurai secara alami karena terbuat dari bahan yang tidak mudah hancur. Contoh sampah anorganik antara lain kaleng, plastik, besi, logam, serta gelas dan mika, yang semuanya tidak mengandung senyawa organik. Selain itu, sampah ini tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk mengurangi dampak buruknya terhadap lingkungan.

c. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah serangkaian upaya yang melibatkan pengaturan dan penanganan sampah, dimulai dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan, hingga tahap pengolahan dan pembuangan akhir. Tujuan dari proses ini adalah memastikan sampah dikelola secara efisien dan efektif, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Pengelolaan sampah yang baik juga mencakup penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti mendaur ulang dan mengurangi volume sampah (Karya, 1993). Pengelolaan sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengelolaan

individu yang dilakukan secara mandiri dan pengelolaan terpusat yang ditujukan untuk lingkungan atau wilayah perkotaan. Pengelolaan sampah meliputi semua langkah yang diambil untuk menangani sampah sejak awal terbentuk hingga tahap pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah mencakup pengendalian jumlah sampah yang dihasilkan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. (Kartikawan, 2009).

Secara umum, pengelolaan sampah perkotaan terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Menurut Aboejoewono (1985), tahapan-tahapan ini menggambarkan proses pengelolaan sampah secara sederhana. Pengumpulan sampah merujuk pada proses pemindahan sampah dari tempat asalnya ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahap selanjutnya. Dalam proses ini, berbagai alat bantu digunakan, seperti tong sampah, bak sampah, kontainer, gerobak dorong, serta tempat pembuangan sementara (TPS). Kegiatan pengumpulan umumnya dilakukan oleh petugas yang mengumpulkan sampah pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Proses pengangkutan sampah dilakukan dengan memanfaatkan alat transportasi khusus untuk memindahkan sampah dari tempat pembuangan sementara menuju lokasi pembuangan akhir atau tempat pengolahan. Pada tahap ini, tenaga kerja juga berperan dalam mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Di tahap pembuangan akhir atau pengolahan, sampah diproses menggunakan metode fisik, kimia, dan biologis hingga seluruh tahapan penanganan selesai. Pengelolaan sampah di area perkotaan saat ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup rumit, termasuk meningkatnya volume sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan masalah yang muncul dalam proses pembuangan akhir sampah, yang sering kali menimbulkan isu tambahan.

2. Kerangka Teori

a. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan. Grindle mengidentifikasi dua variabel utama: isi kebijakan dan konteks implementasi. Kedua variabel ini saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Variabel isi kebijakan merujuk pada karakteristik internal dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Grindle mencatat beberapa dimensi penting yang relevan untuk analisis implementasi. Pertama, kepentingan yang terpengaruh menunjukkan seberapa jauh kebijakan memengaruhi berbagai kelompok, baik positif maupun negatif. Kebijakan yang menguntungkan banyak pihak cenderung lebih mudah diimplementasikan.

Selanjutnya, jenis manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan juga berperan penting. Manfaat bisa bersifat material, seperti insentif ekonomi, atau non-material, seperti lingkungan yang bersih. Manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat akan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan juga menjadi faktor kunci. Kebijakan yang mengharuskan perubahan perilaku besar akan lebih sulit diimplementasikan dibandingkan yang memerlukan penyesuaian kecil.

Lokasi pengambilan keputusan, baik yang terpusat maupun terdesentralisasi, juga memengaruhi implementasi. Desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal, tetapi memerlukan kapasitas yang adekuat di tingkat bawah.

Ketersediaan sumber daya, baik finansial, manusia, maupun teknis, juga memengaruhi implementasi kebijakan. Keterbatasan anggaran atau

kurangnya personel dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kebijakan.

Variabel konteks implementasi mengacu pada lingkungan eksternal tempat kebijakan diterapkan. Faktor-faktor seperti kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor dapat memengaruhi proses implementasi. Konflik kepentingan atau kurangnya koordinasi antaraktor dapat menghambat keberhasilan.

Karakteristik rezim dan institusi juga berperan dalam implementasi, termasuk struktur pemerintahan dan kapasitas birokrasi. Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam birokrasi dapat mendukung atau menghambat kebijakan.

Grindle berpendapat bahwa keberhasilan implementasi merupakan hasil interaksi dinamis antara isi kebijakan dan konteks implementasi. Kebijakan yang dirancang dengan baik mungkin gagal jika konteksnya tidak mendukung, dan sebaliknya. Dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis relevansi isi kebijakan serta pengaruh konteks dalam pelaksanaan kebijakan sampah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan. Melalui metode ini, kita dapat memahami dengan jelas bagaimana data diperoleh dan dianalisis. Dengan kata lain, metode penelitian memungkinkan kita untuk menelusuri jejak data dari sumbernya hingga menjadi informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan secara mendalam fenomena tata kelola sampah di Kecamatan Ngaliyan, serta untuk memahami perspektif dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut. Menurut Sugiyono (2010), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk

memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai suatu fenomena sosial dengan mengumpulkan data yang bersifat naratif.

Jenis penelitian ini berfokus pada deskripsi situasi nyata di lapangan, di mana peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen yang relevan. Data akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik pengelolaan sampah yang berlangsung, sedangkan dokumen yang dikumpulkan mencakup kebijakan, laporan, dan materi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara induktif, dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Proses analisis mengikuti langkah-langkah yang diusulkan oleh Sugiyono (2010), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi kebijakan dalam tata kelola sampah, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan praktik pengelolaan sampah yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tata kelola lingkungan, khususnya dalam konteks kolaborasi antar pemangku kepentingan.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu objek penelitian. Sementara itu, data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari pihak ketiga untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari objek utama

penelitian, yaitu Kecamatan Ngaliyan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber literatur, termasuk artikel, buku, jurnal penelitian sebelumnya, serta media cetak dan elektronik yang relevan dengan tema pengelolaan sampah perkotaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah krusial dalam setiap penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data tambahan yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono, metode yang tepat untuk mengumpulkan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Berikut adalah metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan data. Proses ini bisa dianggap sebagai dasar penelitian untuk mendapatkan fakta dan informasi dari objek yang diteliti. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat perilaku subjek, objek, atau gejala yang diamati (Sugiyono, 2010). Disini peneliti mengamati bagaimana implementasi kebijakan tata kelola sampah perkotaan yang ada di Kecamatan Ngaliyan.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dari narasumber kepada pewawancara, menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara mendalam atau deep interview. Studi ini melibatkan beberapa sumber, termasuk staff bagian pembangunan Kecamatan, Kasi pembangunan Kelurahan Ngaliyan, staff bidang 2 dan 4 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dan anggota masyarakat di wilayah Kecamatan Ngaliyan.

c. Dokumentasi

Data penelitian yang dikumpulkan melalui dokumentasi dapat berupa catatan tertulis, gambar, buku, atau video yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil dokumentasi ini digunakan sebagai data tambahan untuk penelitian. Dokumen seperti peraturan yang mengatur tentang tata kelola sampah perkotaan juga dapat termasuk gambar atau video yang diambil dari observasi di lokasi. (Creswell, 2014).

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara akan menjadi lebih relevan dan berguna setelah melalui proses interpretasi dan analisis. Analisis data merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam penelitian, di mana kegiatan ini meliputi pengorganisasian, pengelompokan, serta penelaahan hubungan antara data yang ada dengan teori yang digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian.

Menurut Sugiyono (2010), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada metode yang diajukan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan, tahap pertama yang dilakukan adalah reduksi data, yaitu dengan memilih dan merangkum data yang relevan atau berkaitan langsung dengan topik penelitian. Setelah data tersebut disusun, langkah berikutnya adalah penyajian data. Peneliti akan lebih mudah memahami langkah ini. Mereka juga dapat menganalisis hasil penelitian dari sajian data ini untuk merencanakan langkah analisis berikutnya. Setelah selesai dengan proses reduksi data

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian beserta rumusan masalah yang menjadi fokus utama. Selain itu, tujuan dan manfaat dari penelitian ini juga akan diuraikan. Bab ini juga mencakup penjelasan mengenai metode dan pendekatan yang

digunakan dalam penelitian, serta definisi dan konsep teori yang akan dijadikan sebagai dasar analisis. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kerangka kerja penelitian yang dilakukan.

BAB II TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Pada bab ini, akan dijelaskan berbagai teori yang telah disajikan dalam proposal sebelumnya. Penjelasan tersebut akan lebih mendalam, dengan menguraikan bagaimana teori-teori tersebut digunakan dan diterapkan dalam analisis data yang diperoleh dari penelitian. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan teori dalam konteks penelitian yang dilakukan.

BAB III LANDSCAPE KECAMATAN NGALIYAN

Pada bab ini menggambarkan secara umum tentang kondisi obyek penelitian, meliputi kondisi geografis kecamatan dan strategi tata kelola sampah di kecamatan Ngaliyan.

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN

Pada bab ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan.

BAB V ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN

Dalam bab ini menganalisis implementasi Perda tersebut sesuai aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan.

BAB VI DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN

Pada bab ini membahas terkait dampak dari implementasi Perda yang diterapkan di Kecamatan Ngaliyan.

BAB VII PENUTUP

Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari bab sebelumnya.

BAB II

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, di mana keputusan-keputusan yang telah dirumuskan diubah menjadi tindakan nyata. Grindle (1980) mendefinisikan implementasi sebagai "proses di mana kebijakan-kebijakan diubah menjadi program-program tindakan dan hasil-hasil yang nyata." Ini bukan sekadar proses administratif yang mekanis, melainkan arena kompleks yang melibatkan interaksi berbagai aktor, kepentingan, dan sumber daya. Keberhasilan suatu kebijakan seringkali tidak ditentukan pada tahap perumusan, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Proses ini melibatkan alokasi sumber daya, pembentukan atau penyesuaian struktur organisasi, serta pengembangan prosedur dan aturan operasional. Grindle menekankan bahwa implementasi adalah jembatan antara niat kebijakan (*policy intentions*) dan hasil kebijakan (*policy outcomes*), dan seringkali jembatan ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian.

B. Teori Implementasi Kebijakan Grindle

Merilee S. Grindle (1980), dalam karyanya "Politics and Policy Implementation in the Third World," menawarkan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan, khususnya di negara-negara berkembang. Grindle berargumen bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tidak dapat dijelaskan hanya dari satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi dinamis antara dua

variabel utama: Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*). Pendekatan ini dikenal sebagai model "top-down" yang mempertimbangkan faktor-faktor dari kebijakan itu sendiri dan lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan.

Grindle menekankan bahwa implementasi adalah proses politik yang melibatkan negosiasi, konflik, dan adaptasi. Oleh karena itu, analisis implementasi harus melampaui aspek teknis-administratif dan mempertimbangkan dimensi politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhinya. Berikut ini merupakan variabel yang ada pada teori ini:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Isi kebijakan mengacu pada karakteristik internal dari kebijakan itu sendiri yang dapat memengaruhi proses implementasinya. Grindle mengidentifikasi lima dimensi utama dari isi kebijakan:

- Kepentingan yang Terpengaruh (*Interests Affected*) dimensi ini merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi kepentingan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Kebijakan yang menguntungkan kelompok kuat atau yang merugikan kelompok yang memiliki kapasitas untuk menolak, akan menghadapi tantangan implementasi yang berbeda.
- Jenis Manfaat yang Dihasilkan (*Type of Benefits*) dimensi ini berkaitan dengan sifat manfaat yang diharapkan dari kebijakan. Apakah manfaat tersebut bersifat material (misalnya, insentif finansial, barang, atau layanan) atau non-material (misalnya, peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan, atau keadilan sosial). Manfaat yang bersifat langsung, nyata, dan material cenderung lebih mudah memobilisasi dukungan dibandingkan manfaat yang abstrak atau jangka panjang.
- Perubahan yang Diinginkan (*Extent of Change Envisioned*) dimensi ini mengukur seberapa besar perubahan yang diharapkan atau dituntut oleh kebijakan dari status quo. Kebijakan yang menuntut perubahan radikal dalam perilaku, struktur, atau alokasi sumber daya akan lebih sulit

diimplementasikan dibandingkan kebijakan yang hanya memerlukan penyesuaian inkremental.

- Lokasi Pengambilan Keputusan (*Location of Decision-Making*) dimensi ini merujuk pada tingkat sentralisasi atau desentralisasi dalam pengambilan keputusan terkait implementasi kebijakan. Apakah keputusan utama berada di tingkat pusat/kota, atau diberikan otonomi lebih kepada unit-unit di tingkat bawah (kecamatan, kelurahan, RT/RW). Desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga memerlukan kapasitas yang memadai di tingkat lokal.
- Sumber Daya yang Dialokasikan (*Resources Committed*) dimensi ini berkaitan dengan ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang dialokasikan untuk implementasi kebijakan, termasuk sumber daya finansial (anggaran), manusia (personel, keahlian), dan teknis (infrastruktur, peralatan). Keterbatasan sumber daya seringkali menjadi hambatan utama dalam implementasi.

2. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Konteks implementasi mengacu pada lingkungan eksternal di mana kebijakan tersebut dijalankan. Faktor-faktor ini berada di luar kendali langsung pembuat kebijakan, tetapi sangat memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dilaksanakan. Grindle mengidentifikasi empat dimensi utama dari konteks implementasi:

- Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat (*Power, Interests, and Strategies of Actors Involved*) dimensi ini menganalisis peran, pengaruh, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi. Aktor-aktor ini bisa berupa birokrat, kelompok kepentingan, masyarakat sipil, atau sektor swasta. Implementasi adalah arena politik di mana aktor-aktor ini berinteraksi, bernegosiasi, dan terkadang berkonflik untuk memengaruhi hasil kebijakan.
- Karakteristik Rezim dan Institusi (*Characteristics of the Regime and Institutions*) dimensi ini berkaitan dengan sifat sistem politik (rezim)

dan struktur institusional di mana kebijakan diimplementasikan. Ini mencakup tingkat stabilitas politik, kapasitas birokrasi, tingkat korupsi, dan norma-norma institusional yang berlaku. Institusi yang kuat dan stabil dengan birokrasi yang kompeten cenderung mendukung implementasi yang lebih efektif.

- Kepatuhan dan Responsivitas (*Compliance and Responsiveness*) dimensi ini mengukur sejauh mana target kelompok (misalnya, masyarakat) mematuhi kebijakan yang diimplementasikan, dan bagaimana implementor merespons umpan balik, keluhan, atau kebutuhan dari target kelompok. Tingkat kepatuhan masyarakat dan responsivitas pemerintah sangat penting untuk keberlanjutan implementasi.
- Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik (*Economic, Social, and Political Environment*) dimensi ini mencakup faktor-faktor makro yang memengaruhi implementasi, seperti kondisi ekonomi (tingkat pendapatan, pengangguran), struktur sosial (demografi, budaya, tingkat pendidikan), dan dinamika politik (dukungan politik, konflik). Faktor-faktor ini dapat menciptakan peluang atau hambatan bagi implementasi kebijakan.

C. Interaksi Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi

Grindle menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukanlah hasil dari salah satu variabel secara terpisah, melainkan dari interaksi kompleks antara isi kebijakan dan konteks implementasi. Dalam konteks ini, isi kebijakan mencakup berbagai elemen yang menjadi dasar peraturan, sedangkan konteks implementasi mencakup lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan. Kedua aspek ini saling berpengaruh dan menentukan efektivitas suatu kebijakan.

Kebijakan yang dirancang dengan baik, dengan isi yang jelas dan manfaat yang menarik, memiliki potensi untuk sukses. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan. Misalnya, jika sebuah kebijakan memiliki sumber daya yang memadai tetapi

tidak didukung oleh dukungan politik atau ada resistensi dari masyarakat, maka kebijakan tersebut bisa gagal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana isi kebijakan dan konteks implementasi saling berinteraksi.

Sebaliknya, kebijakan yang mungkin kurang sempurna dalam desainnya dapat sukses jika konteks implementasinya mendukung. Misalnya, jika masyarakat sangat mendukung suatu inisiatif meskipun kebijakan tersebut tidak ideal, hal ini dapat membantu mengatasi kelemahan dalam isi kebijakan. Oleh karena itu, tantangan dalam implementasi kebijakan sering kali lebih kompleks daripada yang terlihat, dan memerlukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang terlibat.

Dalam penelitian ini, Teori Implementasi Kebijakan Grindle akan menjadi lensa utama untuk menganalisis tata kelola sampah di Kecamatan Ngaliyan. Peneliti akan menggunakan PERDA No. 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar dalam menganalisis implementasi kebijakan ini. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana karakteristik kebijakan yang berlaku memengaruhi proses implementasinya.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi lingkungan implementasi di Kecamatan Ngaliyan. Ini mencakup peran berbagai aktor yang terlibat, struktur institusional yang ada, serta kondisi sosial-ekonomi yang membentuk dinamika implementasi kebijakan sampah. Dengan menganalisis elemen-elemen ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasi dalam pengelolaan sampah. Dengan menggunakan kerangka Grindle, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu implementasi kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan efektif, sehingga pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan dapat ditingkatkan.

BAB III

LANDSCAPE KECAMATAN NGALIYAN

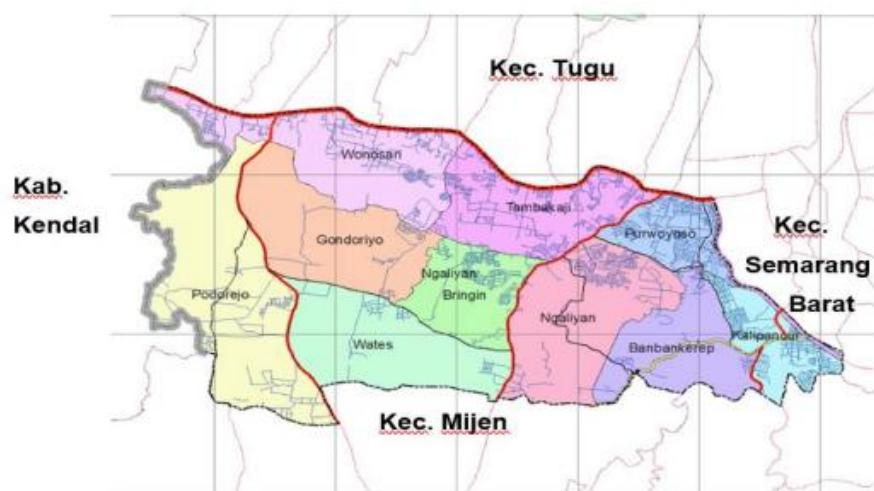
A. Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan dan Sampah Ngaliyan

1. Kondisi Geografis

Salah satu dari 16 kecamatan di Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah sebesar 42,99 km² dengan wilayah terluas pada Kelurahan Podorejo sebesar 8,14 km², dan Kelurahan Purwoyoso sebagai wilayah terkecil dengan 2,07 km². Kecamatan Ngaliyan terletak di daerah pinggiran sebelah barat Kota Semarang, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tugu Kota Semarang
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Mijen Kota Semarang
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Peta Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat pada hambar dibawah ini:



Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kecamatan Ngaliyan

Sumber: Monografi Kecamatan Ngaliyan

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, jumlah penduduk Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 143.602 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 3.340,54 jiwa per km². Wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah Kelurahan Kalipancur dengan 9.640 jiwa per km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah adalah Kelurahan Podorejo dengan 1.233,22 jiwa per km². Adapun rasio jenis kelamin pada Kecamatan Ngaliyan adalah 99,17, artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Tabel 3. 1 Tabel Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan, 2023.

Kelurahan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah total
Podorejo	4.997	5.047	10.044
Wates	2.976	3.055	6.031
Bringin	9.041	9.18	18.179
Ngaliyan	6.533	6.668	13.201
Bambankerep	3.180	3.139	6.319
Kalipancur	10.410	10.540	20.950
Purwoyoso	7.755	7.800	15.555
Tambak Aji	10.544	10.587	21.131
Gondoriyo	4.006	4.095	8.101
Wonosari	12.059	12.032	24.091
Ngaliyan	71.501	72.101	143.602

Sumber: Pemerintahan Kota Semarang

Tabel 3. 2 Tabel Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan 2023

Kelurahan	Kepala Keluarga
Podorejo	3.323
Wates	1.971
Bringin	5.660
Ngaliyan	4.505
Bambankerep	2.031
Kalipancur	6.885
Purwoyoso	5.353
Tambakaji	7.033
Gondoriyo	2.477
Wonosari	7.950
Ngaliyan	47.188

Sumber: Pemerintah Kota Semarang

3. Kondisi Pemerintahan Kecamatan Ngaliyan

Kecamatan Ngaliyan memiliki 10 wilayah administrasi kelurahan yang terbagi menjadi 130 RW dan 922 RT. Kelurahan dengan jumlah RT terbanyak berada di kelurahan Bringin yang terbagi menjadi 149 RT, sedangkan kelurahan dengan jumlah RT paling sedikit berada di kelurahan Babankerep yang terbagi menjadi 34 RT.

Pada periode akhir tahun 2023, Pegawai Negeri Sipil di Bawah Pemerintah Daerah Kecamatan Ngaliyan, baik yang bekerja di lingkungan kantor kecamatan maupun kantor kelurahan, ada sebanyak 85 pegawai, yang terdiri dari 44 pegawai laki-laki dan 41 pegawai perempuan. Jika dilihat menurut Golongan, jumlah pegawai negeri sipil pemerintah daerah Kecamatan Ngaliyan didominasi pada golongan III (56 pegawai).

Tabel 3. 3 Tabel Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Ngaliyan

Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
Podorejo	12	61
Wates	8	48
Bringin	22	149
Ngaliyan	12	90
Banbankerep	5	34
Kalipancur	13	126
Purwoyoso	14	95
Tambakaji	16	122
Gondoriyo	12	66
Wonosari	16	131
Ngaliyan	130	922

Sumber: Pemerintah Kota Semarang

4. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Kecamatan Ngaliyan memiliki fasilitas pendidikan dasar yang cukup lengkap. Pendidikan tersebar di semua kelurahan di Kecamatan Ngaliyan. Dari 10 kelurahan pada tahun 2023, 9 kelurahan memiliki SD, 8 kelurahan memiliki MI, 6 kelurahan memiliki SMP, 4 kelurahan memiliki MT, 2 kelurahan memiliki SMA, 3 kelurahan memiliki SMK, 3 kelurahan memiliki MA, dan 2 kelurahan memiliki Akademi/Perguruan Tinggi.

Sumber daya kesehatan sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dan data kesehatan membantu menentukan kebutuhan akan layanan kesehatan. Dari 10 kelurahan, dua di antaranya memiliki rumah sakit, tidak ada yang memiliki rumah sakit bersalin, 7 di antaranya memiliki poliklinik atau balai pengobatan, 1 di antaranya memiliki puskesmas rawat inap, 2 di antaranya memiliki puskesmas tanpa rawat inap, dan 8 di antaranya memiliki apotek.

Rumah adalah bangunan yang digunakan oleh keluarga untuk hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan melakukan hal-hal lainnya. Hasil pendataan potensi desa menunjukkan bahwa semua rumah di Kecamatan Ngaliyan telah menggunakan fasilitas penerangan jalan yang diberikan oleh PLN. Jalan utama di seluruh kelurahan juga telah menggunakan penerangan jalan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk kegiatan memasak keluarga, dapur harus ada di setiap rumah. Sebagian besar keluarga di Kecamatan Ngaliyan memasak menggunakan bahan bakar LPG 3 kg sebagai bahan bakar utama. Air yang digunakan untuk minum setiap hari adalah fasilitas perumahan tambahan. Sebagian besar keluarga menggunakan air isi ulang, dan sebagian besar keluarga menggunakan sumur bor atau pompa sebagai sumber air minum utama mereka.

5. Visi Misi Kecamatan Ngaliyan

Visi adalah gambaran yang jelas dan inspiratif tentang masa depan yang diinginkan, yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Dalam konteks individu atau organisasi, visi berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan semua usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang. Visi yang baik tidak hanya mencerminkan aspirasi, tetapi juga menciptakan motivasi dan semangat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memiliki visi yang kuat, seseorang atau suatu kelompok dapat lebih fokus dan berkomitmen dalam mencapai cita-cita yang diimpikan, meskipun menghadapi berbagai tantangan di sepanjang jalan.

Kecamatan Ngaliyan dalam plaksanaannya memiliki visi sebagai berikut:

**“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju,
Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif”**

Dalam menjalankan visi tersebut diperlukan sebuah misi guna mengoptimalkan tujuan dari sebuah visi. Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan tujuan utama dan alasan keberadaan suatu individu atau organisasi. Misi berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan sehari-hari dan

keputusan strategis, mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang dianut. Dalam konteks organisasi, misi memberikan arah yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya, serta menciptakan keselarasan di antara anggota tim. Dengan memiliki misi yang kuat, sebuah organisasi dapat menegaskan identitasnya, meningkatkan fokus pada kegiatan yang relevan, dan membangun komitmen untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan visi yang dijalankan. Berikut ini merupakan misi dari Kecamatan Ngaliyan:

- Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan social masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.
- Mewujudkan Kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
- Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak.
- Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya local, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital.
- Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan.
- Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang Tangguh berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir rob, serta dampaknya bagi masyarakat.
- Mewujudkan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas.

6. Sampah Kecamatan Ngaliyan

Kecamatan Ngaliyan menghasilkan 270,98 m³ sampah, atau 38,2% dari total sampah Kota Semarang. Per orang pada Kecamatan Ngaliyan menghasilkan sekitar 70 kg sampah pertahunnya. Hal tersebut terjadi seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat.

Sistem pengelolaan sampah di Ngaliyan masih bergantung pada metode konvensional, di mana sampah dikumpulkan dan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. Namun, kapasitas TPA ini sering kali melebihi batas, sehingga menyebabkan masalah pencemaran dan bau tidak sedap yang mengganggu warga sekitar. Berita terbaru dari Semarang Post menyebutkan bahwa TPA Jatibarang sudah tidak mampu menampung volume sampah yang terus meningkat, sehingga diperlukan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini (Semarang Post, 2023).

Kekurangan infrastruktur yang signifikan dalam pengelolaan sampahnya, yang termanifestasi dalam beberapa aspek krusial. Keterbatasan kapasitas dan kondisi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), termasuk TPS3R, menjadi kendala utama, sering kali menyebabkan penumpukan sampah melebihi daya tampung. Selain itu, kurangnya fasilitas pemilahan sampah yang memadai di tingkat masyarakat maupun di TPS menghambat proses daur ulang dan yang lebih efektif. Minimnya jumlah kontainer sampah yang terdistribusi secara merata di seluruh wilayah kecamatan juga menyulitkan masyarakat dalam membuang sampah dengan benar. Lebih lanjut, infrastruktur pengolahan sampah yang lebih canggih dan terintegrasi, seperti fasilitas pengomposan skala besar atau unit pengolahan sampah menjadi energi, masih sangat terbatas atau belum tersedia di tingkat kecamatan, sehingga sebagian besar sampah akhirnya bergantung pada pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin penuh.

Urgensi efektivitas pengelolaan sampah semakin mendesak. Dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk

menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dan regulasi yang diperlukan, sementara masyarakat berperan aktif dalam pemilahan dan pengurangan sampah di tingkat rumah tangga.

Di sisi lain, ada baiknya sektor swasta dapat berkontribusi melalui inovasi teknologi dan praktik daur ulang yang efisien bukan hanya dalam pengangkutan. Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Ngaliyan.

7. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang efektif. Dalam peraturan ini, diatur berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan hingga pemrosesan akhir. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Salah satu pokok bahasan dalam Perda ini adalah pengelompokan sampah menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan anorganik. Masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, sehingga memudahkan proses pengelolaan selanjutnya. Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi fokus utama dalam pengelolaan sampah, di mana masyarakat diajak untuk mengurangi jumlah sampah, menggunakan kembali barang-barang, dan mendaur ulang material yang masih dapat dimanfaatkan.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, pemerintah berperan aktif dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini mencakup tempat pembuangan sampah, bank sampah, dan fasilitas daur ulang. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara-cara

pengelolaan sampah yang benar, agar masyarakat lebih paham dan terlibat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Perda ini juga menetapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan pemilahan dan pengelolaan sampah. Sanksi tersebut dapat berupa denda atau tindakan administratif lainnya. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang baik.

Dalam pelaksanaannya, Perda ini membuka peluang bagi kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, serta masyarakat. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, dengan melibatkan berbagai aktor dalam proses tersebut. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan sektor swasta.

Akhirnya, Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2012 menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Semarang. Dengan pendekatan yang terencana dan melibatkan semua pihak, diharapkan lingkungan kota dapat terjaga kebersihannya, serta masalah sampah dapat diatasi secara berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Kota Semarang.

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN

A. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngaliyan

Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem perkotaan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan, volume sampah yang dihasilkan juga semakin besar. Jika tidak dikelola secara efektif dan partisipatif, sampah dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan, penyakit, serta ancaman bagi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dipandang sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik.

Di Kota Semarang, kerangka hukum untuk pengelolaan sampah telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini mengamanatkan berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, penanganan, hingga peran serta tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu wilayah urban dengan tingkat penduduk yang tinggi. Dengan tingkat penduduk yang tinggi tentu hal tersebut berpengaruh dengan kenaikan sampah yang tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan kenaikan jumlah timbulan sampah yang terjadi setiap tahunnya. Berikut jumlah timbulan sampah pertahun di Kota Semarang.



Gambar 4. 1 Jumlah Timbulan Sampah Tahunan

Sumber: SIPSN DLH

Jika dibagikan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Ngaliyan sebesar 142.845, rata- rata penduduk kecamatan Ngaliyan menghasilkan 3.017–3.040 kg sampah per tahun, atau sekitar 8,3–8,4 kg sampah per hari per orang. Jika tidak dikelola dengan baik tentunya, kenaikan ini akan terus menerus terjadi yang menimbulkan beberapa masalah baik lingkungan dan kesehatan.

Proses pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan melibatkan banyak aktor. Dimulai dari pemilahan dari rumah tangga, pengangkutan dari sampah rumah tangga ke TPS lalu ke TPA dan pemanfaatan bank sampah sebagai proses daur ulang. Hal tersebut menjadi tombak utama Kecamatan Ngaliyan dalam menghadapi peningkatan sampah yang semakin naik tiap tahunnya.

B. Tahapan Proses Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda No. 06 Tahun 2012

Proses pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan dapat dipahami sebagai tahapan implementasi dari Perda No. 06 Tahun 2012, yang bertujuan mengurangi volume sampah di tingkat urban. Dimulai dari tingkat sumber sampai sampah tersebut terurai atau terkelola dengan baik. Tracking sampah menjadi bagian yang harus diperhatikan agar terpantau pergi nyany kemana. Hasil yang ditemukan dari proses pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan meliputi:

1. Pemilihan Sampah di Tingkat Rumah Tangga (Amanat Perda Pasal 13)

Pemilihan sampah di tingkat rumah tangga merupakan langkah kritis yang diamanatkan dalam Perda No. 06 Tahun 2012, khususnya Pasal 13 yang mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemilihan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pemilihan sampah di rumah tangga bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Warga didorong untuk menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) sebelum membuang sampah ke tempat pembuangan.

Penerapan prinsip 3R di tingkat rumah tangga dapat secara signifikan mengurangi jumlah sampah yang harus dikelola di tingkat kota. Reduce atau pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai dan memilih produk dengan kemasan yang minimalis. Reuse atau penggunaan kembali barang-barang yang masih layak pakai dapat memperpanjang umur suatu barang dan mengurangi kebutuhan akan barang baru. Recycle atau daur ulang sampah melibatkan pengolahan sampah menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan kembali dalam proses produksi (Putranto, 2023).

Pemilihan sampah di rumah tangga idealnya dilakukan dengan memisahkan sampah organik (sisa makanan, daun-daunan) dari sampah anorganik (plastik, kertas, logam, kaca) dan sampah berbahaya (baterai, lampu bekas). Sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk pertanian atau perkebunan, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi produk baru yang bernilai ekonomi. Pemilihan sampah yang benar memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh anggota keluarga, serta dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk sosialisasi, edukasi, dan penyediaan fasilitas pemilihan sampah yang memadai (Widiarti, 2012).

Pemilihan ini sangat diperlukan pasalnya menurut data dari DLH komposisi sampah berdasarkan jumlah sampah paling banyak dihasilkan oleh sampah rumah tangga dengan 72.00 ton per tahunnya. Dengan sisa

makanan menjadi komposisi sampah paling banyak sebesar 60,80%. Hal tersebut menunjukan bahwa pemilahan sampah dari rumah tangga menjadi tombak utama pemilahan dari sumber sebelum dibuang ke tempat sampah yang ada di rumah tangga.

Dengan demikian, pemilahan sampah dari rumah tangga bukan hanya sekadar tindakan individual, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya kolektif untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keberhasilan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga akan berdampak positif pada efisiensi pengelolaan sampah di tingkat kota, mengurangi beban TPA, dan meningkatkan nilai ekonomi sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.

2. Pengangkutan Sampah (Amanat Perda Pasal 16)

Proses pengangkutan sampah di Kota Semarang merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah yang komprehensif, yang diatur dalam Perda No. 06 Tahun 2012, khususnya Pasal 16 yang mengatur tentang pengangkutan sampah. Proses ini dimulai dengan pengumpulan sampah dari rumah tangga dan tempat penampungan sementara (TPS/TPST). Sampah yang telah dikumpulkan kemudian diangkut menggunakan truk sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. Untuk mendukung proses ini, Kota Semarang memiliki armada truk sampah yang terdiri dari 110 unit keluaran tahun 2012-2017 serta 30 unit keluaran tahun 2018-2025, yang beroperasi secara rutin untuk memastikan pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, alur pengangkutan sampah di lokasi penelitian mengikuti pola sebagai berikut:

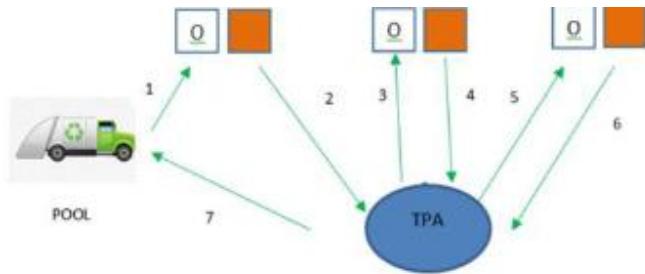
a. Tahap Pertama (Rumah Tangga ke TPS):

- Masyarakat membuang sampah yang telah dipilah ke dalam tong sampah terpisah (organik-anorganik) di depan rumah.
- LSM atau petugas lingkungan setempat melakukan pengumpulan menggunakan mobil pick up sampah.

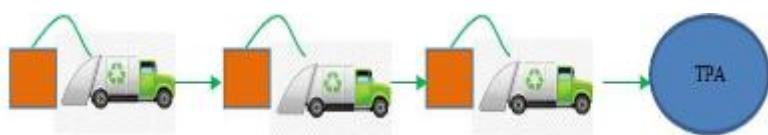
- Sampah diangkut ke 10 TPS yang tersebar di 5 Kelurahan dengan frekuensi 2-3 kali seminggu.
- b. Tahap Kedua (TPS ke TPA):
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau operator swasta mengangkut sampah dari TPS menggunakan truk sampah.
 - Pengangkutan dilakukan dengan jadwal tetap setiap hari dengan frekuensi 2-3 kali perhari tergantung volume sampah.
 - Sampah dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk pemrosesan lebih lanjut

Pola pengangkutan sampah di Kecamatan Ngaliyan mengadopsi dua metode, yaitu HCS (*Hauled Container System*). Rute pengangkutan dimulai dari pool menuju TPS 1, kemudian ke TPA, dilanjutkan ke TPS 2, dan kembali ke TPA sebelum kembali ke pool. Kendaraan berangkat dari pool dengan membawa kontainer kosong ke lokasi TPS 1, di mana kontainer kosong akan ditukar dengan kontainer penuh yang ada di TPS dan langsung diangkut ke TPA. Setelah mengosongkan kontainer di TPA, kendaraan akan menuju TPS berikutnya untuk mengganti kontainer penuh dan kembali membuangnya ke TPA. Proses ini terus berlanjut hingga semua TPS dilayani, setelah itu kendaraan kembali ke pool dengan membawa kontainer kosong.

Pola kedua, yaitu SCS (*Stationary Container System*), diterapkan dengan rute pengangkutan dari pool menuju TPS, kemudian TPS, lalu TPA, dan kembali ke pool. Kendaraan berangkat dari pool untuk mengumpulkan sampah yang diletakkan di pinggir jalan, kemudian menuju TPS 1, di mana sampah tersebut dimasukkan ke dalam truk dump. Setelah itu, kendaraan bergerak ke TPS 2 dan seterusnya hingga truk dump penuh, lalu langsung membuangnya ke TPA. Proses ini dilanjutkan hingga semua TPS terlayani, sebelum kendaraan kembali ke pool dengan kontainer kosong.



Gambar 4. 2 Pola Pengangkutan HCS (*Hauled Container System*)



Gambar 4. 3 Pola Pengangkutan SCS (*Stationary Container System*)

Sumber: *Jurnal Teknik Lingkungan* (Arumdani et al., 2022)

Kecamatan Ngaliyan memiliki dua rute pengangkutan, yaitu rute atas melalui Jl. Mochamad Ihsan dan rute bawah melalui Jl. Siliwangi. Kedua rute ini bertemu di Jl. Untung Suropati. Rute atas memerlukan waktu lebih lama karena jalannya yang memutar, sementara rute bawah sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu, khususnya di Jl. Siliwangi dan Jl. Abdul Rahman Saleh. Rute atas dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah dari Kelurahan Ngaliyan dan Wates, sedangkan rute bawah dilalui oleh kendaraan dari Kelurahan Purwoyoso dan Tambak Aji. Kendaraan dari Kelurahan Wonosari menggunakan kedua rute tersebut. Total jarak pengangkutan untuk kendaraan arm roll mencapai 255,92 km per hari dengan kecepatan 20,35 km per jam, sedangkan untuk dump truck adalah 61,3 km per hari dengan kecepatan rata-rata 13,58 km per jam (Arumdani et al., 2022).



Gambar 4.4 Pola Pengangkutan Sampah Kecamatan Ngaliyan

3. Pemanfaatan Bank Sampah sebagai Pusat Daur Ulang (Amanat Perda Pasal 14)

Pemanfaatan bank sampah sebagai pusat daur ulang merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang secara eksplisit didorong oleh Perda No. 06 Tahun 2012, khususnya Pasal 14 yang mendorong pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, keberadaan bank sampah memiliki peran ganda yakni; Nilai Ekologis, mengurangi timbulan sampah yang berakhir di TPA dan Nilai Ekonomis, Menciptakan nilai tambah dari material sampah. Bank sampah juga menjadi salah satu upaya untuk mengelola sampah dan mampu menangani sekitar 0,34% dari total timbunan sampah nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Kota Semarang tercatat memiliki 664 bank sampah unit aktif dan satu Bank Sampah Induk (BSI) DLH Kota Semarang. Perbedaan kedua bank sampah tersebut hanya berdasarkan bentuk dan pengelolaannya saja. Jika

BSI sebagai pusat dari pengelolaan sampah ditingkat wilayah dengan memilah sampah yang sudah diolah oleh bank sampah unit. Sementara bank sampah unit hanya sebagai perwakilan di tingkat masyarakat dengan memilah sampah dengan cakupan rumah tangga.

Pengeloaan sampah pada bank sampah induk terbukti efektif dengan data pada tahun 2024 jumlah sampah sebanyak 131.80 ton/tahun yang masuk dengan sampah yang terkelola pada jumlah yang sama. Sementara untuk bank sampah unit ada Bina Lestari dengan jumlah sampah yang masuk 2,017,140.00 ton/tahun dengan jumlah sampah dikelola yang sama. Untuk Kecamatan Ngaliyan sendiri ada bank sampah Melati dengan sampah yang masuk dan terkelola sebanyak 349.56 ton/tahun. (DLH Kota Semarang)

Mekanisme operasional bank sampah dimulai dengan sosialisasi kepada warga mengenai pentingnya pemilahan sampah di sumbernya. Masyarakat diajari untuk memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengenali jenis-jenis sampah yang dapat didaur ulang. Setelah sosialisasi, warga diimbau untuk menyetor sampah yang telah dipilah ke bank sampah. Setiap jenis sampah anorganik, seperti plastik, kertas, dan logam, akan ditimbang dan dicatat. Proses ini tidak hanya memberikan informasi tentang jumlah sampah yang berhasil dipilah, tetapi juga memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Setiap penyetoran akan mendapatkan poin atau imbalan sesuai dengan berat dan jenis sampah yang disetorkan, yang dapat ditukar dengan uang tunai atau barang.



Gambar 4.5 Setoran Sampah ke Bank Sampah

Bank sampah kemudian melakukan pengolahan terhadap sampah yang diterima. Sampah yang sudah terkumpul akan dipilah lebih lanjut untuk memastikan kualitas dan jenisnya. Sampah yang layak untuk didaur ulang akan diberikan ke pengepul. Proses ini membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan mendukung konsep ekonomi sirkular.

Selain itu, bank sampah juga berperan sebagai pusat edukasi bagi masyarakat. Melalui pelatihan dan workshop, warga diberikan pemahaman tentang cara mengelola sampah dengan baik, manfaat daur ulang, dan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan demikian, bank sampah tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan sampah, tetapi juga sebagai pendorong kesadaran lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

C. Hambatan Implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 dalam Pengelolaan Sampah

Implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Terdapatnya hambatan baik dalam segi struktural (anggaran) dan juga kultural (kesadaran). Hambatan-hambatan ini dapat dianalisis secara mendalam melalui lensa Teori Implementasi Kebijakan Grindle, yang menekankan pentingnya interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasi. Berikut beberapa hambatan yang dihadapi:

1. Hambatan dari Isi Kebijakan (Perda No. 06 Tahun 2012)

Meskipun Perda No. 06 Tahun 2012 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan sampah di Kota Semarang, beberapa karakteristiknya sebagai isi kebijakan masih menimbulkan tantangan dalam implementasinya. Berikut ini merupakan beberapa hambatan yang dihadapi:

- Sumber Daya yang Dialokasikan: Perda mengamanatkan pengelolaan sampah yang komprehensif, namun alokasi anggaran yang minim menjadi kendala struktural. Menurut Peraturan Daerah

nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Pemerintah Kota Semarang, rata-rata pertahun dari penggunaan APBD dalam pengelolaan sampah hanya sebanyak Rp 83 Miliar, yang berarti hanya sekitar 1,5% dari APBD. Hal ini jauh di bawah ideal 8-10% yang dibutuhkan untuk sistem yang memadai (Kaza et al., 2018). Keterbatasan ini membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas memadai, insentif, dan SDM yang cukup untuk mendukung implementasi Perda secara menyeluruh.

- Perubahan yang Diinginkan: Perda menuntut perubahan perilaku yang signifikan dari masyarakat, yaitu pemilahan sampah dari sumbernya. Namun, tingkat kesulitan perubahan ini seringkali tidak diimbangi dengan strategi implementasi yang memadai, seperti edukasi berkelanjutan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses.

2. Hambatan dari Konteks Implementasi

Kondisi di lapangan pada Kecamatan Ngaliyan juga menunjukkan hambatan kultural dan struktural yang memengaruhi implementasi Perda. Dalam praktiknya hambatan ini masih menjadi faktor utama dalam proses implementasi yang dilakukan. Berikut ini merupakan hambatan yang mempengaruhi implementasi:

- Kepatuhan dan Responsivitas Target Kelompok (Masyarakat): Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi tantangan besar. Perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti membakar sampah atau tidak memilahnya, menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap amanat Perda. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan juga memperburuk masalah ini. Budaya konsumtif masyarakat perkotaan yang gemar produk sekali pakai semakin memperparah timbulan sampah.
- Karakteristik Rezim dan Institusi: Program bank sampah di Kecamatan Ngaliyan yang telah memiliki 80 unit, masih

menghadapi berbagai tantangan. Keberhasilan program ini terhambat oleh minimnya fasilitasi dan edukasi dalam pengadaan bank sampah, serta kurangnya promosi yang aktif untuk menarik minat masyarakat. Tanpa adanya insentif yang jelas, masyarakat cenderung kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, sehingga potensi program ini tidak dapat dimaksimalkan.

- Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor: Fragmentasi kolaborasi antar pemangku kepentingan masih menjadi isu. Meskipun kemitraan pemerintah-swasta sudah dimulai (misalnya dengan PT Narpati), cakupannya masih terbatas pada sektor pengangkutan tanpa integrasi menyeluruh dengan bank sampah atau pelaku daur ulang. Model kolaborasi yang ada lebih bersifat proyek temporer daripada sistem kelembagaan yang berkelanjutan. Ironisnya, para aktor kunci seperti pengepul yang menjadi tulang punggung daur ulang justru tidak memiliki insentif yang memadai.

Interaksi kedua hambatan ini menciptakan lingkaran yang tidak ada habisnya. Minimnya infrastruktur (struktural, terkait isi kebijakan) menyebabkan masyarakat kesulitan membuang sampah secara benar, yang kemudian memperkuat perilaku negatif (kultural, terkait konteks implementasi). Sebaliknya, resistensi masyarakat terhadap perubahan (kultural) membuat pembenahan sistem (struktural) menjadi tidak efektif. Contohnya terlihat ketika pemerintah menyediakan tong sampah terpilah, tetapi karena kurangnya edukasi (kultural) dan pengawasan (struktural), warga tetap mencampur semua jenis sampah, membuat investasi infrastruktur menjadi sia-sia. Solusi yang holistik harus menjawab kedua dimensi sekaligus. Di level struktural, diperlukan reformasi kebijakan pendanaan dan penguatan kelembagaan kolaborasi. Sementara di level kultural, pendekatan edukasi harus lebih partisipatif dan berkelanjutan, tidak sekadar sosialisasi temporer. Hanya dengan pendekatan terintegrasi yang menyentuh aspek struktural dan kultural

secara simultan, transformasi sistem pengelolaan sampah perkotaan dapat terwujud secara berkelanjutan, sesuai dengan tujuan Perda.



Gambar 4.6 Pencampuran sampah

BAB V

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN

A. Identifikasi Aktor Utama dalam Implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan

1. Pemerintah Kecamatan Ngaliyan

Pemerintah Kecamatan Ngaliyan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan tata kelola sampah di wilayahnya. Sebagai ujung tombak pemerintahan daerah tingkat mikro, camat dan jajarannya menjadi koordinator dalam penerjemahan kebijakan Kota Semarang ke dalam praktik lapangan.

Sebagai institusi publik, Pemerintah Kecamatan Ngaliyan memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, memfasilitasi, serta mengevaluasi program pengelolaan sampah yang sesuai dengan regulasi daerah seperti Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, serta partisipasi aktif masyarakat dan mitra kolaborator. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moezar Lazuardy Islamy, S.STP, selaku Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Ngaliyan ia menyampaikan bahwa:

“Dalam pengelolaan sampah, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh partisipasi masyarakat, serta sinergi dengan instansi lain seperti Kelurahan dan DLH.” (wawancara Moedzar 5 Mei 2025)

Kecamatan Ngaliyan saat ini diisi oleh sebanyak 37 orang aparatur sipil negara, yang dibagi menjadi enam bidang sesuai dengan kemampuan dan fungsinya masing-masing, yaitu: Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi

Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, dan Seksi Kenyamanan dan Ketertiban Umum. Dalam konteks pengelolaan sampah, tanggung jawab utama dilimpahkan kepada Seksi Pembangunan.

“Kalo untuk program masalah sampah ya mas, kami ada penyuluhan tentang bank sampah, jadi mengedukasi masyarakatlah terkait pentingnya bank sampah. Terus ada program K3, itu untuk penyapuan jalan protokol. Kita lagi nyoba juga kembanging program kita yang baru baru ini kita rilis yaitu pilot project.”
(wawancara Moedzar 5 Mei 2025)

Pemerintah Kecamatan Ngaliyan menjalankan program penyuluhan dan pengimbauan kepada masyarakat untuk membentuk bank sampah di setiap kelurahan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Saat ini, tercatat ada 15 bank sampah yang tersebar di 10 kelurahan di wilayah Kecamatan Ngaliyan. Bank sampah ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah.

Keberadaan bank sampah di Kecamatan Ngaliyan diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, diharapkan dapat mengurangi beban TPA Jatibarang, yang direncanakan akan ditutup pada tahun 2027. Menurut penelitian oleh Kaza et al., (2018), pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, seperti bank sampah, terbukti efektif dalam mengurangi volume limbah yang masuk ke TPA sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu lingkungan.

Melalui program Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban (K3), program ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah di area publik, sekaligus meningkatkan estetika dan kenyamanan lingkungan. Penyapuan jalan

protokol tidak hanya menghilangkan sampah yang terlihat, tetapi juga mencegah penumpukan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran dan masalah kesehatan masyarakat. Dalam implementasinya, Kecamatan Ngaliyan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang untuk memastikan bahwa program K3 dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih luas. Kerjasama ini mencakup penyediaan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan, serta pelatihan bagi petugas kebersihan untuk meningkatkan efektivitas operasional. Penelitian oleh Scheinberg et al., (2016) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang responsif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kecamatan Ngaliyan telah meluncurkan sebuah pilot project, yaitu program pemilahan sampah dari rumah. Inisiatif ini sejalan dengan Surat Edaran Nomor B/576/600.4.15/III/2025 tentang Gerakan Pilah Sampah dari Rumah, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Program ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meningkatkan efisiensi proses daur ulang. Menurut penelitian oleh Kaza et al. (2018), pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dapat meningkatkan kualitas material yang didaur ulang dan mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh sampah yang tidak terkelola dengan baik.

Dalam implementasinya, program pemilahan sampah dari rumah di Kecamatan Ngaliyan melibatkan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Pemerintah kecamatan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dan cara yang tepat untuk melakukannya. Penelitian oleh Wilson & Velis, (2015) menunjukkan bahwa edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam program-program lingkungan. Melalui kampanye informasi dan pelatihan, warga

diajak untuk memahami perbedaan antara sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya, serta cara pembuangannya yang benar.

Pemerintah Kecamatan Ngaliyan juga menjembatani forum yang berisikan beberapa aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah seperti Kelurahan, bank sampah, dan masyarakat. Walaupun baru terjadi sekali, namun pemerintah Kecamatan berkomitmen untuk terus mengusahakan hal tersebut guna terciptanya kolaborasi yang efektif dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut tentunya menjadi sinyal positif untuk keberlanjutan pengelolaan sampah yang lebih baik.



Gambar 5. 1 Forum Pengelolaan Sampah yang Diadakan Kecamatan

Namun demikian, kendala struktural tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan implementasi tersebut. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran, yang menyebabkan Pemerintah Kecamatan tidak mampu memberikan fasilitasi kepada masyarakat atau bank sampah yang aktif dalam pengelolaan sampah.

Selain keterbatasan anggaran, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah juga menjadi tantangan serius. Masih banyak warga yang belum memahami pentingnya menjaga lingkungan dengan membuang dan memilah sampah secara benar. Hal tersebut tentunya menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Ngaliyan ini.

2. Kelurahan Ngaliyan

Kelurahan merupakan salah satu aktor penting dalam implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 karena menjadi titik temu antara kebijakan pemerintah daerah dan implementasi di tingkat masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah perkotaan, kelurahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal. Sebagai institusi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kelurahan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, serta aktor utama dalam mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Asih et al., 2022).

Pihak Kelurahan mengakui bahwa fokus pada pengelolaan sampah mulai ditekankan secara lebih serius setelah dilantiknya walikota baru yang memiliki komitmen kuat terhadap isu persampahan. Walaupun tidak ada program kerja spesifik terkait persampahan, namun pihak Kelurahan gencar mensosialisasikan tentang sampah kepada masyarakat. Monitoring terhadap beberapa bank sampah yang ada di kelurahan juga menjadi fokus dari Kelurahan.

"Kami mulai lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat, khususnya ke ibu-ibu PKK dan bank sampah di wilayah kami. (wawancara, Fitri 6 Mei 2025)

Salah satu bentuk aktivitas penting yang dilakukan oleh kelurahan adalah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah sejak dini. Kegiatan ini umumnya melibatkan ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) sebagai kelompok yang sangat potensial dalam menyebarluaskan informasi ke tingkat rumah tangga. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis tentang jenis-jenis sampah (organik, anorganik, B3, dll.), tetapi juga membentuk kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya pengurangan volume sampah melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle.



Gambar 5. 2 Sosialisasi dan Penyuluhan Pilah Sampah

Selain itu, kelurahan juga turut aktif dalam memonitoring operasional bank sampah di wilayahnya. Bank sampah merupakan salah satu model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah terbukti efektif meningkatkan nilai ekonomi sampah sekaligus mengurangi beban TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Dengan melakukan monitoring berkala, kelurahan dapat memastikan bahwa bank sampah beroperasi secara transparan, efektif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi (Suryani, 2014).



Gambar 5. 3 Monitoring Bank Sampah Melati

Dengan melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring bank sampah secara terpadu, kelurahan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat, khususnya Ibu-ibu PKK, serta dukungan dari

pemerintah kelurahan, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, kelurahan perlu terus meningkatkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan peran ini secara optimal (Wahyudin et al., 2017).

"Untuk hambatan mungkin ya masih kurangnya kesadaran masyarakat si mas terkait pilah pilih sampah. Kami seringkali harus meyakinkan warga bahwasannya sampah bisa bernilai ekonomi jika dikelola dengan benar. Untuk fasilitas selama ini kami hanya bisa membantu mengajukan fasilitas yang diminta oleh bank sampah, karena kami sendiri tidak memiliki anggaran khusus." (wawancara, Fitri 6 Mei 2025)

Dalam upaya pengelolaan sampah, kelurahan menghadapi beberapa hambatan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah. Meskipun program penyuluhan telah dilaksanakan, seringkali masyarakat masih belum sepenuhnya memahami bahwa sampah yang dikelola dengan baik dapat memiliki nilai ekonomi. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah dapat menghambat efektivitas program-program pengelolaan sampah, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kreatif dan partisipatif untuk mendorong perubahan perilaku.

Kelurahan juga menyadari bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan strategi komunikasi yang efektif. Misalnya, dengan menunjukkan contoh konkret tentang bagaimana sampah dapat diubah menjadi bahan yang bernilai, seperti kompos dari sampah organik atau produk daur ulang dari sampah anorganik. Dikarenakan memberikan informasi yang jelas dan demonstrasi praktis dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah.

Di sisi lain, terkait fasilitas, kelurahan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu pengajuan fasilitas yang diminta oleh bank sampah, meskipun terbatas oleh anggaran yang ada. Dalam konteks ini, dukungan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk keberhasilan bank

sampah. Tanpa adanya fasilitas yang cukup, seperti tempat sampah terpisah dan alat pengolahan, program pemilahan sampah di tingkat rumah tangga akan sulit untuk diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, kerjasama antara kelurahan, bank sampah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang termasuk Kecamatan Ngaliyan. Instansi ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam hal pengelolaan sampah. Mulai dari pengangkutan, pemilahan, serta penyuluhan DLH berperan penting dalam menyukseskan pengelolaan sampah yang lebih baik lagi tentunya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang memegang peranan kunci dalam tata kelola dan pengelolaan sampah perkotaan. DLH memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DLH Kota Semarang memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pelayanan publik di bidang lingkungan hidup.

“Kami dari bidang 2 bertugas melakukan pengangkutan secara berkala menggunakan truk-truk milik DLH atau mitra swasta. Jumlah frekuensi pengangkutan disesuaikan dengan kapasitas TPS dan volume sampah harian. Selain itu kita juga bertugas melakukan penyapuan jalan dan kita juga buka retribusi buat pengangkutan sampah.” (wawancara, Ika 3 Juni 2025)

Tugas utama DLH mencakup pengkoordinasian dan pelaksanaan pengumpulan serta pengangkutan sampah dari sumbernya menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Saat ini, terdapat 10 Tempat Pembuangan

Sementara (TPS) yang tersebar di wilayah Kecamatan Ngaliyan, yang berfungsi sebagai titik kumpul sebelum sampah diangkut ke TPA. Keberadaan TPS yang strategis sangat penting untuk meminimalkan waktu dan jarak pengangkutan sampah, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan sampah (Muliyadi et al., 2023).



Gambar 5. 4 Armada Truck Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Instagram @dlh.semarang

DLH juga bertanggung jawab atas penyediaan armada truk sampah yang memadai dan penjadwalan pengangkutan harian. Proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan secara periodik, dengan rata-rata frekuensi 2–3 kali per hari, tergantung pada volume sampah yang dihasilkan. Menurut penelitian oleh Pramesti & Yuniningsih, (2023), pengaturan jadwal pengangkutan yang baik dapat mengurangi penumpukan sampah di TPS dan mencegah pencemaran lingkungan. Selain itu, DLH menerapkan sistem monitoring untuk memastikan bahwa pengangkutan sampah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga kualitas layanan pengelolaan sampah dapat terjaga.

Selain itu, DLH juga bertugas melakukan penyapuan dengan berfokus pada jalan-jalan protocol. Pihak DLH juga bekerja sama dengan pihak Kecamatan, termasuk Kecamatan Ngaliyan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sistem penyapuan berlangsung setiap hari secara berkala dengan track yang tersebar diseluruh jalan-jalan di Kota Semarang. Jika terdapat laporan adanya timbulan sampah yang ada, DLH bergerak cepat dalam membersihkan timbulan tersebut.



Gambar 5. 5 Penyapuan Jalan Oleh DLH

DLH tidak hanya bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengangkutan sampah, tetapi juga menyediakan layanan retribusi kebersihan yang menjangkau mulai dari tingkat rumah tangga hingga sektor komersial. Layanan retribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dialokasikan untuk mendukung operasional dan pengembangan sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang. Penetapan tarif retribusi diatur dalam Peraturan Walikota, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis properti, volume sampah yang dihasilkan, dan tingkat pelayanan yang diberikan.



Gambar 5. 42 Pelayanan Retribusi DLH

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang sebagai aktor pengelolaan sampah juga melakukan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas.

Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung seluruh siklus pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Fasilitas yang dimaksud meliputi Tempat Pembuangan Sementara (TPS), armada pengangkut sampah, serta peralatan pengolahan sampah seperti tempat sampah, gerobak sampah, dan alat timbangan. DLH Kota Semarang secara rutin melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut untuk memastikan kelancaran operasional dan mencegah terjadinya kerusakan yang dapat mengganggu proses pengelolaan sampah. Pemeliharaan meliputi perbaikan infrastruktur yang rusak, penggantian peralatan yang sudah usang, serta peningkatan kapasitas fasilitas sesuai dengan pertumbuhan volume sampah yang dihasilkan.



Gambar 5. 7 Pemeliharaan Kontainer Sampah

Sumber: Instagram @dlh.semarang

“Untuk hambatan kesadaran masyarakat sih mas, karna kalo terjadi penumpukan di TPS tuh masalah serius banget buat kita apalagi belum hari pengangkutannya. Rumornya juga TPA Jatibarang mau ditutup 2027 nanti dan masih dicari penggantinya. Anggaran juga termasuk si mas karna untuk pemeliharaan dan pengadaan tuh makan budget banget.” (wawancara, Ika 3 Juni 2025)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah perkotaan, sebagaimana terungkap dari hasil wawancara. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemilahan sampah. Kondisi ini diperparah dengan potensi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), terutama jika terjadi keterlambatan pengangkutan. DLH Kota Semarang menyadari bahwa edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk mengubah perilaku masyarakat.

Selain masalah kesadaran masyarakat, DLH Kota Semarang juga dihadapkan pada isu krusial terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. Terdapat kekhawatiran bahwa TPA Jatibarang akan ditutup pada tahun 2027 karena kondisinya yang sudah overload. Kepala DLH Kota Semarang, Arwita Mawarti, menyatakan bahwa daya tampung TPA Jatibarang diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga tiga sampai lima tahun ke depan. Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk menangani permasalahan ini dengan mempercepat implementasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Namun, proyek PSEL diperkirakan baru akan beroperasi penuh dalam 3-4 tahun ke depan. Oleh karena itu, DLH berencana menerapkan sistem sanitary landfill sebagai solusi jangka pendek (Anton Hartono, 2025).

Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang. DLH mengakui bahwa pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah membutuhkan anggaran yang besar. Untuk mengatasi masalah ini, DLH berupaya menjalin kerjasama dengan pihak swasta melalui program CSR. Selain itu, DLH juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah dan pengomposan skala rumah tangga.

“Kalo saya pada bidang 4 berfokus pada pengawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih sering si melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan baik bagi masyarakat

ataupun bank sampah mas. Jadi kita garda terdepan dalam pemilahan sampah di Kota Semarang ini.” (wawancara, Nuzuli 3 Juni 2025)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan program pilah sampah serta bank sampah. DLH berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya, manfaat ekonomi dari sampah yang dipilah, serta cara mengelola sampah dengan benar. Program-program ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dari pola membuang sampah menjadi pola memilah sampah (Ervin Dwi Ariyanto, 2018).



Gambar 5. 8 Pendampingan Bank Sampah

Sumber: Instagram @dlh.semarang

Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan melalui berbagai cara, seperti kegiatan di tingkat kelurahan, sekolah, komunitas, dan media sosial. DLH juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Materi sosialisasi mencakup informasi tentang jenis-jenis sampah, cara memilah sampah yang benar, manfaat daur ulang, serta dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak tepat.

Pengawasan terhadap bank sampah di seluruh Kota Semarang, termasuk wilayah Kecamatan Ngaliyan juga dilakukan oleh DLH. penekanan pada pentingnya peran bank sampah sebagai pilar utama pemilahan sampah dari sumber terus dilakukan. Terdapat total 664 bank sampah aktif yang tersebar di Kota Semarang. Untuk mendukung operasional bank sampah tersebut, DLH memberikan berbagai fasilitas seperti timbangan digital, kontainer sampah organik dan anorganik, gerobak sampah, serta pelatihan daur ulang dan pemilahan sampah.

“Untuk hambatan sendiri mungkin terkait kesadaran si mas. Ga semua masyarakat tuh ikut. Ya mayoritas ibu-ibu PKK si yang intens ikut tapi untuk yang lain belum terjangkau. Sama kita kekurangan SDM mas di bidang 4 ini, maka dari itu belum semua bisa kita bantu pendampingan dan sosialisasi.” (wawancara, Nuzuli 3 Juni 2025)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang mengakui adanya sejumlah hambatan dalam menjalankan perannya sebagai aktor utama pengelolaan sampah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang rendah menjadi kendala utama. Tidak semua masyarakat berpartisipasi aktif dalam program-program pengelolaan sampah, meskipun mayoritas ibu-ibu PKK menunjukkan keterlibatan yang intens. Selain itu, DLH juga menghadapi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga belum semua wilayah dapat terjangkau oleh program pendampingan dan sosialisasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, DLH Kota Semarang terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat SDM, dan memanfaatkan teknologi, DLH berharap dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Semarang (DLH Kota Semarang).

4. Bank Sampah Melati

Bank Sampah Melati merupakan salah satu bank sampah yang berdiri cukup lama dengan lokasi di Jalan Karonsih Timur I, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Bank sampah Melati tugas pokoknya meliputi proses penimbangan dan pencatatan sampah yang disetorkan oleh masyarakat, serta menjadi aktor utama pemilahan sampah ditingkat paling kecil.

“Awalnya hanya inisiatif warga di tingkat RT, ingin agar sampah tidak langsung dibuang ke TPA. Dari situ kita mulai kumpulkan botol plastik, kertas, dan lain-lain, dan biasanya untuk penimbangan itu tidak tentu bisa awal bulan bisa akhir bulan.” (wawancara, Ikari 19 Mei 2025)



Gambar 5. 9 Kondisi Bank Sampah Melati

Bank Sampah Melati berdiri sejak tahun 2014 sebagai inisiatif warga tingkat RT untuk mengurangi volume sampah anorganik yang biasanya langsung dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Jenis sampah yang dikelola di Bank Sampah Melati meliputi botol plastik, kertas, kardus, serta minyak jelantah.

Dalam pelaksanaanya sampah organic ditimbang dan dicatat sebagai dasar perhitungan nilai tabungan nasabah. Masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah di rumah sebelum membawanya ke bank sampah,

sehingga proses penimbangan dan pendataan dapat berjalan lebih efektif. Setelah itu dicatat dan dijadikan tabungan bagi warga yang menyetorkannya.



Gambar 5. 10 Buka Lapak Bank Sampah Melati

“Pemerintah daerah, baik dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga DLH, ikut mensosialisasikan dan memberi pembinaan program bank sampah kepada warga. Kami juga mendapat bantuan alat timbangan dari DLH.” (wawancara, Ikari 19 Mei 2025)

Bank Sampah Melati, sebagai salah satu unit pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, mendapatkan dukungan signifikan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah, mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH), aktif mensosialisasikan dan melakukan pembinaan program bank sampah kepada warga. Dukungan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat bank sampah dalam pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Selain sosialisasi dan pembinaan, Bank Sampah Melati juga menerima bantuan berupa alat timbangan dari DLH. Bantuan ini sangat membantu dalam operasional bank sampah, khususnya dalam proses penimbangan

sampah yang disetorkan oleh warga. Dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk sosialisasi maupun bantuan fasilitas, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Masih ada warga yang belum sadar akan pentingnya pilah sampah. Padahal sampah bisa bernilai ekonomis. Belum lagi kita belum punya gudang khusus untuk simpan sampah.” (wawancara, Ikari 19 Mei 2025)

Bank Sampah Melati menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya memilah sampah, meskipun sampah memiliki nilai ekonomis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum menyadari potensi ekonomi dari sampah yang dipilah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah sampah menjadi isu krusial karena dapat menghambat efektivitas operasional bank sampah. Padahal, dengan memilah sampah, masyarakat tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga dapat memperoleh penghasilan tambahan. Sampah yang dipilah dengan baik memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi.

Ketidadaan gudang khusus untuk menyimpan sampah juga menjadi kendala bagi Bank Sampah Melati. Gudang penyimpanan yang memadai sangat penting untuk menjaga kualitas sampah yang telah dipilah dan menghindari potensi gangguan terhadap aktivitas warga. Tanpa gudang yang memadai, sampah yang terkumpul rentan terhadap kerusakan akibat cuaca atau kontaminasi, sehingga menurunkan nilai jualnya.

5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan salah satu Lembaga dibawah naungan kelurahan yang menaungi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. LPMK sendiri mengurus banyak

pemberdayaan termasuk salah satunya pengelolaan sampah. Lembaga ini menjadi tangan kanan Kelurahan dalam menjembatani dengan masyarakat.

“Mungkin kalo program khusus terkait pengelolaan sampah kita gapunya mas, tapi kami sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang daur ulang sampah kepada masyarakat lewat bank sampah dan sedekah sampah.” (wawancara, Inzan 14 Mei 2025)

Dalam praktiknya, LPMK secara aktif mendatangi RT/RW setempat untuk memantau implementasi hasil penyuluhan serta memberikan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Penekanan pada keaktifan bank sampah dan konsep “sedekah sampah” menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan partisipasi warga.

Terdapat perbedaan mendasar terkait bank sampah dan sedekah sampah. Jika bank sampah menggunakan sistem tabungan individu di mana masyarakat bisa menabung nilai ekonomi sampah yang mereka kumpulkan, sedangkan sedekah sampah menggunakan prinsip gotong royong, di mana hasil penjualan sampah menjadi milik bersama warga dan digunakan untuk kepentingan umum atau kegiatan sosial.

“Mungkin terdapat indikasi keberhasilan dari program ini mas, karna setiap penimbangan sampah dari program baik bank sampah atau sedekah sampah bisa mencapai sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per kepala keluarga, dengan jumlah KK sekitar 30–40 per RW.” (wawancara, Inzan 14 Mei 2025)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), sebagai bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kelurahan, memiliki potensi untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah perkotaan. Hasil wawancara menunjukkan indikasi keberhasilan program bank sampah dan sedekah sampah yang dapat menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Setiap penimbangan sampah dari program tersebut dapat mencapai sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per kepala keluarga (KK), dengan jumlah KK

sekitar 30–40 per RW. Hal ini menunjukkan potensi dampak ekonomi yang signifikan dari pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Dengan potensi dampak ekonomi yang signifikan, LPMK dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah. Selain itu, LPMK juga dapat menggabungkan program bank sampah dengan program sedekah sampah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

“Hambatan mungkin mitra kolaborasi sih mas, baik dari DLH atau mitra swasta. Swasta kami juga paling sama pengepul tok. Anggaran juga termasuk buat fasilitasi RT/RW yang membutuhkan.”
(wawancara, Inzan 14 Mei 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi LPMK adalah kurangnya mitra kolaborasi, baik dari DLH maupun pihak swasta. Kemitraan dengan swasta pun terbatas pada pengepul sampah. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam memfasilitasi RT/RW yang membutuhkan dukungan. Kurangnya kemitraan dengan DLH dapat menghambat akses LPMK terhadap sumber daya dan dukungan teknis yang diperlukan dalam pengelolaan sampah. Padahal, DLH memiliki peran strategis dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan fasilitas kepada LPMK. Kemitraan dengan pihak swasta, selain pengepul, juga perlu diperluas untuk meningkatkan nilai tambah sampah dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Keterbatasan anggaran menjadi kendala klasik bagi LPMK dalam menjalankan program-program pengelolaan sampah. Anggaran yang terbatas dapat menghambat upaya LPMK dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat sampah, alat pengangkut sampah, dan tempat pengolahan sampah. Selain itu, anggaran yang terbatas juga dapat menghambat upaya LPMK dalam memberikan insentif kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah.

6. Rukun Warga 06 (RW) Kelurahan Ngaliyan

Di tingkat lingkungan masyarakat yang lebih kecil, seperti RT/RW, peran aktif dalam pengelolaan sampah juga semakin penting seiring meningkatnya volume dan kompleksitas permasalahan sampah perkotaan. Wawancara dengan Ketua RW 06 menunjukkan bahwa pihaknya telah berupaya untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih partisipatif dan inovatif meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

“Pengangkutan sampah di urus oleh LSM mas, jadi seminggu sekali diangkut. Buat pemilahan sampah kami ngandelin bank sampah setempat mas. Selain itu, kami juga memanfaatkan kotoran hewan dari rumah tangga untuk dibuat menjadi pupuk kompos dan kompos tersebut buat kebun RW 06 yang kita isi dengan sayur-sayuran. Lumayan buat masyarakat sekitar.” (wawancara, Ilmawan 14 Mei 2025)

Salah satu bentuk pengelolaan sampah yang dilakukan oleh RW 06 adalah bekerja sama dengan LSM lokal dalam penyelenggaraan pengangkutan sampah secara rutin, yaitu setiap minggu sekali. Meskipun pengumpulan sampah masih dilakukan secara konvensional (dari rumah ke TPS), keterlibatan LSM menunjukkan adanya sinergi antar pelaku dalam pengelolaan sampah, sesuai prinsip collaborative governance (Ansell & Gash, 2008). Keterlibatan non-state actors seperti LSM sangat penting karena dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat serta memberikan dukungan teknis maupun logistik dalam pengelolaan sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan

Selain itu, pemilahan sampah di RW 06 diserahkan kepada bank sampah yang ada di wilayah tersebut. Bank sampah merupakan salah satu model pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meminimalkan timbulan sampah yang masuk ke TPA melalui prinsip daur ulang (recycling) dan penghasilan ekonomi dari sampah anorganik. Dengan memanfaatkan bank sampah, RW 06 tidak hanya berhasil mengurangi volume sampah, tetapi juga

menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat melalui penjualan atau tabungan sampah tersebut.

Yang lebih inovatif lagi, RW 06 juga memanfaatkan limbah organik, khususnya kotoran hewan dari rumah tangga, untuk dibuat menjadi pupuk kompos. Proses pengomposan ini menunjukkan upaya pengelolaan sampah secara holistik dan siklikal, di mana limbah yang dihasilkan di wilayah tersebut dimanfaatkan kembali sebagai input produksi pertanian perkotaan. Kompos yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memupuk sayuran di kebun RW 06, yang menjadi sumber pangan segar bagi masyarakat sekitar.



Gambar 5. 11 Kebun Warga RW 06

Model seperti ini dikenal sebagai *integrated solid waste management system* (ISWM), di mana sampah tidak hanya dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki potensi ekonomi dan ekologis. Selain itu, keberadaan kebun komunitas juga berkontribusi pada ketahanan pangan lokal, penghijauan kota, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, pengomposan, hingga pemanfaatan hasilnya menunjukkan bahwa RW 06 telah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan sampah berbasis komunitas (*community-based solid waste management*). Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan, memperkuat

solidaritas sosial, serta menciptakan solusi lokal yang adaptif terhadap tantangan pengelolaan sampah perkotaan.

“Kelurahan sering nengok kesini si mas sewaktu waktu, mau liat proses disini. Penyuluhan juga pernah ikut dari DLH, yang belum mungkin soal dana si mas, memang belum ada anggaran yang turun. Jadi kami masih berjalan dengan memanfaatkan yang ada.”
(wawancara, Ilmawan 14 Mei 2025)

Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah daerah adalah melalui kunjungan rutin dari pihak kelurahan ke wilayah RW 06. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memantau proses pengelolaan sampah sekaligus memberikan pembinaan kepada masyarakat. Kunjungan atau monitoring oleh pihak kelurahan menjadi penting karena dapat meningkatkan motivasi masyarakat dan membantu mengidentifikasi kendala teknis serta sosial dalam pelaksanaan program lingkungan.

Selain itu, RW 06 juga pernah mengikuti penyuluhan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penyuluhan yang dilakukan oleh instansi pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran lingkungan dan perilaku positif masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara mandiri. Namun, agar dampaknya lebih berkelanjutan, penyuluhan perlu dilengkapi dengan pendampingan berkala dan pelatihan teknis.

Meski telah mendapat pembinaan dan penyuluhan, tantangan utama yang dihadapi oleh RW 06 adalah keterbatasan dana. Seperti disampaikan oleh narasumber, belum turunnya anggaran dari pemerintah membuat RW harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan aktivitas pengelolaan sampah. Fenomena ini bukanlah hal yang unik terjadi hanya di RW 06, melainkan menjadi isu struktural dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas di banyak wilayah perkotaan di Indonesia. Menurut penelitian Rawana et al., (2020) minimnya alokasi anggaran untuk program pengelolaan sampah di tingkat mikro menyebabkan banyak inisiatif pengelolaan sampah mandiri mengalami stagnasi atau bahkan gagal berkembang

Namun demikian, RW 06 tetap berupaya mempertahankan aktivitas pengelolaan sampah dengan memanfaatkan sumber daya lokal, baik berupa tenaga kerja, lahan, maupun material organik rumah tangga. Model pengelolaan sampah seperti ini sering disebut sebagai community-based solid waste management, yaitu pendekatan pengelolaan sampah yang bertumpu pada prinsip gotong royong, partisipasi aktif masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa RW 06 tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai aktor yang proaktif dalam menciptakan solusi lokal terhadap permasalahan sampah di wilayahnya. Partisipasi masyarakat di tingkat RT/RW menjadi fondasi kuat bagi terciptanya sistem pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan, asalkan didukung oleh kebijakan yang inklusif dan fasilitasi yang memadai dari pemerintah daerah.

7. Rukun Warga 01 (RW) Kelurahan Wates

Kelurahan Wates merupakan salah satu kelurahan yang termasuk dari Kecamatan Ngaliyan. Kelurahan ini terletak di ujung dari Kecamatan Ngaliyan yang pastinya tidak terlalu terpantau seperti di Kelurahan Ngaliyan. Pengelolaan sampah disini juga masih dapat diakatakan terbelakang dan masih berproses untuk menjadi yang lebih baik lagi.

“Sebelumnya kita buang sampah di tanah kosong punya orang mas, seminggu setelahnya baru diangkut. Karna makin lama sampah makin banyak dan bau banget kami dan ibu-ibu pkk yang rata-rata ngurusin posyandu bergerak buat menggaet LSM lalu sepakat mulai pengangkutan sampah tiap hari per RT dengan tarif 15 rb perbulan, kalo belum ada tong sampahnya kita kasi 50 rb mas tarifnya.”
(wawancara, Sutiah 6 Juni 2025)



Gambar 5. 12 Tong Sampah Inisiasi Ibu-ibu PKK

Mulai dari pengangkutan sampah per rumah tangga RW 01 mengandalkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat yang spontan dibuat pada tahun lalu. Sebelumnya sampah rumah tangga secara kolektif dikumpulkan di TPS setempat yang bahkan tidak dapat disebut TPS malah seperti lahan kosong milik warga setempat baru seminggu kemudian diangkut dan dibuang ke TPS pusat. Namun, seiring urgensi kenaikan sampah yang signifikan, kemudian mengandalkan LSM setempat untuk mengangkut sampah per rumah tangga dengan estimasi 2 RT per hari dengan total 10 RT yang ada di dalamnya. Per rumah tangga dikenakan biaya 15 rb perbulan dengan membayar 50 rb diawal untuk pemberian tong sampah yang dibuat langsung oleh ibu-ibu PKK setempat.

“Kalo pemilahan ya warga mungkin ga terlalu mikirin ya mas, karna sampah yang emang belum diangkut dan menumpuk biasanya langsung dibakar gt aja. Kita sempet dapet edaran buat bikin bank sampah tapi kita ga dikasih tau cara ngelolanya gimana, alhasil ya apa adanya aja kita buatnya. Belum lagi edukasi tentang sampah juga gapernah masuk sampe sini mas.” (wawancara, Sutiah 6 Juni 2025)

Berlanjut kepada pemilahan sampah, rata rata warga yang ada disini memilah sampah dengan cara dibakar langsung dan menimbulkan asap yang cukup menganggu warga setempat. Setelah ditelusuri ternyata RW 01 baru memulai untuk membuat bank sampah dengan edaran dari Kelurahan yang

mewajibkan memiliki bank sampah minimal 1 per RW nya. Lagi-lagi bank sampah juga dibuat spontan begitu saja mengikuti edaran tersebut. Tidak ada penyuluhan ataupun pengetahuan. Pengkonseptan bank sampah diprakarsai langsung bersama ibu-ibu PKK. Penyuluhan atau pelatihan pengelolaan sampah pun tidak didapatkan masyarakat baik dari Kelurahan maupun DLH secara langsung.

“Pertengahan bulan kemarin tuh kita nyobain langsung mas buat buka, sebelumnya udah ada imbauan dari saya dengan memberi tahu RT setempat dan disebarluaskan. Terus alhamdulillah kemarin lumayan, tapi soal alat emang belum ada dan kita beli pake kas RW dulu buat timbangan sama plastic sampahnya. Nah warga ngumpul bawa sampah, kita langsung telepon pengepul biar langsung abis dan ga bersisa, nanti buat uangnya kita kumpulin dulu jadi semacam kek Tabungan lah nanti satu tahun baru bisa diambil, tapi ini baru rencana ya mas buat ngambilnya setaun.” (wawancara, Sutiah 6 Juni 2025)

Seperti yang diketahui bahwasannya Kelurahan hanya mengimbau para RW untuk membuat bank sampah tanpa pedoman atau informasi bagaimana pengelolaannya. Sebulan yang lalu dilaksanakan program pertama dari bank sampah yakni pengkolektifan sampah yang bisa di daur ulang di dekat pos kamling tempat berkumpulnya warga. Setelah sampah plastik dan sampah daur ulang lain terkumpul, Bu Sutiah langsung menghubungi pengepul lalu diuangkan langsung. Uang tersebut tidak langsung diberikan, namun disimpan untuk pengkolektifan dicatat sebagai nasabah bank sampah lalu baru bisa diambil satu tahun lagi. Untuk alat yang digunakan pun masih menggunakan kas RW seperti membeli timbangan dan trashbag untuk pengkolektifan.

8. PT Narpati Agung Karya Lestari

PT. Narpati adalah salah satu perusahaan swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2007. Kerja sama ini tertuang dalam

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 568.1/21 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pemanfaatan dalam Rangka Pengolahan Sampah Menjadi Pupuk Organik. Operasionalnya dimulai pada tahun 2011 setelah semua infrastruktur pendukung selesai dibangun. Dalam kerja sama ini, PT. Narpati diberikan mandat untuk mengolah sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang menjadi pupuk organik padat dan cair. Sebagai mitra pemerintah, PT. Narpati sepenuhnya membiayai operasional pengelolaan sampah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana produksi.

Tugas utama PT. Narpati dalam kerja sama ini adalah menerima pasokan sampah sebanyak 350 ton per hari dari TPA Jatibarang untuk kemudian diolah menjadi pupuk organik sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan bersama. Proses pengolahan dilakukan secara teknis oleh PT. Narpati dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melalui UPTD TPA. Selain itu, PT. Narpati juga bertanggung jawab atas seluruh biaya operasional pengelolaan sampah serta membayar kontribusi tahunan sebesar Rp580 juta kepada Pemkot Semarang sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan lahan dan pasokan sampah.

Kerja sama antara Pemkot Semarang dan PT. Narpati telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang. Salah satu manfaat utamanya adalah penurunan volume timbunan sampah di TPA Jatibarang yang merupakan satu-satunya tempat pembuangan akhir di kota ini. Produk hasil olahan seperti pupuk organik padat dan cair memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan dalam bidang pertanian. Selain itu, adanya kerja sama ini turut membantu menjaga keberlanjutan fungsi TPA Jatibarang agar tidak cepat overload, serta mendukung upaya Kota Semarang dalam meraih penghargaan Adipura sebagai kota terbersih di Indonesia.

Meskipun perannya sangat signifikan, PT. Narpati juga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar TPA Jatibarang, terutama dalam bentuk partisipasi tenaga kerja. Beberapa masyarakat lokal bekerja langsung di

fasilitas pengolahan sampah milik PT. Narpati, sehingga turut meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Disposisi pelaksana dari kedua belah pihak, baik dari UPTD TPA maupun PT. Narpati, menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan ini. Komitmen kuat dari kedua pihak dalam mengelola sampah secara optimal menjadikan kerja sama ini tetap berjalan meski ada tantangan teknis dan administratif di tengah perjalanan.

Di sisi lain, kerja sama ini juga menghadapi beberapa tantangan, terutama dari aspek sosial dan ekonomi. Kondisi sosial masyarakat sekitar TPA Jatibarang, seperti keberadaan kelompok pemulung dan sapi, sering kali mengganggu proses pengambilan dan pengolahan sampah. Selain itu, kondisi finansial PT. Narpati yang masih berkembang menjadi hambatan dalam memenuhi kewajiban administratifnya kepada pemerintah, terutama dalam hal pembayaran kontribusi dan denda akibat keterlambatan. Meskipun demikian, komitmen kuat dari semua pihak, termasuk intensitas koordinasi yang cukup baik, menjadi modal penting untuk terus mempertahankan sinergi ini demi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Semarang.

B. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Teori Grindle

Analisis implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan akan dilakukan dengan mengidentifikasi interaksi antara Isi Kebijakan (Content of Policy) yang termuat dalam Perda dan Konteks Implementasi (Context of Implementation) di lapangan. Berikut ini merupakan hasil analisis dari implementasi dengan menggunakan Teori kebijakan publik:

1. Isi Kebijakan (Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012)

Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2012 merupakan dokumen formal yang menjadi panduan implementasi pengelolaan sampah. Karakteristik isi kebijakan ini memengaruhi bagaimana aktor-aktor di Kecamatan Ngaliyan merespons dan melaksanakannya:

- Kepentingan yang Terpengaruh: Perda ini secara langsung memengaruhi kepentingan berbagai pihak. Bagi masyarakat, Perda menuntut perubahan perilaku (pemilahan sampah) dan kewajiban retribusi, yang dapat dianggap sebagai beban jika tidak diimbangi manfaat yang jelas. Bagi pemerintah (DLH, Kecamatan, Kelurahan), Perda memberikan mandat dan tanggung jawab besar dalam pengelolaan sampah. Bagi sektor swasta (PT Narpati, pengepul), Perda menciptakan peluang bisnis dalam pengolahan dan daur ulang.
- Jenis Manfaat yang Dihasilkan: Perda menjanjikan manfaat lingkungan (kebersihan, kesehatan) dan potensi ekonomi (dari daur ulang). Namun, manfaat ekonomi ini belum merata dirasakan, terutama oleh masyarakat yang belum aktif di bank sampah, sehingga mengurangi motivasi untuk mematuhi Perda.
- Perubahan yang Diinginkan: Perda menghendaki perubahan signifikan dari sistem kumpul-angkut-buang menjadi sistem yang lebih terintegrasi dengan pengurangan dan daur ulang di sumbernya. Perubahan perilaku masyarakat dari tidak memilah menjadi memilah adalah inti dari amanat Perda.
- Lokasi Pengambilan Keputusan: Perda menetapkan kewenangan pengelolaan sampah pada pemerintah daerah (DLH sebagai pelaksana utama, Kecamatan dan Kelurahan sebagai koordinator di tingkat wilayah). Namun, desentralisasi kewenangan ini terkadang tidak diikuti dengan desentralisasi sumber daya yang memadai.
- Sumber Daya yang Dialokasikan: Perda mengamanatkan pengelolaan sampah yang membutuhkan sumber daya besar (anggaran, SDM, fasilitas). Namun, data menunjukkan alokasi anggaran yang minim (1,5% dari APBD) dan kekurangan SDM di DLH, serta fasilitas yang terbatas di bank sampah (tidak ada gudang, alat timbangan dari kas RW), menjadi hambatan serius dalam menjalankan amanat Perda.

2. Konteks Implementasi di Kecamatan Ngaliyan

Konteks implementasi di Kecamatan Ngaliyan, dengan berbagai aktor dan kondisinya, secara langsung memengaruhi bagaimana Perda No. 06 Tahun 2012 dijalankan. Seperti yang dijelaskan berikut ini:

a) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor:

- Kecamatan Ngaliyan: Memiliki kekuasaan koordinatif dan strateginya adalah sosialisasi, pembentukan bank sampah, dan pilot project pilah sampah. Kepentingannya adalah mewujudkan lingkungan bersih dan mematuhi kebijakan kota. Namun, keterbatasan anggaran membatasi strategi fasilitasi.
- Kelurahan: Bertindak sebagai perpanjangan tangan Kecamatan, dengan strategi sosialisasi dan monitoring bank sampah. Kepentingannya adalah meningkatkan partisipasi warga. Kekuasaannya terbatas pada pengajuan fasilitas dan pembinaan.
- DLH Kota Semarang: Memiliki kekuasaan regulatif dan operasional (pengangkutan, retribusi, pengadaan fasilitas). Kepentingannya adalah menjaga kebersihan kota dan mengelola TPA. Strateginya mencakup penyapuan jalan, pendampingan bank sampah. Namun, kekurangan SDM di Bidang 4 membatasi jangkauan sosialisasi dan pendampingan.
- Bank Sampah Melati: Aktor berbasis komunitas dengan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Strateginya adalah mengumpulkan dan menimbang sampah terpilah. Kekuasaannya terbatas pada inisiatif warga dan dukungan minimal dari pemerintah.
- LPMK: Memiliki kepentingan pemberdayaan masyarakat. Strateginya adalah sosialisasi daur ulang dan sedekah sampah. Kekuasaannya terbatas pada fasilitasi dan menjembatani warga dengan kelurahan/DLH. Hambatan utama adalah kurangnya mitra kolaborasi dan anggaran.
- RW 06 (Kelurahan Ngaliyan): Aktor proaktif dengan kepentingan menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan limbah.

Strateginya adalah kerja sama dengan LSM untuk pengangkutan, mengandalkan bank sampah, dan mengolah limbah organik menjadi kompos. Kekuasaannya terbatas pada inisiatif komunitas dan kas RW.

- RW 01 (Kelurahan Wates): Aktor yang baru memulai inisiatif pengelolaan sampah. Kepentingannya adalah mengatasi masalah sampah menumpuk. Strateginya adalah kerja sama dengan LSM lokal untuk pengangkutan dan inisiasi bank sampah secara mandiri. Kekuasaannya terbatas pada iuran warga dan kas RW.
 - PT Narpati Agung Karya Lestari: Aktor swasta dengan kepentingan bisnis pengolahan sampah menjadi pupuk. Strateginya adalah mengolah 350 ton sampah/hari dari TPA. Kekuasaannya adalah kapasitas pengolahan dan investasi. Kepentingannya adalah keberlanjutan bisnis dan memenuhi kontrak dengan Pemkot.
- b) Karakteristik Rezim dan Institusi: Struktur birokrasi pemerintah daerah (DLH, Kecamatan, Kelurahan) yang hierarkis dan terkadang kurang koordinatif antar bidang atau tingkatan, dapat menghambat implementasi Perda. Kurangnya anggaran khusus di tingkat kelurahan untuk program sampah menunjukkan kelemahan dalam struktur pendanaan institusional.
- c) Kepatuhan dan Responsivitas: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pemilahan sampah yang diamanatkan Perda masih bervariasi. Di RW 01 Wates, banyak warga yang masih membakar sampah atau tidak memilahnya karena kurangnya edukasi dan fasilitas. Ini menunjukkan rendahnya responsivitas target kelompok terhadap kebijakan. Sebaliknya, di Bank Sampah Melati dan RW 06, responsivitas lebih tinggi karena adanya inisiatif dan manfaat yang dirasakan.
- d) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
- Sosial: Tingginya pertumbuhan penduduk di Ngaliyan meningkatkan volume sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat secara umum dan budaya konsumtif menjadi tantangan sosial.

- Ekonomi: Potensi ekonomi dari sampah (melalui bank sampah) menjadi pendorong, namun belum semua masyarakat menyadari atau merasakan manfaatnya. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah juga merupakan faktor ekonomi yang signifikan.
- Politik: Komitmen walikota baru terhadap isu persampahan memberikan dorongan politik bagi implementasi Perda, namun dukungan ini perlu diterjemahkan ke dalam alokasi sumber daya yang lebih konkret.

C. Interaksi antara Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi

Interaksi antara Isi Kebijakan (Perda No. 06 Tahun 2012) dan Konteks Implementasi di Kecamatan Ngaliyan secara langsung membentuk dinamika implementasi pengelolaan sampah sebagai berikut:

- Kesenjangan antara Amanat dan Realitas Sumber Daya: Perda mengamanatkan pengelolaan sampah yang komprehensif, namun sumber daya yang dialokasikan (anggaran DLH, fasilitas bank sampah) tidak memadai. Ini menciptakan kesenjangan antara perubahan yang diinginkan oleh Perda dan kapasitas aktor untuk mewujudkannya. Akibatnya, inisiatif di tingkat akar rumput (seperti RW 01 Wates yang menggunakan kas RW untuk timbangan) harus menutupi kekurangan ini.
- Variasi Kepatuhan Berdasarkan Manfaat dan Edukasi: Perda menuntut perubahan perilaku (pemilahan), namun jenis manfaat yang ditawarkan (ekonomi, lingkungan) belum sepenuhnya dipahami atau dirasakan oleh semua. Di wilayah dengan edukasi dan pendampingan yang intensif (seperti Bank Sampah Melati yang didampingi DLH Bidang 4), kepatuhan dan responsivitas masyarakat cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, di wilayah yang kurang terjangkau edukasi (seperti RW 01 Wates), kepatuhan rendah dan praktik pembakaran sampah masih terjadi.

- Pengaruh Kekuasaan dan Kepentingan Aktor: Meskipun Perda memberikan mandat, kekuasaan dan kepentingan aktor di lapangan memengaruhi prioritas implementasi. DLH fokus pada pengangkutan dan TPA, sementara Kecamatan dan Kelurahan fokus pada sosialisasi dan bank sampah. Keterbatasan mitra swasta di luar pengangkutan (seperti PT Narpati yang hanya mengolah di TPA) menunjukkan bahwa kepentingan sektor swasta belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh rantai nilai pengelolaan sampah di tingkat kecamatan.
- Dampak Lingkungan Sosial-Ekonomi: Pertumbuhan penduduk dan budaya konsumtif (faktor lingkungan sosial-ekonomi) terus meningkatkan volume sampah, memberikan tekanan besar pada sistem pengelolaan yang diamanatkan Perda. Ini memperparah tantangan dalam mencapai perubahan yang diinginkan oleh Perda, meskipun ada upaya dari aktor-aktor implementasi.

Secara keseluruhan, implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan adalah proses yang kompleks, di mana keberhasilan dan tantangan muncul dari interaksi dinamis antara ambisi kebijakan (isi Perda) dan realitas di lapangan (konteks implementasi). Pemahaman mendalam terhadap interaksi ini menjadi kunci untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB VI

DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN NGALIYAN

A. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu dampak yang terlihat dari upaya implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui inisiatif seperti pembentukan Bank Sampah dan pelatihan daur ulang yang dilakukan oleh kelurahan, LPMK, serta dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, warga mulai memahami bahwa sampah bukan hanya beban lingkungan, tetapi juga memiliki potensi nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga memberikan edukasi tentang konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai dasar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Peningkatan kesadaran ini menunjukkan adanya respons positif dari target kelompok (masyarakat) terhadap amanat Perda, terutama di area yang mendapatkan sosialisasi dan pendampingan intensif. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan dan pengumpulan sampah menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi Perda di tingkat mikro. Masyarakat mulai terlibat dalam proses pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, seperti rumah tangga dan RT/RW. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat dari sekadar membuang sampah menjadi lebih proaktif dalam mendaur ulang atau menjualnya melalui bank sampah. Seperti yang disampaikan oleh Syahputra (2021), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan limbah secara keseluruhan. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat,

program pengelolaan sampah yang dirancang oleh pemerintah cenderung tidak optimal karena kurangnya aksi kolektif di tingkat lokal.

Peningkatan kesadaran masyarakat ini juga didukung oleh upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Forum-forum penyuluhan, pertemuan RT/RW, serta sosialisasi yang dilakukan oleh PKK dan LPMK turut berperan dalam membentuk motivasi bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan melalui aktivitas daur ulang. Menurut Marlina (2020), pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah harus didasarkan pada aspek moralitas, etika, serta motivasi kolektif agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, program seperti bank sampah tidak hanya menjadi program pemerintah semata, tetapi juga menjadi budaya baru dalam kehidupan bermasyarakat, yang berdampak langsung pada lingkungan dan ekonomi warga setempat.

B. Penurunan Volume Sampah yang Dibuang ke TPA

Melalui penerapan prinsip pemilahan sampah sejak dari sumber dan aktivitas daur ulang yang semakin intensif, yang merupakan amanat Perda No. 06 Tahun 2012, terjadi penurunan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, langkah-langkah seperti pembentukan bank sampah dan pelatihan daur ulang telah mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri. Dengan adanya pemilahan di tingkat rumah tangga, hanya sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali yang akhirnya mencapai TPA. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah memiliki peran strategis dalam mengurangi beban lingkungan yang diakibatkan oleh penumpukan sampah.

Penurunan jumlah sampah yang masuk ke TPA berdampak langsung pada pengurangan risiko pencemaran tanah dan air, terutama yang berasal dari sampah organik yang membusuk dan menghasilkan cairan lindi serta dari limbah anorganik yang tidak terurai secara alami. Sampah plastik, logam, dan kertas yang berhasil dipilah dan dikelola melalui bank sampah atau unit daur ulang lokal tidak lagi menjadi bagian dari aliran limbah yang menuju TPA

Jatibarang, yang saat ini sudah overload dan direncanakan akan ditutup pada tahun 2027. Menurut Syahputra (2021), pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA merupakan salah satu indikator utama keberhasilan program pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, dampak ini masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh Kecamatan Ngaliyan, terutama di wilayah yang kepatuhan masyarakatnya masih rendah dan sumber daya yang dialokasikan untuk fasilitas pemilahan masih terbatas, seperti yang terlihat di RW 01 Kelurahan Wates.

C. Peningkatan Ekonomi Melalui Bank Sampah

Program Bank Sampah, yang sejalan dengan amanat Perda No. 06 Tahun 2012 untuk mendorong pengurangan dan daur ulang sampah, tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengelolaan limbah, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam peningkatan ekonomi lokal, khususnya di tingkat RT/RW. Di wilayah RW 06 Kelurahan Ngaliyan, bank sampah telah menjadi wahana pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri sekaligus produktif. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam dapat ditukarkan atau dijual melalui bank sampah, sehingga memberikan tambahan penghasilan bagi warga. Hasil wawancara menyebutkan bahwa setiap kepala keluarga yang aktif dalam program ini bisa mendapatkan nilai ekonomi sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per bulan, tergantung jenis dan jumlah sampah yang mereka kumpulkan. Hal ini membuktikan bahwa sampah bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga bisa menjadi sumber daya ekonomi jika dikelola dengan baik. Dampak ekonomi ini secara langsung memengaruhi jenis manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan, menjadikannya lebih konkret bagi masyarakat.

Selain meningkatkan pendapatan rumah tangga, keberadaan bank sampah juga turut menciptakan lapangan kerja baru di tingkat komunitas. Pengelolaan bank sampah membutuhkan tenaga untuk proses pemilahan, penimbangan, pengemasan, dan distribusi sampah ke pengepul atau industri daur ulang. Beberapa anggota masyarakat, terutama ibu-ibu PKK dan kelompok wanita tani, mulai menjadikan aktivitas ini sebagai usaha sampingan yang menjanjikan. Menurut Marlina (2020), pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah

berkaitan erat dengan aspek moralitas, etika, kesadaran budaya, serta motivasi kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sejahtera. Dengan demikian, bank sampah tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan limbah, tetapi juga menjadi bagian dari ekonomi sirkular yang inklusif dan berkelanjutan di perkotaan.

Keberhasilan bank sampah dalam meningkatkan ekonomi lokal juga sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, salah satu visi pembangunan Kota Semarang. Dengan adanya bank sampah, masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan luar, tetapi bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Selain itu, program ini juga selaras dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang bertujuan mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Syahputra (2021), partisipasi aktif masyarakat dalam program bank sampah merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah secara keseluruhan. Dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, bank sampah memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung perekonomian lokal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

D. Koordinasi Antar Aktor yang lebih baik

Keterlibatan aktor-aktor seperti Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan LPMK dalam implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan mulai menunjukkan adanya sinergi yang lebih baik. Kolaborasi antar-aktor ini terlihat melalui pelaksanaan program-program lintas instansi, seperti pembentukan bank sampah, sosialisasi daur ulang, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumbernya. Forum-forum koordinasi rutin yang diselenggarakan oleh kecamatan menjadi sarana penting untuk menyinkronkan kebijakan, mengidentifikasi kendala, serta merancang solusi bersama. Hasil wawancara dengan staf Kelurahan Ngaliyan menyebutkan bahwa forum tersebut membantu memperkuat hubungan antar

lembaga dan menciptakan kesepakatan dalam penanganan isu persampahan secara holistik.

Peningkatan koordinasi ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor dalam konteks implementasi kebijakan. Forum-forum penyuluhan lingkungan juga berkontribusi dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi kebijakan. Proses ini tidak hanya memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi teknis tentang pengelolaan sampah, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau ide dalam pengelolaan limbah di wilayahnya. Menurut Marlina (2020), keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi program sekaligus memperkuat komitmen kolektif dalam menjaga lingkungan hidup. Hal ini selaras dengan upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Ngaliyan, di mana penyuluhan yang melibatkan PKK dan RT/RW berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah secara mandiri.

Namun, meskipun sinergi antaraktor mulai terbentuk, masih diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih formal dan berkelanjutan agar kolaborasi tidak hanya bersifat insidental, terutama mengingat keterbatasan sumber daya dan kurangnya kepatuhan merata yang masih menjadi tantangan. Penelitian Manurung (2013) menyebutkan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Di Kecamatan Ngaliyan, meski belum sepenuhnya optimal, forum koordinasi bulanan yang melibatkan DLH, kelurahan, dan pengelola bank sampah telah menjadi langkah awal dalam membangun struktur tata kelola sampah yang lebih inklusif. Melalui pendekatan ini, diharapkan semua pihak memiliki pemahaman bersama, sehingga dapat menciptakan motivasi dan kapasitas aksi kolektif yang lebih kuat dalam menangani permasalahan sampah perkotaan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan, khususnya di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan didasarkan pada Teori Implementasi Kebijakan Grindle, penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya bergantung pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi lebih kepada interaksi kompleks antara Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*) di lapangan.

Dari sisi Isi Kebijakan (Perda No. 06 Tahun 2012), Perda ini mengamanatkan perubahan perilaku signifikan (pemilahan sampah dari sumbernya) dan membutuhkan alokasi sumber daya yang besar. Namun, ditemukan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk implementasi Perda masih sangat terbatas (anggaran minim, SDM DLH kurang, fasilitas bank sampah terbatas), menciptakan kesenjangan antara tuntutan kebijakan dan kapasitas implementor.

Dari sisi Konteks Implementasi, dinamika implementasi sangat dipengaruhi oleh:

- Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor: Berbagai aktor (Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, DLH, Bank Sampah, LPMK, RT/RW, PT Narpati) memiliki peran dan kepentingan yang beragam. Meskipun ada upaya koordinasi, fragmentasi kepentingan dan keterbatasan sumber daya masing-masing aktor masih menjadi tantangan.

- Karakteristik Rezim dan Institusi: Struktur birokrasi dan norma institusional belum sepenuhnya mendukung implementasi Perda secara optimal, terutama dalam hal alokasi anggaran dan fasilitasi di tingkat akar rumput.
- Kepatuhan dan Responsivitas: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap amanat Perda (pemilahan sampah) bervariasi. Di beberapa wilayah, partisipasi aktif dan kesadaran meningkat (misalnya, Bank Sampah Melati, RW 06), namun di wilayah lain (misalnya, RW 01 Wates), masih ditemukan praktik pembakaran sampah dan kurangnya pemilahan akibat minimnya edukasi dan fasilitas.
- Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik: Pertumbuhan penduduk dan budaya konsumtif terus meningkatkan volume sampah, memberikan tekanan pada sistem pengelolaan yang ada, sementara komitmen politik perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam dukungan sumber daya yang konkret.

Interaksi antara Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi menunjukkan bahwa meskipun Perda No. 06 Tahun 2012 memiliki tujuan yang baik, implementasinya terhambat oleh keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk menjalankan amanatnya, serta rendahnya kepatuhan dan responsivitas masyarakat secara merata yang disebabkan oleh kurangnya edukasi dan fasilitas pendukung. Dampak yang muncul adalah peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang bersifat parsial, penurunan volume sampah ke TPA yang belum signifikan secara keseluruhan, peningkatan ekonomi melalui bank sampah di komunitas tertentu, dan koordinasi antaraktor yang mulai membaik namun masih perlu penguatan. Secara umum, implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 di Kecamatan Ngaliyan masih dalam tahap perkembangan dengan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, asalkan kesenjangan antara isi kebijakan dan konteks implementasi dapat diatasi.

Secara umum, tata kelola sampah di Kecamatan Ngaliyan masih dalam tahap perkembangan dengan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, penguatan partisipasi masyarakat, serta inovasi teknologi dan sistem pengelolaan, Kecamatan Ngaliyan memiliki

peluang untuk menjadi contoh baik dalam pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari analisis implementasi Perda No. 06 Tahun 2012 menggunakan Teori Grindle, berikut adalah saran-saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Ngaliyan:

1. Penguatan Isi Kebijakan Melalui Alokasi Sumber Daya yang Memadai:
 - Pemerintah Kota Semarang, khususnya DLH, perlu merevisi alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah agar lebih proporsional dengan amanat Perda No. 06 Tahun 2012. Peningkatan anggaran ini krusial untuk penyediaan fasilitas (tong sampah terpilah, gudang bank sampah, alat timbangan), penambahan SDM di bidang sosialisasi dan pendampingan, serta insentif bagi masyarakat dan komunitas yang aktif.
 - Perlu adanya mekanisme pendanaan yang lebih jelas dan mudah diakses bagi inisiatif pengelolaan sampah di tingkat kelurahan dan RW, tidak hanya mengandalkan kas RT/RW.
2. Peningkatan Kepatuhan dan Responsivitas Masyarakat:
 - Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, bekerja sama dengan DLH Bidang 4, perlu merancang program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif, kreatif, dan berkelanjutan. Pendekatan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di setiap wilayah, melibatkan tokoh masyarakat, dan menunjukkan manfaat ekonomi serta lingkungan secara konkret.
 - Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang mudah diakses dan memadai di setiap RT/RW dapat mendorong kepatuhan masyarakat terhadap amanat Perda.
3. Penyelarasan Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor:
 - Perlu dibentuk forum koordinasi yang lebih formal, rutin, dan inklusif antara seluruh aktor terkait (DLH, Kecamatan, Kelurahan, LPMK, perwakilan RW/RT, Bank Sampah, dan sektor swasta seperti pengepul atau PT Narpati). Forum ini harus menjadi wadah untuk menyinkronkan strategi,

berbagi informasi, mengatasi hambatan, dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman serta komitmen bersama terhadap tujuan Perda.

- Mendorong kemitraan yang lebih luas dengan sektor swasta, tidak hanya dalam pengangkutan atau pengolahan di TPA, tetapi juga dalam pengembangan teknologi daur ulang, pemasaran produk daur ulang, dan penyediaan insentif bagi masyarakat.

4. Penguatan Karakteristik Rezim dan Institusi:

- DLH perlu mengatasi kekurangan SDM di bidang pemberdayaan masyarakat agar program pendampingan dan sosialisasi dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.
- Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang lebih transparan dan partisipatif untuk mengukur efektivitas implementasi Perda, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kebijakan dan strategi secara berkala.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan kesenjangan antara isi Perda No. 06 Tahun 2012 dan konteks implementasi di Kecamatan Ngaliyan dapat diperkecil, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Semarang.

**IMPLEMENTASI TATA KELOLA SAMPAH PERKOTAAN:
STUDI KASUS KECAMATAN NGALIYAN**

SKRIPSI

Program Studi S-1 Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Safri Subhan Kahfi

2006016013

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

DAFTAR PUSTAKA

- Aboejoewono, A. (1985). Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya. *Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus*.
- Anton Hartono. (2025). *Daya Tampung TPA Jatibarang Tinggal 5 Tahun Lagi*. Inilah.Com.
- Arumdani, I. S., Sumiyati, S., & Samadikun, B. P. (2022). Perencanaan Sistem Pengangkutan Sampah Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dengan Mengintegrasikan Analisis GIS dan Lalu Lintas. *Dampak*, 19(2), 66. <https://doi.org/10.25077/dampak.19.2.66-72.2022>
- Asih, A. M. S., Trapsilawati, F., Sophya, B. M., & Normasari, N. M. E. (2022). Waste Bank Program for Households as A Means of Processing Inorganic Waste. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 8(4), 177. <https://doi.org/10.22146/jpkm.73409>
- Azrul, A. (1990). Pengantar Ilmu Lingkungan. *Mutiara Sumber Wijaya*, Jakarta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed-methods approaches*, vol. 1 (1).
- Ervin Dwi Ariyanto, A. M. (2018). ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM PILAH SAMPAH DI KELURAHAN MANGKANG KULON, KECAMATAN TUGU, KOTA SEMARANG. *E-Journal Undip*.
- Fasdani, A. A. (2018). Politik Lingkungan: strategi pengelolaan sampah perkotaan. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 16(1), 1–6.
- Gobai, K. R., Surya, B., & Syafri, S. (2021). Pengelolaan sampah perkotaan. In *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan*.
- Hadiwiyoto, S. (1983). *Penanganan dan pemanfaatan sampah*. Yayasan Idayu.
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42–52.

- Kartikawan, Y. (2009). Pengelolaan Persampahan. *Jurnal Lingkungan Hidup*.
- Karya, D. C. (1993). *Penyusunan Pedoman Teknik Operasi dan Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Perkotaan (Komponen Persampahan)*. Jakarta.
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 2050*. World Bank Publications.
- Kodoatie, R. J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa infrastruktur*. Pustaka Pelajar.
- Manurung, R. A. (2013). Peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah di kota kecil Jawa Tengah (Studi kasus: Kawasan Kupang Kidul, Kota Ambarawa). *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1(3), 227–244.
- Marlina, A. (2020). Tata Kelola Sampah Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 11(02), 125–144.
- Merilee S. Grindle. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Mulyadi, M., Muchlis, F., & Syarifuddin, H. (2023). Strategi Pengelolaan Sampah di TPA Lubuk Terentang: Tinjauan Analisis SWOT. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1303–1311.
- Napitupulu, M. H., & Muhyidin, A. (2021). Tantangan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Sampah Kota Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(4), 385–397. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.34438>
- Nov Pratama, J. (2018). Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2016). *Jom Fisip*, 5(1), 1–15.
- Permatasari, N. P. I. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali*.
- Pramesti, P. Y., & Yuniningsih, T. (2023). Perencanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada TPA Jatibarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 232–250.

- Putranto, P. (2023). Prinsip 3R: Solusi Efektif untuk Mengelola Sampah Rumah Tangga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8591–8605.
- Rawana, Hardiwinoto, S., Budiadi, & Rahayu, S. (2020). Carbon stock potential at several agarwood-based agroforestry practices in Sragen and Karanganyar, Central Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 449(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/449/1/012030>
- Rosyidie, A. (2013). Banjir: fakta dan dampaknya, serta pengaruh dari perubahan guna lahan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 24(3), 241–249.
- Scheinberg, A., Nesić, J., Savain, R., Luppi, P., Sinnott, P., Petean, F., & Pop, F. (2016). From collision to collaboration—Integrating informal recyclers and reuse operators in Europe: A review. *Waste Management & Research*, 34(9), 820–839.
- Sholihah, K. K. A. (2020). Kajian Tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia*, 03(03), 1–9.
- Sucipto, C. D. (2012). Teknologi pengolahan daur ulang sampah. *Yogyakarta: Gosyen Publishing*.
- Sugiyono, P. D. (2010). Metode Penelitian. In *Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 71–84.
- Syahputra, H. (2021). Manajemen Tata Kelola Kota Medan Melalui Pendekatan Reduce at Source dan Resource Recycle. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 3(1), 64–84. <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i1.9811>
- Triwibowo, D., & Halimatussadiyah, A. (2016). Aplikasi Model Optimasi untuk Meningkatkan Efisiensi Pengangkutan Sampah di Kota Cilegon An Application of Optimization Model to Improve the Efficiency of Waste Collection Service in Cilegon City Pendahuluan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia.*, 16(1), 59–80.

Wahyudin, W., Syamsiah, S., & Sunjoto, S. (2017). SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (System of Municipal Solid Waste Management in Bima City West Nusa Tenggara Province). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 24(3), 103. <https://doi.org/10.22146/jml.30101>

Widiarti, I. W. (2012). Pengelolaan Sampah Berbasis “Zero Waste” Skala Rumah Tangga Secara Mandiri. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 4(2), 101–113. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol4.iss2.art4>

Wilson, D. C., & Velis, C. A. (2015). Waste management—still a global challenge in the 21st century: An evidence-based call for action. In *Waste Management & Research* (Vol. 33, Issue 12, pp. 1049–1051). SAGE Publications Sage UK: London, England.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Pemerintah kota semarang. (2012). Peraturan daerah kota semarang nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. <Https://dprd.semarangkota.go.id/packages/upload/file/garr7hw.pdf>

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Staf Bidang Pembangunan Kecamatan Ngaliyan Bapak Moedzar Lazuardy S.STP.



2. Kepala Staf Bidang Pembangunan Ibu Fitri Ningtyas Dwi Astuti A.Md



3. Staff Bidang 2 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Ibu Ika



4. Staff Bidang 4 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Bapak Nuzuli



5. Ketua LPMK Ngaliyan Bapak Inzan Kumara dan Ketua RW 06 Bapak Ilmawan



6. Ibu RW 01 Ibu Sutiah dan Sekretaris RW 01 dan Ibu Tutianah



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kecamatan Ngaliyan.....	26
Gambar 4. 1 Jumlah Timbulan Sampah Tahunan	36
Gambar 4. 2 Pola Pengangkutan HCS (Hauled Container System).....	40
Gambar 4. 3 Pola Pengangkutan SCS (Stationary Container System)	40
Gambar 5. 1 Forum Pengelolaan Sampah yang Diadakan Kecamatan.....	50
Gambar 5. 2 Sosialisasi dan Penyuluhan Pilah Sampah	50
Gambar 5. 3 Monitoring Bank Sampah Melati	52
Gambar 5. 4 Armada Truck Dinas Lingkungan Hidup.....	55
Gambar 5. 5 Penyapuan Jalan Oleh DLH	56
Gambar 5. 6 Pelayanan Retribusi DLH.....	56
Gambar 5. 7 Pemeliharaan Kontainer Sampah	57
Gambar 5. 8 Pendampingan Bank Sampah.....	59
Gambar 5. 9 Kondisi Bank Sampah Melati	61
Gambar 5. 10 Buka Lapak Bank Sampah Melati.....	62
Gambar 5. 11 Kebun Warga RW 06	67
Gambar 5. 12 Tong Sampah Inisiasi Ibu-ibu PKK	70